

KAJIAN RENDEMEN DAN RANTAI PASOK KOMODITAS BERAS



Kerjasama

**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**
Dengan
**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

2018

KATA PENGANTAR

Bagi negara Indonesia, beras merupakan komoditas yang memiliki nilai strategis, baik dari segi ekonomi, lingkungan hidup, sosial maupun politik. Meskipun Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia dalam produksi beras, namun karena volume pasar beras dunia yang tipis menjadikan Indonesia rentan dalam menghadapi gejolak harga beras di pasar dunia. Jika terjadi peningkatan permintaan negara-negara pengkonsumsi beras terbesar di dunia, seperti Indonesia maka akan terjadi kenaikan harga beras di pasar dunia yang cukup signifikan. Sebagian besar masyarakat menghendaki adanya pasokan dan harga beras yang stabil, tersedia sepanjang waktu, terdistribusi secara merata, dan dengan harga terjangkau. Berbagai regulasi juga telah ditetapkan untuk mengatur dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan (beras).

Sementara itu, masalah utama yang banyak dihadapi dalam agribisnis beras di Indonesia antara lain: (1) dalam hal penanganan panen dan pascapanen padi, dimana masih tingginya tingkat kehilangan hasil atau susut serta masih rendahnya mutu gabah dan beras yang dihasilkan; dan (2) dalam hal rantai pasok yang panjang mulai dari level produsen hingga konsumen.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) telah melakukan Kajian Rendemen dan Rantai Pasok Komoditas Beras. Dalam konteks ini kajian ini bertujuan untuk: (a) Mengkaji rendemen gabah ke beras di daerah sentra produksi; (b) Menganalisis kinerja rantai pasok komoditas gabah/beras antar waktu dan wilayah, serta tujuan pasar; dan (c) Menganalisis pembentukan harga beras pada setiap level kelembagaan rantai pasok beras yang berjalan. Kajian dilakukan di sentra produksi padi/beras nasional yaitu di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan/bantuan sehingga laporan kajian kebijakan ini dapat diselesaikan. Dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh peneliti untuk menyelesaikan kegiatan kajian hingga pertengahan tahun ini, semoga hasil kajian yang disampaikan dalam laporan ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Bogor, Juni 2018
Kepala Pusat,

Dr.Ir. Abdul Basit, MS
NIP. 19610929 198603 1003

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Keluaran.....	6
II. METODOLOGI.....	7
2.1. Kerangka Teoritis.....	7
2.1.1. Rendemen Komoditas Gabah/Beras.....	7
2.1.2. Rantai Pasok Komoditas Gabah/Beras.....	8
2.1.3. Peran dan Kelembagaan Pemasaran/Perdagangan Komo- ditas Pertanian	13
2.1.4. Tujuan dan Kegunaan Penting Pemasaran	16
2.1.5. Marjin Pemasaran	17
2.1.6. Pembentukan Harga Beras Pada Setiap Level Kelembagaan Pemasaran	18
2.2. Lokasi dan Responden Kajian	21
2.3. Metoda Analisis.....	21
III. HASIL DAN PEMBAHASAN	23
3.1. Provinsi Jawa Timur	23
3.1.1. Kinerja Produksi dan Rendemen Gabah ke Beras.....	23
3.1.2. Kinerja Pengembangan Alsintan	26
3.1.3. Kinerja Rantai Pasok.....	27
3.1.4. Penyerapan Gabah Petani oleh Bulog Divre Jawa Timur	33
3.1.5. Dinamika Harga Gabah, Beras dan Pembentukan Harga Beras.....	35
3.1.6. Kinerja Penggilingan Padi dan Rendemen	37
3.2. Provinsi Jawa Tengah.....	41

3.2.1. Produksi Padi	41
3.2.2. Penyebaran Alsintan Panen	43
3.2.3. Kinerja Rantai Pasok.....	44
3.2.4. Kinerja Penggilingan Padi dan Rendemen	49
3.2.5. Kondisi dan Perkembangan Harga Beras	51
3.2.6. Pembentukan harga beras	56
IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	59
4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Rekomendasi Kebijakan.....	68
V. DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
2.1.	Jenis-jenis struktur pasar berdasarkan jumlah perusahaan dan sifat produk	16
3.1.	Perkembangan produksi gabah dan beras di Provinsi Jawa Timur, 2012-2017	23
3.2.	Produksi, konsumsi dan surplus-defisit beras di Provinsi Jawa Timur, 2016	25
3.3.	Penyebaran alsintan dari APBN di Provinsi Jawa Timur, 2015-2017 (Unit)	27
3.4.	Penyebaran alsintan dari APBN di lokasi kajian Provinsi Jawa Timur, 2015-2017 (Unit)	27
3.5	Kinerja harga dan marjin pemasaran gabah/beras dari tingkat petani, pedagang, penggilingan, grosir dan pengecer di Jawa Timur, 2018 (Rp/Kg)	33
3.6.	Penyerapan gabah (setara beras) oleh Bulog Divre Jawa Timur, 2017 dan posisi Maret 2018	34
3.7.	Perkembangan harga gabah (GKP) dan beras medium di Kabupaten Sidoarjo, 2017-2018 (Rp/Kg)	36
3.8.	Produksi GKG, beras dan surplus beras di Provinsi Jawa Tengah, 2012-2016	41
3.9.	Produksi, konsumsi dan surplus-defisit beras menurut kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, 2016	42
3.10.	Penyebaran alsintan dari APBN di Provinsi Jawa Tengah, 2012-2017	43
3.11.	Penyebaran alsintan dari APBN di lokasi kajian Kabupaten Sragen, Demak dan Klaten, 2012-2017 (Unit)	44
3.12.	Kondisi harga gabah kering panen di beberapa wilayah sentra produksi di Jawa Tengah, 2018	52
3.13.	Kondisi harga beras yang dihasilkan Penggilingan Padi UD Pro Tani di Kabupaten Klaten	52
3.14.	Kondisi harga beras menurut kualitas di Pasar Bintoro di Kabupaten Demak, 2018	53
3.15.	Kondisi harga beras menurut jenis atau kualitas di pasar Klaten, 2018	54
3.16.	Kondisi harga beras menurut menurut jenis atau kualitas di Pasar Legi Kota Solo, 2018	55
3.17.	Kondisi dan perkembangan harga beras menurut jenis kondisi beras di Pasar Dargo Semarang, 2018	56

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
2.1.	Alur gabah menjadi beras dengan komponen penggunaannya di Indonesia (BPS, 2017).....	8
2.2.	Rantai pasok agribisnia dari tingkat petani hingga konsumen.....	13
3.1.	Rataan rendemen gkg ke beras di lokasi kajian di Provinsi Jawa Timur, MH 2017/2018 dan MK 2017 (%)	24
3.2.	Pola rantai pasok gabah-beras di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 2018 (Rp/Kg).....	31
3.3.	Pola rantai pasok gabah-beras di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 2018.	32
3.4.	Perkembangan harga gabah (GKP) dan beras medium di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 2018.....	36
3.5.	Aliran jenis produk pada rantai pasok padi-beras di Kabupaten Sragen, 2018	47
3.6.	Aliran produk/beras pada rantai pasok padi-beras di Kabupaten Demak dan Klaten, 2018.	48

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Penggilingan padi skala kecil di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, 2018... .	72
2.	Penggilingan padi skala menengah di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 2018	72
3.	Penggilingan padi skala besar di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, 2018... .	73
4.	Penggilingan padi skala besar di Kabupaten Ngawi Jawa Timur, 2018..... .	73

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Rendemen dan Rantai Pasok Komoditas Beras

Pendahuluan

- 1) Bagi negara Indonesia, beras merupakan komoditas yang memiliki nilai strategis, baik dari segi ekonomi, lingkungan hidup, sosial maupun politik. Demikian strategisnya isu perberasan senantiasa menjadi perhatian pemerintah, khususnya menyangkut kebijakan peningkatan produksi, perdagangan internasional, distribusi, pemasaran dan harga domestik. Pemerintah menghendaki adanya pasokan dan harga beras yang stabil, tersedia sepanjang waktu, terdistribusi secara merata dan dengan harga yang terjangkau. Meskipun Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia dalam produksi beras, namun karena volume pasar beras dunia yang tipis menjadikan Indonesia rentan dalam menghadapi gejolak harga beras di pasar dunia. Jika terjadi peningkatan permintaan negara-negara pengkonsumsi beras terbesar di dunia, seperti Indonesia maka akan terjadi kenaikan harga beras di pasar dunia yang cukup signifikan.
- 2) Beras merupakan komoditas unik bagi Indonesia. Komoditas beras di perdesaan telah menjadi simbol status sosial-ekonomi rumah tangga. Rumah tangga yang menggunakan beras sebagai pangan pokok dipandang memiliki status sosial-ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan yang mengkonsumsi bahan pokok lainnya, seperti jagung dan umbi lokal. Kekurangan pasokan beras di perkotaan dapat menyebabkan efek *panic buyer* dan menimbulkan aksi borong pembeli yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik. Sebagian besar masyarakat menghendaki adanya pasokan dan harga beras yang stabil, tersedia sepanjang waktu, terdistribusi secara merata, dan dengan harga terjangkau. Hal ini menunjukkan beras masih merupakan komoditas strategis secara politis.
- 3) Berbagai regulasi ditetapkan untuk mengatur dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Indonesia. Bahan pangan pokok dan strategis harus tersedia dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu serta pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Sebagai komoditas pangan pokok utama di Indonesia, beras mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial-politik, sehingga terjadinya fluktuasi harga beras akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat konsumen. Meskipun produksi beras jauh lebih besar daripada kebutuhan dan secara bertahap harga beras telah turun, namun harga beras di masyarakat masih tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja rantai pasok beras mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan harga beras.
- 4) Pemerintah berkepentingan menetapkan regulasi untuk menciptakan tata niaga beras yang berkeadilan melalui Permendag Nomor 57 Tahun 2017 tentang

Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras serta Permentan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras. Pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras di dalam Permendag 57 Tahun 2017 telah mempertimbangkan struktur biaya yang wajar dalam hal biaya produksi, distribusi, keuntungan seluruh pelaku serta biaya lainnya. Besaran HET yang telah ditentukan harus menjadi acuan seluruh pelaku usaha dalam distribusi dan pemasaran beras di tingkat eceran. Permendag Nomor 57 Tahun 2017 juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang menjual harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi.

- 5) Kajian dilakukan di sentra produksi padi/beras nasional yaitu di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan kuesioner terstruktur terhadap responden petani/kelompok tani, RMU/penggilingan padi, pedagang pengumpul gabah/beras, pedagang besar/agen/supplier gabah/beras, pedagang antar pulau, pedagang beras eceran dan non eceran di pasar. Sementara untuk data sekunder dikumpulkan dari berbagai dinas/instansi terkait seperti Dinas Pertanian, BPS dan literatur yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.
- 6) Kajian ini bertujuan untuk: (a) Mengkaji rendemen gabah ke beras di daerah sentra produksi padi; (b) Menganalisis kinerja rantai pasok komoditas gabah/beras antar waktu dan wilayah, serta tujuan pasar; dan (c) Menganalisis pembentukan harga beras pada setiap level kelembagaan rantai pasok beras yang berjalan.

Hasil dan Pembahasan

Kinerja rendemen beras

- 7) Kinerja rendemen dari Gabah Kering Giling (GKG) menjadi beras ditentukan banyak faktor terutama adalah mutu gabah yang digiling, penanganan pasca panen dan teknologi penggilingan padi. Mutu gabah dimulai dari lahan petani, proses penaganan pasca panen hingga menjadi GKG, sehingga penanganan pascapanen serta alat dan mesin pertanian yang mendukungnya akan memberi dampak pada mutu gabah siap giling.
- 8) Dampak bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) terutama *Combine Harvester* (CH) sudah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat petani, yaitu: (a) membantu petani mempercepat proses pemanenan, kegiatan pengolahan lahan, serta penanaman tepat waktu dan serempak; (b) mengurangi biaya panen menjadi sebesar Rp 2,5 – 2,8 juta/ha, sementara biaya panen menggunakan *power thresher* (PT) antara Rp 4,2 – 4,9 juta/Ha; (c) meningkatkan rendemen dari Gabah Kering Panen (GKP) ke beras menjadi sebesar 53-60%, sedangkan jika menggunakan PT rendemen dari GKP ke beras hanya 48-55 %; (d) rendemen dari GKG ke beras dengan PT mencapai 60-63%, sedangkan dengan CH bisa mencapai 63-67%; (e) GKP hasil panen menggunakan CH harganya meningkat 200-300 Rp/kg, sedangkan yang dipanen manual dan dirontok dengan PT harganya meningkat 100-200 Rp/kg,

dibandingkan GKP yang dihasilkan dari panen dan perontokan manual; (f) kehilangan susut hasil dapat ditekan dari 10-12 % menjadi 2 - 4 % saat panen, perontokan dan pengangkutan hasil; dan (g) banyak tenaga kerja muda yang tertarik terjun di pertanian baik sebagai operator traktor, *transplanter*, maupun *combine harvester*.

- 9) Pengeringan GKP (kadar air berkisar 20-25% pada MK dan 25-30% pada MH) hingga menjadi GKG (kadar air 13-14%) memerlukan waktu 2-5 hari tergantung kadar air GKP, alat yang digunakan, dan keadaan cuaca di lokasi penjemuran. Beberapa Gapoktan dan Penggilingan Padi Menengah (PPM) sudah memperoleh bantuan alat pengering (*dryer*) tipe bak dengan kapasitas 10 ton GKP/proses (sekitar 24 jam) menggunakan bahan bakar gas sebagai sumber energinya, dan listrik untuk blowernya. Kapasitas yang kecil dan penggunaan bahan bakar gas membuat ongkos pengeringan menjadi mahal, sekitar 250-400 Rp/kg, lebih mahal dari ongkos penjemuran dengan tenaga surya yang sekitar 100-200 Rp/kg. Sementara itu, Penggilingan Padi Besar (PPB) mempunyai pengering mekanis modern berbahan bakar sekam sebagai sumber energinya, ongkos pengeringannya sangat murah, sekitar 25 Rp/kg untuk kapasitas 60 ton GKP/proses (sekitar 19 jam pada musim kemarau dan 24 jam pada musim hujan). Pengering modern semacam ini minimal berkapasitas 30 ton GKP/proses, dengan investasi yang jauh lebih mahal dari pada pengering tipe bak.
- 10) Hasil sementara sensus ekonomi 2016 oleh BPS tersirat adanya pertumbuhan penggilingan padi sepanjang tahun 2012-2016 terutama PPB, PPM dan Penggilingan Padi Kecil (PPK) keliling. Namun demikian, di beberapa sentra produksi beras, operasi PPK sudah mulai berkurang dengan munculnya PPB di sentra-sentra ekonomi. Selain kalah bersaing dengan PPB dan PPM, PPK yang menetap juga kalah bersaing dengan penggilingan padi keliling (grandong). Walau demikian, masih ada PPK yang masih terus beroperasi dengan menghasilkan mutu beras yang bagus seperti di wilayah Sidoarjo, Ngawi dan Klaten. Di Sidoarjo, PPK dengan RMU berkapasitas kecil namun berteknologi baru, mampu menghasilkan beras sosoh dengan persentase beras kepala 13% lebih besar dan persentase menir yang jauh menurun, dibandingkan dengan beras sosoh yang dihasilkan PPK dengan RMU biasa di daerah yang sama. Rendemen giling kedua jenis RMU hampir sama, dengan kisaran 60-65% dari GKG, tergantung dari kualitas dan kebersihan GKG.
- 11) Dibangunnya PPB di sentra produksi padi, juga mempengaruhi operasional kerja PPM terutama pada masa panen MT3 (musim tanam ketiga). Kondisi ini, membuat sebagian PPM mengubah strategi usaha, mengolah GKP menjadi Beras Pecah Kulit (PK) atau beras bahan/glosor/asalan. Beras pecah kulit adalah GKG yang diproses sampai tahap pecah kulit (*husking*) tanpa dilakukan penyosohan (*polishing*), sedang beras bahan atau beras glosor adalah beras yang telah diproses oleh penggilingan menjadi beras dengan tingkat sosoh rendah untuk diolah kembali (*rice to rice processing*). Alasan yang dikemukakan oleh responden merubah strategi bisnis ini adalah: (a) teknologi pengolah gabah-beras yang mereka miliki pada umumnya sudah tua dan sifatnya tidak terpadu (*husking*, ayakan dan *polishing* terpisah) sehingga efisiensi rendah dan mutu rendah karena banyak beras *broken*, (b) limbah

sekam tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, (c) banyak penggilingan besar yang mengolah beras PK atau beras glosor menjadi beras putih dengan mutu yang lebih baik. Pada saat gabah sedikit, harga beras tinggi maka PPM memproses menjadi beras konsumsi dan dikirim ke pedagang-pedagang beras yang ada di pasar lokal dalam bentuk karungan dengan berat 50-80 kg/karung. Kapasitas PPM pada kisaran 7-15 ton beras bahan per hari dengan rendemen GKG – Beras adalah 63%-65%.

- 12) Populasi PBB terus bertambah di sentra-sentra produksi beras. Beberapa PBB, mengkhususkan usahanya pada *reprocessing* yaitu mengolah beras dari mutu rendah atau asalan menjadi beras mutu premium (*rice to rice processing*) dengan kapasitas 100-500 ton beras/hari (8 jam kerja/hari). Beras mutu rendah, beras pecah kulit dan beras bahan/glosor diolah dengan teknologi *processing* yang lebih bagus seperti penyosohan ulang yang diikuti dengan pengkabutan (*mist polishing*), penghilangan kotoran (*blower*), sortasi beras patah dan menir menjadi beras bermutu sedang dan premium. Pada penggilingan padi yang melakukan *reprocessing*, beras dikemas dalam satuan 25 kg dan 5 kg/kemasan yang diberi merk sesuai tujuan dan segmen pasar. Beberapa PPM dan PBB yang menjadi rekanan Bulog, melakukan *reprocessing* dari beras mutu rendah dibersihkan kotorannya dengan blower dan disortasi menir dan beras patahnya untuk memenuhi syarat beras standar mutu Bulog.

Kinerja Rantai Pasok Beras

- 13) Rantai pasok beras adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan produk beras dan jasa kepada pelanggan. Dengan demikian manajemen rantai pasok beras adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan baku (GKP, GKG) dan pelayanan, pengubahan barang (GKG) menjadi barang setengah jadi (beras pecah kulit/beras PK dan beras glosor/bahan) menjadi produk akhir (beras premium, beras medium) serta pengiriman ke pelanggan. Panjangnya rantai proses dari gabah menjadi beras dan rantai pasok dari petani ke penggilingan selanjutnya melalui berbagai pelaku tataniaga hingga sampai ke konsumen membuat panen raya yang berlangsung di sentra-sentra produksi tidak cepat berdampak pada pasokan beras di pusat-pusat konsumsi. Paling tidak melibatkan 6-7 pelaku usaha dalam rantai pasok beras, yaitu petani, penebas padi/pedagang pengumpul, penggilingan padi, pedagang besar antar wilayah, pedagang besar di pusat-pusat pasar, serta pedagang pengecer atau ritel tergantung tujuan dan segmen pasarnya.
- 14) Beras sebagai bagian dari rantai pasok pangan lebih unik lagi, selain ada penurunan mutu dan susut bobot sepanjang rantai pasok juga adanya konversi dari gabah menjadi produk siap konsumsi dalam bentuk beras. Perubahan berat bahan dimulai dari Gabah Kering Panen (GKP) menjadi Gabah Kering Giling (GKG) terkonversi karena penurunan kadar air, dan dari GKG menjadi beras terkonversi karena rendemen giling. Konversi dan susut sepanjang rantai pasok tersebut menjadikan GKP yang dipanen akan menghasilkan beras yang ditujukan untuk konsumsi pada kisaran 40-55% dengan basis GKP. Teknologi pascapanen pada kegiatan panen, perontokan, pengeringan, penggilingan dan penyimpanan sangat berpengaruh terhadap beras yang dihasilkan baik kuantitas maupun kualitas. Variasi teknologi panen, perontokan, pengeringan

dan penggilingan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas produk beras sebagai bahan yang akan mengalir sepanjang rantai pasok. Oleh karena itu dibahas profil rantai pasok dalam tiga kelompok yaitu kelompok teknologi sederhana (panen sabit, perontokan dengan *pedal thresher* dan penggilingan kecil), kelompok menengah (panen sabit, perontokan dengan *power thresher* dan penggilingan sedang), dan kelompok maju (panen dan perontokan dengan *combine harvester* dan penggilingan besar).

- 15) Secara umum struktur agribisnis terdiri dari lima subsistem, yaitu : (a) subsistem pengadaan sarana produksi dan alsintan, (b) subsistem usaha tani atau produksi, (c) subsistem pascapanen termasuk didalamnya penggilingan padi-beras, (d) subsistem distribusi dan pemasaran, dan (e) subsistem penunjang. Dari kelima subsistem tersebut, subsistem ke satu dan kedua telah sukses dikelola pemerintah melalui Kementerian Pertanian seperti ditunjukkan oleh angka produksi yang terus meningkat sejak tahun 2014 sampai 2017 (tahun 2014: 70.846.465 ton; tahun 2015 : 75.397.841 ton; tahun 2016: 79.354.767 ton; tahun 2017: 82,3 juta ton). Tingkat produksi tersebut mampu memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang berjumlah 255,46 juta jiwa (tahun 2015) dengan konsumsi per kapita 92 kg/tahun (1,63 kg/minggu; BPS 2015), bahkan surplus hingga 20%. Namun dalam kenyataan setiap tahunnya, ada pergerakan harga beras meningkat hingga membebani masyarakat konsumen dan sebaliknya harga gabah menurun tajam sehingga giliran petani yang dirugikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa subsistem ke tiga, ke empat, dan ke lima belum berjalan dengan baik dan efisien.
- 16) Subsistem ke tiga yaitu kegiatan penanganan pascapanen yang didalamnya adalah industri penggilingan padi-beras. Penggilingan padi mempunyai peran sentral dalam perberasan nasional, karena kuantitas dan kualitas beras terutama ditentukan oleh proses yang terjadi pada tahap ini. Data jumlah dan kondisi penggilingan padi menjadi penting dalam menghitung jumlah beras yang akan dihasilkan dari setiap masa panen tiba. Namun data penggilingan padi terbaru yang dikeluarkan resmi oleh BPS adalah data tahun 2012 yang menyebutkan, jumlah penggilingan padi sebanyak 182.199 unit. Terdiri atas 2.076 penggilingan padi berskala besar (PPB), 8.628 penggilingan padi skala menengah (PPM), dan 171.495 unit penggilingan padi skala kecil (PPK).
- 17) Selain mutu gabah, teknologi dan kebaruan alat dan mesin penggilingan mempengaruhi besarnya rendemen giling. Hasil survei di penggilingan padi besar (kasus di Kabupaten Sragen), alat penggiling padi yang dibeli tahun 2005 mempunyai kapasitas 6 ton/jam dengan rendemen 57-58 % dari GKP ke beras, menurun kapasitasnya menjadi 4-5 ton/jam dengan rendemen 50-55% pada tahun 2017. Dengan demikian, angka konversi GKG ke beras sebesar 62,74% perlu diperbarui mengingat data tersebut diterbitkan oleh BPS tahun 2012 yang kemungkinan saat ini populasi penggilingan didominasi oleh penggilingan tua. Oleh karenanya data profil penggilingan padi tidak hanya pengelompokan berdasarkan besar-kecilnya kapasitas, tetapi ditambah dengan data pengelompokan berdasarkan tahun operasional alat dan mesin (umur alat dan mesin). Penambahan informasi tersebut akan menambah akurasi atau memperbaiki nilai perkiraan produksi beras yang dihasilkan.

- 18) Subsistem agribisnis ke empat yaitu distribusi dan pemasaran juga belum terlaksana dengan baik, hal ini dicerminkan adanya gejolak harga beras di tingkat konsumen maupun harga gabah di tingkat petani baik di saat panen raya maupun panen musim kering. Panjangnya rantai pasok dan struktur pasar yang mengarah struktur pasar *oligopsonistik* terutama pada musim panen raya ditengarai menjadi penyebab rendahnya nilai *market share* dari pasar yang terbentuk. Kondisi tersebut menyebabkan pada satu sisi harga beras di pasar konsumen tetap tinggi, sedangkan harga gabah yang diterima petani relatif rendah. Pergerakan harga yang diserahkan kepada mekanisme pasar, sedangkan pasar tidak berjalan secara sempurna menyebabkan harga mengalami fluktuasi yang cukup tinggi antar waktu.
- 19) Selain aliran bahan, waktu yang diperlukan sejak padi dipanen (GKP) sampai dapat diakses oleh *end user* dalam bentuk beras perlu dicermati karena berdampak pada ketersediaan pasokan beras di pusat-pusat pasar. Hal ini sering dijumpai adanya kondisi dimana panen raya sudah berlangsung tetapi harga beras di pasar masih tetap tinggi. Informasi rentang waktu tersebut (waktu supply) sangat penting untuk mengatur stok beras yang ada di pasar, sehingga dapat diperkirakan kapan dampak panen berpengaruh terhadap perubahan harga pasar karena sudah terbentuknya kesetimbangan penawaran dan permintaan.
- 20) Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa rentang waktu panen hingga tersedia beras di pasar berbeda antar musim, pada musim hujan (MH) diperkirakan 14 – 28 hari, pada MK I sekitar 14-21 hari, pada MK-II sekitar 7-14 hari. Rentang waktu tersebut sangat ditentukan ketersediaan dukungan alat pengering (*dryer*) dan kelancaran distribusi. Kegiatan yang sangat mempengaruhi panjangnya rentang waktu panen sampai beras tersedia di pasar adalah ketersediaan alat angkut, alat pengering (*dryer*), tenaga kerja yang melakukan aktivitas aliran gabah ke RMU, serta ketersediaan moda transportasi dan kelancaran jalur distribusi untuk aliran beras ke konsumen.
- 21) Alternatif-alternatif rantai pasok baru yang dapat dikontrol oleh pemerintah perlu diciptakan dan ditumbuh kembangkan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses kebutuhan pangan pokok beras dengan harga yang terjangkau dan mutu yang baik. Analisis rantai pasok dari daerah sentra-sentra produksi ke sentra-sentra pusat-pusat pasar perlu dilakukan secara berkelanjutan karena perubahan teknologi penanganan pasca panen, teknologi proses pengolahan, perubahan preferensi konsumen terhadap mutu beras, perubahan teknologi informasi akan berdampak pada sistem rantai pasok di suatu wilayah.

Pembentukan harga beras

- 22) Pembentukan harga gabah dan beras dengan asumsi pasar bersaing sempurna sangat ditentukan kekuatan penawaran dan kekuatan permintaan, dalam kenyataannya pasar tidak selalu berjalan secara sempurna. Pada saat musim panen raya struktur pasar gabah dan beras cenderung mengarah pada struktur pasar *oligopsonistik* dimana kekuatan pembeli terutama industri penggilingan menengah-besar memiliki kekuatan yang lebih dominan dibandingkan petani dalam menentukan harga. Kondisi tersebut biasanya diperburuk oleh situasi

saat panen raya terjadi pada kondisi curah hujan tinggi, sehingga menyebabkan terganggunya proses kegiatan pemanenan, penjemuran, dan dalam distribusi. Kondisi tersebut sering menekan harga di tingkat petani pada saat musim panen raya. Namun fenomena yang agak berbeda terjadi pada musim panen raya MH 2007/2018 di mana harga tetap tinggi, meskipun mengalami sedikit penurunan. Pertanyaannya adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan harga beras tetap tinggi di kala musim panen raya tiba?

- 23) Beberapa faktor penjelas dari fenomena tersebut dapat dilihat dari aspek teknis, ekonomi, kelembagaan pemasaran dan aspek kebijakan. Faktor teknis yang utama adalah penggunaan teknologi *combine harvester* mempercepat proses kegiatan panen lintas daerah sentra produksi, namun pada sisi lain ketersediaan dan penggunaan alat pengering (*dryer*) oleh penggilingan padi skala menengah dan besar dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas sehingga proses penjemuran atau pengeringan terhambat.
- 24) Faktor ekonomi yang terutama adalah perubahan preferensi konsumsi konsumen terutama kelas menengah-atas dari beras medium ke arah beras premium yang dalam literatur ekonomi disebut "*value ladder*" atau struktur peningkatan nilai tambah pertanian. Kondisi tersebut telah mendorong industri penggilingan menengah dan besar memperbesar pangsa produksi beras premium dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan beras medium sehingga harga beras secara umum tertarik ke atas dan tetap tinggi.
- 25) Faktor kelembagaan pemasaran, adanya teknologi informasi dan komunikasi rantai pasok beras tidak mengikuti pola lama yang telah mapan melalui berbagai pelaku tataniaga pada berbagai tingkatan menurut tujuan dan segmen pasar. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut penggilingan padi dapat langsung melakukan penetrasi pasar ke pasar di pusat-pusat konsumsi secara langsung, bahkan ke konsumen institusi secara langsung (restoran/rumah makan, hotel, katering). Kondisi tersebut berdampak pada psikologi di pasar-pasar tradisional bahwa pasokan beras makin berkurang dan mendorong harga tetap tinggi di pasar.
- 26) Faktor kebijakan, isu kebijakan impor beras yang tidak menentu menyebabkan psikologi pasar bahwa beras benar-benar langka atau kurang pasokan, sehingga harga yang secara bertahap mengalami penurunan dari Rp 5400,-/Kg hingga Rp 3800,-/Kg, kembali secara perlahan menunjukkan tendensi meningkat kembali hingga mencapai Rp 4200,-/Kg hingga mencapai Rp 4400,-/Kg, bahkan daerah tertentu menembus harga Rp 4800,-/Kg.
- 27) Selain itu, pembentukan harga gabah di tingkat petani dipengaruhi oleh: (1) pola musim panen, yaitu ada musim panen raya dan paceklik serta awal panen atau akhir panen, (2) biaya usahatani, (3) keberhasilan panen (volume panen) dan kualitas gabah yang dijual. Adapun pembentukan harga beras di tingkat penggilingan beras dipengaruhi oleh: (1) volume beras yang diserap saat musim panen raya atau paceklik, (2) tujuan dan segmen pasar, (3) mutu atau kualitas beras yang dihasilkan, (3) pengaruh harga Bulog, yakni saat membeli gabah atau membeli beras, dan (4) volume serapan gabah atau beras oleh Bulog. Sementara pembentukan harga beras di tingkat pedagang eceran/agen beras di pasar lokal dipengaruhi oleh: (a) volume beras yang diserap

pedagang saat musim panen raya atau paceklik, (b) mutu atau kualitas beras, (c) pengaruh harga saat Bulog melakukan operasi pasar, (d) volume serapan gabah atau beras oleh Bulog, dan (e) permintaan serta preferensi konsumen terhadap beras yang dibeli.

Penyerapan Gabah Petani oleh Bulog Divre Jawa Timur

- 28) Pada tahun 2017, Bulog Divre Jawa Timur menargetkan dapat menyerap gabah (setara beras) sebanyak 906.240 ton. Namun realisasinya hanya sekitar 63,90%. Bila dilihat pada beberapa Subdivre, misalnya pada lokasi sentra padi Bojonegoro dan Lamongan dari target 95.000 ton, penyerapannya relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur yaitu mencapai 66,40%. Untuk lokasi subdivre seperti Surabaya Utara (didalamnya terdapat Kabupaten Sidoarjo) dan Madiun (didalamnya melingkupi sentra Kabupaten Ngawi) masing-masing realisasi serapannya sebesar 57,60% dan 48% (Tabel 3).
- 29) Pada tahun 2018, penyerapan gabah (setara beras) di Divre Jawa Timur dari target 697 ribu ton pada posisi 8 Maret 2018 baru sekitar 3,8%. Pada lokasi kajian di tiga subdivre, ternyata realisasi serapannya dibawah rataan serapan gabah (setara beras) di Jawa Timur. Menurut Bulog, bahwa masih rendahnya serapan gabah di Jawa Timur mengingat panen padi di Jawa Timur belum seluruhnya. Musim panen padi MH 2017/2018 di Jawa Timur telah berlangsung sejak Januari 2018, dan meningkat pada bulan Pebruari serta Puncaknya pada bulan Maret 2018.
- 30) Menurut Bulog, belum optimalnya panen di Jawa Timur menyebabkan harga gabah masih tinggi di tingkat petani. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, bahwa panen MH 2017/2018 masih berjalan, dan hingga posisi awal Maret proporsi panen baru sekitar 50-60%. Untuk di Sentra produksi seperti di Lamongan dan Sidoarjo baru panen sekitar 50%.
- 31) Sesuai INPRES No. 5 tahun 2015, bahwa HPP gabah sebesar Rp 3.700/Kg. Selanjutnya berdasarkan Rapat Koordinasi Terbatas antara Kementerian Perdagangan, Pertanian, dan pihak terkait lainnya akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan fleksibilitas harga penyerapan gabah dari sebelumnya 10% di atas harga penyerapan pemerintah (HPP) menjadi 20% di atas HPP. Melalui kenaikan itu, diharapkan Bulog bisa membeli GKP maksimal 20% di atas HPP untuk semua wilayah.

Rekomendasi Kebijakan

- 32) Introduksi teknologi alat dan mesin pertanian terutama *combine harvester* dan *dryer* telah berdampak meningkatnya proses kegiatan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil, serta meningkatkan rendemen dari GKG ke beras dari 62-63 % menjadi 65-67 %.
- 33) Panjangnya rantai pasok gabah dan beras yang melibatkan 6-7 pelaku tataniaga dan struktur pasar gabah dan beras pada musim panen raya menyebabkan harga beras yang dibayar konsumen relatif tetap tinggi dan harga yang diterima petani relatif tetap rendah. Namun fenomena pada panen raya MH 2017-2018 petani petani mendapatkan harga yang relatif tinggi jika

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan faktor teknis, ekonomi, kelembagaan dan kebijakan.

- 34) Perubahan preferensi konsumsi oleh konsumen golongan menengah – atas telah mendorong penggilingan menengah-besar meningkatkan pangsa produksi beras premium dan mengurangi beras medium, karena dapat menciptakan nilai tambah dan keuntungan bagi industri penggilingan. Namun demikian standard beras premium yang diproduksi dan beredar di pasar sesungguhnya belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pemerintah dan konsumen bisa dirugikan.
- 35) Titik kritis pascapanen padi adalah di tahap pengeringan, terutama pada saat panen raya terjadi pada musim hujan, program pengembangan *Rice Drying Center* (RDC) di daerah sentra produksi perlu dikembangkan. Langkah ini dapat menjadi alternatif solusi kebijakan lanjutan dari program bantuan alsintan khususnya *combine harvester* yang telah dijalankan, agar terjadi keseimbangan jumlah alat pemanen dan pengering.
- 36) Upaya peningkatan efisiensi rantai pasok beras dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti: (a) pemangkasaran rantai pasok relevan dilakukan pasca panggilingan padi, karena peran penebas dan pedagang pengumpul sulit tergantikan perannya oleh pelaku usaha lain; dan (b) peningkatan volume serapan Bulog yang disertai peningkatan outlet Bulog (operasi pasar, Rastra, Rumah Pangan Kita).
- 37) Penguatan kelembagaan kelompok tani/gapoktan dalam bisnis gabah dan beras. PUPM sebagai *supplier* TTI di tingkat desa perlu penguatan baik dari aspek permodalan, manajemen usaha terutama administrasi keuangan, serta fasilitas pendukungnya, sehingga dapat tumbuh menjadi rantai pasok baru yg lebih pendek. Fasilitas pendukung yang diperlukan adalah *combine harvester* skala menengah-besar, dryer, dan penggilingan padi menengah-besar.
- 38) Meningkatkan volume serapan gabah oleh Bulog dengan membangun kemitraan strategis dengan gapoktan dan swasta yang memiliki fasilitas pendukung. Peran Bulog sebagai *supplier* RPK di pusat-pusat pasar harus ditingkatkan perannya karena dapat memutus rantai pasok yang panjang dari penggilingan ke konsumen dan dapat mempengaruhi psikologi pasar.
- 39) Permasalahan yang dihadapi pada panen MH, dengan masih terdapat curah hujan adalah kesulitan dalam penjemuran hasil panen dan struktur pasar yang cenderung *oligopolistik*. Oleh karena itu, dukungan kedepan terkait program hendaknya tidak hanya berupa input terkait benih, pupuk dan alsintan produksi dan panen, akan tetapi juga sangat dibutuhkan berupa bantuan alat pengering dan lantai jemur yang memadai. Pemerintah melalui Bulog dapat melakukan intervensi pasar gabah dan beras ke arah struktur pasar gabah dan beras pada musim panen raya secara lebih kompetitif.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beras merupakan bahan pangan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia serta memiliki peran yang strategis dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan stabilitas politik nasional. Pada saat ini debat publik selalu muncul ketika harga beras melonjak atau harga gabah turun drastis. Sebagian besar masyarakat masih tetap menghendaki adanya pasokan dan harga beras yang stabil, tersedia sepanjang waktu, terdistribusi secara merata dan dengan harga yang terjangkau. Kondisi ini menunjukkan bahwa beras masih menjadi komoditas strategis secara politis (LPEM-FEUI, 2001).

Demikian strategisnya isu perberasan senantiasa menjadi perhatian pemerintah, khususnya menyangkut kebijakan peningkatan produksi, perdagangan internasional, distribusi, pemasaran dan harga domestik. Pemerintah menghendaki adanya pasokan dan harga beras yang stabil, tersedia sepanjang waktu, terdistribusi secara merata dan dengan harga yang terjangkau. Meskipun Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia dalam hal produksi beras, namun karena volume pasar beras dunia yang tipis menjadikan Indonesia rentan dalam menghadapi gejolak harga beras di pasar dunia. Jika terjadi peningkatan permintaan negara-negara pengkonsumsi beras terbesar di dunia, seperti Indonesia maka akan terjadi kenaikan harga beras di pasar dunia yang cukup signifikan.

Beras merupakan komoditas unik bagi Indonesia. Komoditas beras di perdesaan telah menjadi simbol status sosial-ekonomi rumah tangga. Rumah tangga yang menggunakan beras sebagai pangan pokok dipandang memiliki status sosial-ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan yang mengkonsumsi bahan pakok lainnya, seperti jagung dan umbi lokal. Kekurangan pasokan beras di perkotaan dapat menyebabkan efek *panic buyer* dan menimbulkan aksi borong pembeli yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik. Sebagian besar masyarakat masih tetap menghendaki adanya pasokan dan harga beras yang stabil, tersedia sepanjang waktu, terdistribusi secara merata, dan dengan harga terjangkau. Hal ini menunjukkan beras masih merupakan komoditas strategis secara politis.

Pengembangan agribisnis beras di Indonesia ke depan memiliki posisi strategis dilihat dari aspek ekonomi, sosial maupun politik. Posisi beras sebagai bahan pangan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sampai saat ini belum tergantikan (Suryana et al., 2009). Pengembangan sentra agribisnis perberasan merupakan suatu sistem, yang kinerjanya harus selalu diukur, baik secara internal maupun eksternal. Kinerja internal dianalisa berdasarkan kondisi dalam subsistem agribisnis dan kinerja eksternal dapat dianalisa berdasarkan output yang dihasilkan. Kinerja internal sistem agribisnis memiliki keterkaitan dengan pengembangan rantai pasokan, yang diawali dari kegiatan budidaya padi di lahan petani hingga kegiatan pemasarannya kepada para konsumen. Sistem pemasaran merupakan bagian yang penting dari mata rantai agribisnis beras sejak diproduksi oleh petani hingga sampai ke konsumen. Sistem pemasaran juga menentukan efisiensi pasar suatu tata niaga barang termasuk beras. Dalam sistem agribisnis ini, pasca panen padi merupakan salah satu subsistem mencakup kegiatan mulai dari panen sampai dengan menghasilkan beras dan hasil sampingannya. Penanganan pasca panen padi yang kurang baik akan mengakibatkan sedikitnya hasil produksi padi yang dihasilkan, hal ini akan berdampak bukan hanya pada petani, namun juga semua lembaga yang terkait dengan sistem rantai pasok perberasan.

Sejalan dengan hal itu, masalah utama yang banyak dihadapi dalam agribisnis beras di Indonesia antara lain: (1) dalam hal penanganan panen dan pascapanen padi, dimana masih tingginya tingkat kehilangan hasil atau susut serta masih rendahnya mutu gabah dan beras yang dihasilkan. Besarnya kehilangan hasil panen dan pasca panen akibat dari ketidak sempurnaan selama penanganan pasca panen pada tahun 1996 dilaporkan mencapai 20,51 persen (BPS, 1996). Sementara pada tahun 2007 angka ini turun menjadi 10,82 persen (BPS, 2008); dan (2) dalam hal rantai pasok yang panjang mulai dari level produsen, pelaku tataniaga, hingga konsumen.

Penanganan pascapanen padi merupakan upaya sangat strategis dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi. Penanganan pascapanen padi meliputi beberapa tahap kegiatan yaitu penentuan saat panen, pemanenan, penumpukan. Sementara itu, di lahan sawah, pengumpulan padi di tempat perontokan, penundaan perontokan, perontokan, pengangkutan gabah ke rumah petani, pengeringan gabah,

pengemasan dan penyimpanan gabah, penggilingan, pengemasan dan penyimpanan beras. Dari rangkaian kegiatan pascapanen tersebut, ada tiga kegiatan utama yang saling terkait satu sama lain dalam mencapai tujuan akhir yaitu mendapatkan beras giling yang mutu serta rendemennya tinggi, yaitu; (1) panen, (2) pengeringan dan (3) penggilingan (Sutrisno dan Raharjo, 2004). Meskipun usaha penggilingan beras semakin luas dan berkembang, namun tingkat rendemen giling dari tahun ke tahun mengalami penurunan secara kuantitatif. Pada akhir tahun 70-an, nilai rendemen giling rata-rata nasional mencapai 70 persen. Namun pada tahun 1985 turun menjadi 65 persen, dan turun lagi menjadi 63,2 persen pada tahun 1999. Pada tahun 2000, tingkat rendemen giling paling tinggi hanya 62 persen, bahkan sering dilaporkan bahwa kenyataan di lapangan masih di bawah 60 persen (Budiharti, dkk., 2006b).

Selain tingkat kehilangan hasil yang tinggi, tingkat kualitas beras yang dihasilkan oleh penggilingan padi yang ada di Indonesia, pada umumnya juga relatif masih rendah. Berbagai upaya untuk memperbaiki sistem penanganan pascapanen padi telah banyak dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau menekan kehilangan hasil, memperbaiki kualitas gabah dan beras, dan meningkatkan rendemen giling, kualitas hasil giling serta harga jual beras. Selain itu, meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada semakin meningkatnya permintaan konsumen akan beras berkualitas juga turut mendorong dilakukannya upaya-upaya yang mengarah pada penurunan tingkat kehilangan hasil dan perbaikan mutu beras. Oleh karena itu, agar konsumen mendapatkan jaminan mutu beras yang dibeli di pasaran maka dalam perdagangan beras harus diterapkan sistem standardisasi mutu beras. Di Indonesia, standar mutu beras ini diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) mutu beras giling (SNI 01-6128-2008). Untuk memperoleh sertifikat hasil uji, maka pengujian mutu beras harus dilakukan di laboratorium uji yang terakreditasi (Suismono, 2002).

Adapun rantai pasok beras dari produsen hingga konsumen oleh BPS (2015) digambarkan sebagai distribusi perdagangan yang menggambarkan rantai distribusi suatu barang mulai dari produsen hingga konsumen. Rantai ini mempunyai peran penting dalam sistem rantai pasok beras, karena selain merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen juga dapat memberikan nilai tambah pada

pelakunya. Rantai distribusi yang baik mampu menggerakkan suatu barang dari produsen ke konsumen dengan biaya yang serendah rendahnya dan mampu memberikan pembagian nilai tambah yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen akhir kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Pola distribusi barang kebutuhan masyarakat saat ini diduga masih banyak menghadapi masalah. Hal ini terlihat dari melambungnya harga barang kebutuhan masyarakat, serta kelangkaan barang tersebut di beberapa daerah. Selain itu, rasa kepuasan yang belum merata antara produsen, lembaga-lembaga tata niaga dan konsumen juga menjadi masalah dalam distribusi barang.

Berbagai regulasi ditetapkan untuk mengatur dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Indonesia. Bahan pangan pokok dan strategis harus tersedia dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu serta pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Sebagai komoditas pangan pokok utama di Indonesia, beras mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial-politik, sehingga terjadinya fluktuasi harga beras akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat konsumen. Meskipun produksi beras jauh lebih besar daripada kebutuhan dan secara bertahap harga beras telah turun, namun harga beras di masyarakat masih tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja rantai pasok beras mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan harga beras.

Pemerintah berkepentingan menetapkan regulasi untuk menciptakan tata niaga beras yang berkeadilan melalui Permendag Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras serta Permentan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras. Pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras di dalam Permendag 57 Tahun 2017 telah mempertimbangkan struktur biaya yang wajar dalam hal biaya produksi, distribusi, keuntungan seluruh pelaku serta biaya lainnya. Besaran HET yang telah ditentukan harus menjadi acuan seluruh pelaku usaha dalam pemasaran beras di tingkat eceran. Permendag Nomor

57 Tahun 2017 juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang menjual harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi.

Menurut Heizer dan Render (2001), rantai pasokan mencakup keseluruhan interaksi antara pemasok, perusahaan manufaktur, distributor dan konsumen. Interaksi berhubungan dengan transportasi, informasi penjadwalan, transfer kredit dan tunai, serta transfer bahan baku antara pihak-pihak yang terlibat. Sistem pemasaran/pasokan yang efektif dan efisien pada komoditas pangan sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh masyarakat konsumen dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi, agar pangan tersedia sepanjang waktu diseluruh wilayah. Penyediaan prasarana dan sarana distribusi pangan merupakan bagian dari fungsi fasilitasi pemerintah, yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek efektivitas distribusi pangan sekaligus aspek efisiensi secara ekonomi. Biaya distribusi atau pemasaran yang paling efisien harus menjadi acuan utama, agar tidak membebani produsen maupun konsumen secara berlebihan (Fuad, 2009). Pola rantai pasok komoditas beras dari produsen melibatkan berbagai kelembagaan pemasarannya di dalamnya, baik yang melalui mekanisme penyerapan gabah oleh BULOG maupun melalui mekanisme pasar komersial umum.

Berpijak dari uraian di atas, maka pada kajian ini beberapa permasalahan yang akan dicermati diantaranya yaitu: (1) Bagaimanakah kondisi terakhir tingkat rendemen dari komoditas gabah menjadi beras pada sentra produksi saat ini?, (2) Bagaimanakah kinerja rantai pasok gabah/beras mulai dari produsen hingga konsumen, baik dengan keterlibatan serap oleh BULOG maupun melalui rantai pasok pada sistem pemasaran komersial, dan (3) Bagaimanakah pembentukan harga gabah/beras dari setiap level kelembagaan pemasaran yang terlibat didalamnya?.

Kajian ini difokuskan pada aspek terkait rendemen gabah ke beras di sentra produksi, rantai pasok komoditas gabah/beras serta proses pembentukan harga pada berbagai level lembaga pemasaran yang terlibat didalamnya. Kajian ini dilakukan oleh Fakultas Teknologi Pertanian IPB yang bekerjasama dengan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian.

1.2. Tujuan dan Keluaran

Kajian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengkaji rendemen gabah ke beras,
- 2) Menganalisis rantai pasok komoditas gabah/beras antar waktu dan wilayah,
- 3) Menganalisis pembentukan harga beras pada setiap level kelembagaan rantai pasok beras yang berjalan.

Keluaran yang diharapkan dari kajian ini adalah:

- 1) Informasi dan hasil analisis mengenai rendemen gabah ke beras,
- 2) Informasi dan hasil analisis mengenai rantai pasok komoditas gabah/beras antar waktu dan wilayah,
- 3) Informasi dan hasil analisis mengenai pembentukan harga beras pada setiap level kelembagaan rantai pasok beras yang berjalan.

II. METODOLOGI

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Rendemen Komoditas Gabah/Beras

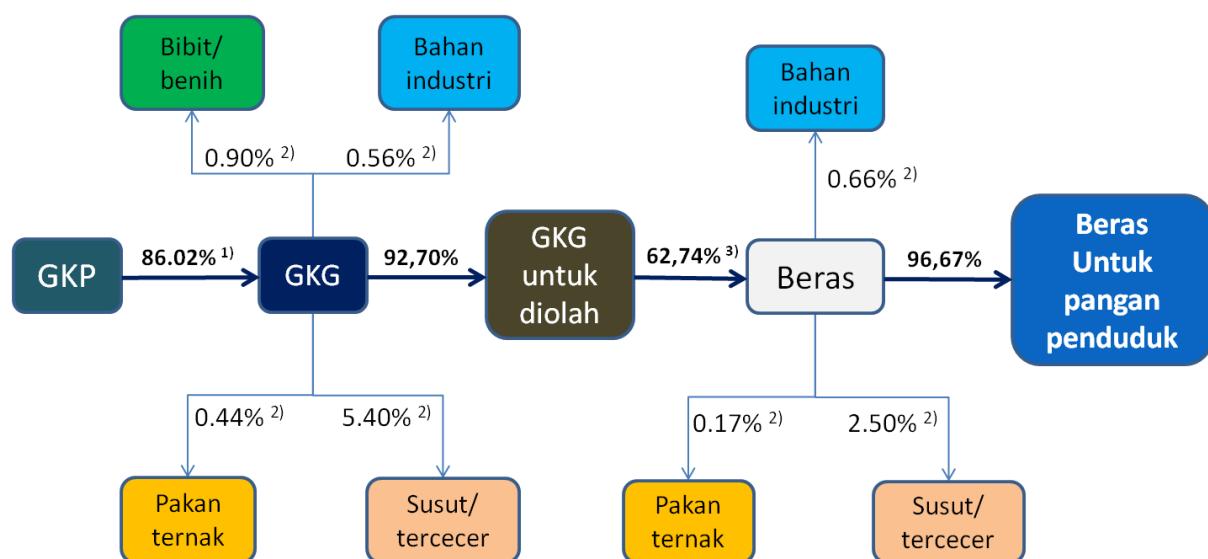
Pengertian Rendemen padi sendiri adalah persentase persentase berat hasil penggilingan terhadap berat gabah (GKG) yang digiling. Gabah atau padi siap giling haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan. Persyaratan rendemen gabah atau padi yang siap giling adalah Gabah Kering Giling (GKG). Salah satu kriteria GKG diantaranya adalah kadar air maksimal 14% dengan tujuan agar beras yang dihasilkan tidak belah dua. Biasanya rendemen padi atau gabah ini berkisar antar 60 - 65% tergantung kondisi alam, varietas yang ditanam, serta cara panen dan penanganan pasca panen. Saat ini, angka konversi GKG menjadi beras yang sering disebut juga angka rendemen penggilingan lapangan merupakan angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan hasil kajian PSEKP (2017) bahwa produksi gabah yang dihasilkan secara nasional dari Gabah Kering Panen (GKP) hingga GKG (Gabah Kering Giling) mengalami penyusutan/penurunan maupun akibat menurunnya kadar air misalnya dengan dilakukannya penjemuran (proses oven), dimana persentase GKP berubah menjadi GKG sekitar 86,02%. Sesuai Permentan No.3 tahun 2017, dimana untuk GKP kadar airnya dapat berkisar antara 19-25%, dan untuk GKG kadar airnya maksimum 14% (BKP Kementeran, 2017).

Selanjutnya perubahan dari GKP hingga GKG untuk diolah menjadi beras, mengalami penyusutan/pengurangan baik karena penggunaan maupun akibat susut/tercecer, dengan rincian persentase yaitu (BPS, 2017): (1) Digunakan lagi untuk benih/bibit sebesar 0,9%; (2) Digunakan sebagai bahan industri sebesar 0,56%; (3) Digunakan sebagai pakan ternak sebesar 0,44%; dan (4) Susut/tercecer sebesar 5,4%. Untuk Gabah Kering Giling (GKG) yang siap diolah kemudian di proses (digiling) menjadi beras rata-rata persentasenya sekitar 62,74%. Selanjutnya beras yang sudah diperoleh, tidak seluruhnya digunakan untuk konsumsi pangan, tetapi terdapat penggunaan lain serta tercecer/susut. Adapun proporsinya adalah: (1) Untuk pangan penduduk (konsumsi) sebesar 96,67%; (2) Untuk Bahan baku

industri sebesar 0,66%; (3) Untuk pakan ternak sebesar 0,17%; dan (4) Susut/tercecer sebesar 2,50%.

Berdasarkan uraian diatas, bila dicermati secara mendalam persentase gabah hasil panen hingga beras untuk konsumsi pangan, yaitu: (1) Dari GKP hingga beras untuk konsumsi pangan sebesar 48,36% (diperoleh dari: $86,02\% \times 92,70\% \times 62,74\% \times 96,67\%$); dan (2) Dari GKG hingga beras untuk konsumsi pangan sebesar 56,22% (diperoleh dari: $92,70\% \times 62,74\% \times 96,67\%$). Perlu diketahui bahwa angka proporsi ini merupakan proporsi dari GKG hingga beras untuk pangan penduduk, dan telah dikurangi oleh proporsi untuk bahan industri, untuk pakan ternak dan susut/tercecer.



Gambar 2.1. Alur Gabah Menjadi Beras dengan komponen penggunaannya di Indonesia (BPS, 2017).

2.1.2. Rantai Pasok Komoditas Gabah/Beras

Rantai pasok untuk produk pertanian cukup kompleks. Sistem logistik produk pertanian memiliki karakteristik tertentu dan memerlukan penanganan khusus dan berbeda, karena dipengaruhi oleh sistem produksi, sifat produk, cara panen dan penanganan pasca panen, dan karakteristik konsumen itu sendiri. Rantai pasok pertanian di Indonesia melibatkan banyak pelaku, mulai dari petani, pelaku taniaga sampai ke konsumen. Namun karena kurangnya sistem usaha yang dilakukan secara kolektif langsung dari para petani kecil, sehingga banyak pelaku

dan transaksi yang harus dilalui terlebih dahulu, hal ini akhirnya berdampak pada harga hasil pertanian yang tinggi (Perdana, 2014).

Rantai pasok (*supply chain*) disusun oleh sejumlah entitas yang saling berinteraksi melalui pola interaksi yang khas sesuai dengan struktur yang terbentuk. Semakin banyak jumlah entitas yang terlibat dalam rantai pasok maka dapat berpengaruh pada struktur yang terbentuk dan menentukan kompleksitas sebuah rantai pasok. Entitas-entitas tersebut saling berinteraksi guna mencapai tujuan bersama, yaitu konsumen akhir (Mahbubi, 2013). Menurut Zhou dan Benton (2007), sebuah rantai pasok (*supply chain*) merupakan sistem terintegrasi. Sebagai sebuah sistem, sudut pandang analisis terhadap rantai pasok (*supply chain*) harus menyeluruh. Seluruh komponen sistem harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketimpangan pada salah satu komponen dapat menganggu sistem secara keseluruhan.

Sistem pemasaran merupakan bagian yang penting dari mata rantai barang sejak diproduksi sampai ke konsumen. Sistem pemasaran juga menentukan efisiensi pasar suatu tata niaga barang termasuk pangan. Dalam sistem agribisnis padi/beras, sub sistem pasca panen merupakan salah satu subsistem mencakup kegiatan mulai dari panen sampai dengan menghasilkan beras dan hasil sampingannya.

Menurut Perdana (2014) bahwa permasalahan yang masih dihadapi terkait rantai pasok komoditas pertanian diantaranya adalah: masih kurangnya koordinasi dalam hal pengambilan produk antara produsen dan pelaku pasar, jarak yang jauh dan rute dari tempat hasil pertanian (umumnya daerah) menuju ke kota, kendala dalam hal *handling, staging, dan storage*, masalah proses pendinginan pada saat pascapanen, serta masalah *packaging, tracking, dan inventory control*.

Khol dan Uhl (2002) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu aktivitas bisnis yang didalamnya terdapat aliran barang dan jasa dari titik produksi sampai ke titik konsumen. Produksi adalah penciptaan nilai guna atau kepuasan, proses membuat kegunaan barang dan jasa. Kepuasan dibentuk dari proses produktif yang diklasifikasikan menjadi kegunaan bentuk, tempat, waktu dan kepemilikan. Selain itu, pemasaran hasil pertanian juga dapat didefinisikan adalah

semua aktivitas perdagangan yang meliputi aliran barang-barang dan jasa-jasa secara fisik dari pusat produksi pertanian ke pusat konsumsi pertanian.

Secara teoritis perdagangan wilayah terjadi karena adanya perbedaan tingkat *supply* dan *demand* di masing-masing wilayah. Apabila diasumsikan bahwa pasar komoditas pertanian adalah kompetitif, maka produsen akan menjual ke pasar pembeli di suatu wilayah yang memberikan keuntungan terbesar. *Market border* akan terbentuk apabila $(P_a - T_a) = (P_b - T_b)$, dimana P_a = harga di wilayah a; T_a = biaya transportasi dari lokasi produsen ke pasar a; P_b = harga di wilayah b; T_b = biaya transportasi dari lokasi produsen ke pasar b.

Aliran barang terjadi dari daerah yang harganya lebih rendah ke daerah yang harganya lebih tinggi bila terjadi selisih harga lebih besar dari biaya transportasi. Keterkaitan harga antara produsen dan konsumen (*vertical market*) juga dapat digunakan untuk melihat sampai sejauh mana pasar di suatu wilayah saling mempengaruhi dengan pasar di wilayah lain. Tidak adanya keterkaitan menunjukkan bahwa pasar tersebut tidak berhubungan atau diperkirakan arus barang tidak akan terjadi, sedangkan keterkaitan yang kuat menunjukkan adanya keterkaitan arus barang antara kedua wilayah tersebut.

Adanya sistem rantai pasokan yang memadai diharapkan ketersediaan pangan di suatu wilayah dapat di penuhi. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Hasil penelitian Mayrowani *et al.*, (2003) mengungkapkan bahwa perdagangan/pemasaran hasil pertanian masih merupakan masalah pokok dalam pengembangan ekonomi produk pertanian. Dengan berkembangnya sistem perdagangan, bukan hanya mampu mendorong pertumbuhan produksi pertanian dan pendapatan petani tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dan meningkatkan kesempatan kerja pedesaan. Kurang berfungsinya fungsi-fungsi pemasaran dapat mengakibatkan performa ekonomi produk pertanian, seperti harga dan biaya pemasaran tidak seperti yang diharapkan.

Salah satu komoditas pertanian strategis yang melibatkan banyak pelaku tataniaga adalah komoditas gabah/beras. Komoditas beras sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, utamanya bagi rakyat Indonesia, sehingga berbagai

permasalahan yang terkait dengan kedua komoditi ini rawan sekali dipolitisir. Pengalaman dibanyak negara termasuk Indonesia, krisis pangan dapat menjatuhkan pemerintah yang sedang berkuasa (Jamal, *et.al.*, 2006). Sehingga pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap komoditi beras ini. Pasar komoditas pertanian khususnya pangan yang semakin mengarah pada pasar bebas membawa konsekuensi pada harga pangan khususnya beras di pasar domestik yang makin terbuka terhadap gejolak pasar. Harga beras di pasar dunia dengan mudah secara langsung dapat tertransmisikan ke harga beras domestik. Oleh karena itu, dinamika harga beras domestik tidak terlepas dari kebijakan perdagangan, pasar beras dunia, stabilisasi harga, kelancaran distribusi, produksi beras domestik dan fluktuasi nilai tukar (Simatupang dan Syafaat, 1999). Dengan demikian akumulasi perubahan berbagai aspek tersebut secara simultan dapat mempengaruhi dinamika harga beras domestik.

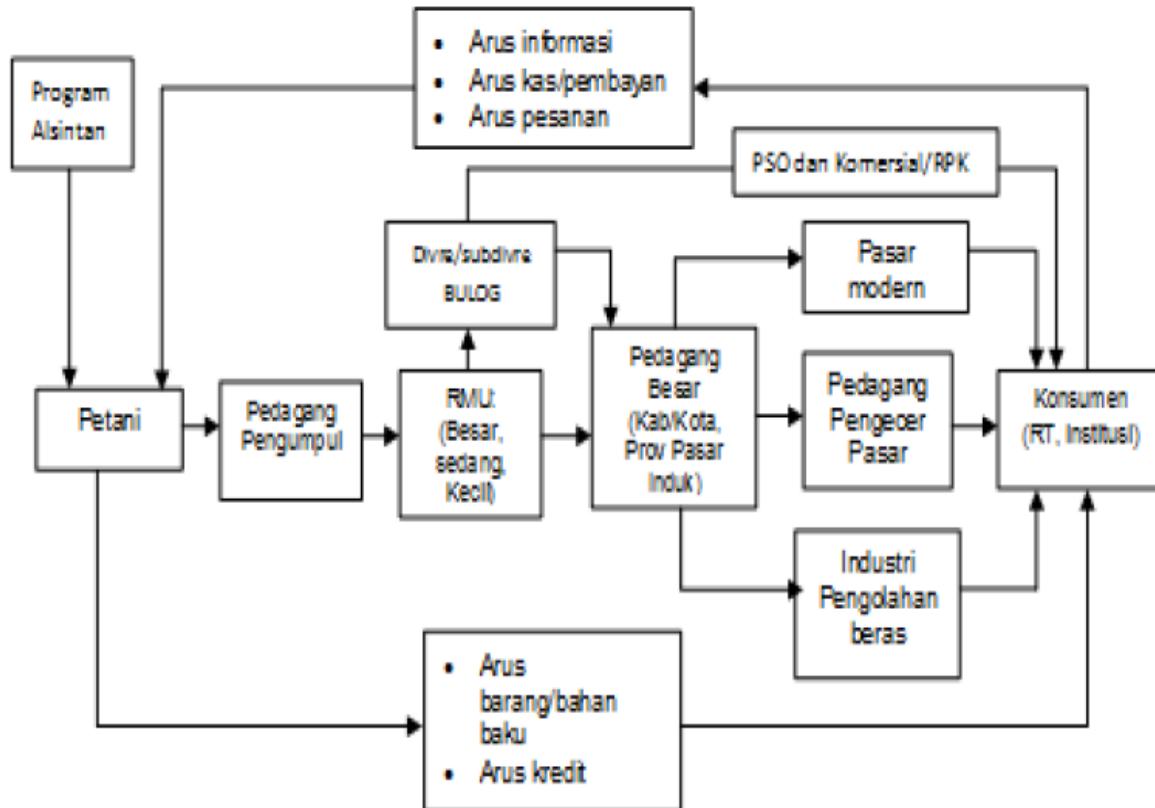
Senada dengan hal diatas, menurut hasil kajian Rachman dan Dermorejo (2001) bahwa harga komoditas pangan di pasar dunia secara cepat dan kuat mempengaruhi harga di pasar domestik. Kuatnya pengaruh harga dunia terhadap harga domestik untuk komoditas pertanian khususnya komoditas beras tercermin dari nilai transmisi harga yang relatif tinggi (0,70). Artinya perubahan harga beras di pasar dunia sebesar 1 persen akan diikuti perubahan harga sebesar 0,7% di pasar domestik.

Persoalan klasik yang kerap muncul terkait komoditas beras ini adalah terdapatnya dua tujuan yang ingin dicapai sekaligus oleh pemerintah, dan terkadang keduanya justru saling bertolak belakang, yaitu disatu sisi pemerintah ingin mempertahankan harga yang baik bagi produsen/petani, tapi disisi lain ingin tidak memberatkan harga bagi konsumen. Persoalannya bertambah pelik karena komoditas padi ditanam serentak pada musim tertentu, sehingga berlebihnya pasokan pada saat panen dan langkanya pasokan disaat paceklik menjadi suatu fenomena rutin setiap tahunnya. Sistem distribusi yang tidak lancar dari pusat produksi ke pusat konsumsi, menyebabkan pasokan (*supply*) melimpah disatu wilayah. Sementara pada wilayah lainnya yang relatif kurang pasokannya akan mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhannya.

Dengan menyikapi permasalahan yang ada maka dipandang perlu untuk melakukan kajian distribusi perdagangan komoditi pangan khususnya gabah/beras antar wilayah pada beberapa lokasi di Indonesia. Pada tahun 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan Survei Pola Distribusi Perdagangan beberapa Komoditi, namun lebih ke arah gambaran umum saja yang tidak melakukan analisis secara mendalam. Kegiatan kajian yang dilakukan ini sangat penting, mengingat hasilnya bisa digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan: (1) gambaran pola distribusi perdagangan gabah/beras dalam negeri, (2) Kelembagaan yang terlibat dalam perdagangan, (3) Dinamika dan disparitas harga komoditas gabah/beras antar waktu dan wilayah, (4) Kendala dan hambatan perdagangan gabah/beras antar wilayah dan waktu, (5) Sebaran marjin pemasaran serta efisiensi pemasaran/perdagangan komoditas gabah/beras menurut kelembagaan yang terlibat dalam perdagangan/pemasaran maupun antar wilayah, dan (6) Rumusan kebijakan sistem terkait pola distribusi perdagangan antar wilayah yang lebih efisien.

Pada dasarnya harga adalah salah satu aspek yang penting dalam perdagangan hasil pertanian. Harga adalah insentif yang diterima oleh pelaku perdagangan (termasuk petani) dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Namun harga yang terjadi seringkali tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan kontribusi dari setiap pelaku ekonomi. Secara faktual harga sendiri sangat sulit untuk diramalkan secara pasti. Berbagai faktor yang sangat mempengaruhi harga antara lain adalah permintaan dan penawaran, serta kondisi dan struktur tata niaga yang terjadi saat ini.

Pada analisis ini dapat dilihat alur rantai pasok mulai dari produsen hingga konsumen akhir yang melibatkan berbagai kelembagaan pasar didalamnya. Adapun gambaran rantai pasok komoditas gabah/beras seperti disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Rantai Pasok Agribisnis dari Tingkat Petani Hingga Konsumen.

2.1.3. Peran dan Kelembagaan Pemasaran/Perdagangan Komoditas Pertanian

Limbong dan Sitorus (1992) juga mendefinisikan bahwa pemasaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terjadi dalam proses mengalirkan barang dan jasa dari sentra produksi ke sentra konsumsi guna memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan bagi konsumen serta memberikan keuntungan bagi produsen. Konsep ini menunjukkan bahwa peranan pemasaran sangat penting dalam rangka meningkatkan nilai guna bentuk, nilai guna waktu, nilai guna tempat dan nilai guna hak milik dari suatu barang dan jasa secara umum dan juga pada komoditas pertanian.

Peranan pemasaran dalam bidang pertanian terasa semakin penting karena adanya sifat unik dari komoditas tersebut seperti mudah busuk, mudah rusak, *voluminous*, produksinya bersifat musiman sementara konsumsi terjadi sepanjang tahun. Sifat-sifat unik ini menuntut adanya suatu perlakuan khusus berupa pengangkutan yang hati-hati, pengepakan yang baku dan baik, penyimpanan

dengan suhu tertentu, pengeringan dan berbagai metode pengawetan lain sehingga komoditas dimaksud dapat digunakan sepanjang waktu. Lamanya jarak antara awal produksi dengan masa menghasilkan (panen) juga menjadi salah satu faktor yang membuat komoditas pertanian menjadi unik. Sementara itu, di sisi lain para konsumen menghendaki komoditas tersedia dekat dengan tempat mereka, dapat diperoleh sepanjang waktu dan dapat dikonsumsi dalam bentuk segar dan sesuai kualitas produk yang diinginkan. Di pihak lain produsen menginginkan keuntungan yang maksimum guna menjamin kelangsungan dan pengembangan usahanya. Dua keinginan yang berbeda ini akan dapat dipenuhi dengan adanya suatu sistem pemasaran yang baik dan efisien.

Pada pemasaran komoditas pertanian terdapat beberapa pihak selain produsen dan konsumen, yaitu para lembaga-lembaga tataniaga yang menghubungkan sentra produksi dan sentra konsumsi dengan melakukan berbagai aktivitas yang memberikan nilai guna bagi produk yang dipasarkan. Jumlah dan jenis lembaga tataniaga tersebut secara horizontal dan vertikal sangat dipengaruhi oleh jenis komoditas yang dipasarkan, fasilitas pemasaran yang tersedia dan keinginan pasar sasaran (konsumen) yang hendak dicapai. Semakin banyak dan kompleks permintaan konsumen dan semakin banyak perubahan bentuk dari komoditas yang dipasarkan sebelum sampai di tangan konsumen, maka semakin banyak pula menuntut kehadiran para lembaga tataniaga. Untuk pasar internasional, sudah jelas membutuhkan lembaga tataniaga yang lebih banyak dan rantai pemasaran yang lebih panjang daripada di pasar domestik.

Adapun untuk kelembagaan pemasaran merupakan salah satu bentuk institusi ekonomi. Menurut Granovetter dan Swedberg (1992) institusi ekonomi dikonstruksikan secara sosial, institusi ini merupakan hasil dari kreasi sosial yang terjadi secara perlahan. Pemahaman ini mengacu kepada pendapat Berger dan Bechman (1966) bahwa kelembagaan ekonomi itu dapat mencakup aspek *pelaku* yang mengkontruksi kelembagaan ekonomi sekaligus dengan status dan perannya, dan *aturan main* yang dikonstruksi oleh pelaku. Dalam konteks pemasaran tersebut terdapat beberapa pelaku yang terlibat didalamnya, yaitu melibatkan petani sebagai penjual hasil pertaniannya dan pedagang pada berbagai tingkatannya. Sementara, aturan main dibangun oleh para pelaku yang bertransaksi, serta peran dari para

pelaku pemasaran dalam membangun aturan main tersebut. Kemungkinan yang terjadi adalah adanya pelaku pemasaran yang dominan perannya dalam menentukan aturan main (asimetris), namun tidak tertutup kemungkinan bahwa aturan main akan dibangun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tertentu, karena posisi dan peran masing-masing pelaku pemasaran relatif sama (simetris). Posisi dan peran itu sendiri dapat ditentukan oleh aktivitas pelaku, asset dan akses yang dimiliki pelaku pemasaran (Creswell, J.W, 1994);

Karakteristik kelembagaan pemasaran komoditas pertanian dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi. Selanjutnya, keputusan-keputusan ini menghasilkan kinerja pemasaran tertentu. Salah satu pendekatan yang dikembangkan oleh ekonomi kelembagaan adalah bahwa kelembagaan memandang perilaku sebagai bagian dari rangkaian Struktur-Perilaku-Kinerja (*Structure-Conduct-Performance*). Struktur dianggap akan menentukan pola perilaku dan pola perilaku akan mempengaruhi kinerja serta pada akhirnya kinerja akan mempengaruhi kondisi struktur kelembagaan ekonomi yang bersangkutan (Schmid, 1987). Analisis terhadap keragaan pasar dapat dilakukan melalui analisis perkembangan harga, marjin pemasaran dan penyebarannya, dan korelasi harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen.

Suatu sistem pemasaran komoditas pertanian yang efisien itu harus memenuhi dua syarat yaitu: (1) Mampu menyampaikan hasil pertanian dari produsen kepada konsumen dengan biaya yang semurah-murahnya; dan (2) Mampu mengadakan pembagian balas jasa yang adil dari keseluruhan harga konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan pemasaran komoditas pertanian tersebut. Pembagian yang adil dalam konteks tersebut adalah pembagian balas jasa fungsi-fungsi pemasaran sesuai kontribusi masing-masing kelembagaan pemasaran yang berperan (Mubyarto, 1989). Adapun kajian mengenai kompleksitas sistem pemasaran dan masalah-masalahnya dapat menimbulkan kebingungan tanpa sebuah sistem atau organisasi yang mengarahkan penelitian tersebut, apa yang menjadi dasar pemikirannya dan apa latar belakangnya. Beberapa pendekatan tersebut pada dasarnya adalah pendekatan deskriptif, yang berusaha untuk mengevaluasi sistem pemasaran yang telah ada dan memberi saran perbaikannya (Kohl dan Uhl, 1990).

Selain itu, kelembagaan pemasaran juga merupakan organisasi bisnis yang membangun kegiatan proses pemasaran. Dalam pendekatan ini elemen “manusianya” mendapatkan penekanan. Pendekatan institusional dapat membantu untuk memahami mengapa ada perantara dalam pemasaran. Pendekatan fungsional dan institusional sangat berguna untuk menganalisis keberadaan aktivitas pemasaran. Dalam konteks pemasaran, terdapat 5 jenis struktur pasar untuk sistem pemasaran pertanian, seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jenis-jenis Struktur Pasar Berdasarkan Jumlah Perusahaan dan Sifat Produk

Karakteristik		Struktur Pasar	
Jumlah Perusahaan	Sifat produk	Dari sudut penjual	Dari sudut pembeli
Banyak	Standar/homogen	Persaingan murni	Persaingan murni
Banyak	Diferensiasi	Pers.monopolistic	Persaingan monopsonistic
Sedikit	Standar	Oligopoli murni	Oligopsoni murni
Sedikit	Diferensiasi	Oligopoli diferensiasi	Oligopsoni diferensiasi
Satu	Unik	Monopoli	Monopsoni

Sumber: Dahl dan Hammond, 1977

2.1.4. Tujuan dan Kegunaan Penting Pemasaran

Tujuan pemasaran adalah mencari keuntungan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga dapat memuaskan konsumen itu sendiri. Kepuasan konsumen tercapai apabila produk berkualitas dan memenuhi kebutuhan konsumen, harga dapat yang terjangkau oleh konsumen, pelayanan kepada konsumen memuaskan, dan citra produk baik dari sudut pandang konsumen. Kegiatan yang paling utama pemasaran dalam hal memenuhi kepuasan konsumen adalah dengan memperhatikan produk, harga, distribusi dan promosi (Kohl dan Uhl, 1990). Keempat instrumen pemasaran tersebut dikenal dengan istilah bauran pemasaran seperti berikut:

1. **Produk (*product*):** Keragaman produk, kualitas, design, ciri, nama merek, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, imbalan
2. **Harga (*price*):** daftar harga, rabat/diskon, potongan harga khusus, periode pembayaran, syarat kredit
3. **Tempat (*place*):** saluran pemasaran, cakupan pasar, pengelompokkan, lokasi, persediaan, transportasi

4. **Promosi (*promotion*):** promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, kehumasan/ *public relation*, pemasaran langsung.

Apabila kepuasan konsumen tersebut terpenuhi, maka hasil penjualan produk dapat terus meningkat, dan akhirnya tujuan pemasaran dapat tercapai, yaitu perolehan laba. Sebaliknya, apabila kebutuhan konsumen diabaikan dan hanya berfikir dari sudut pandang produsen saja, kemungkinan hasil penjualan produk akan menurun, sehingga laba yang diperoleh minim, bahkan dapat terjadi kerugian.

Pemasaran merupakan kegiatan produktif karena menciptakan kegunaan (*utility*), yaitu proses menciptakan barang dan jasa menjadi lebih berguna. Terdapat 4 Empat jenis kegunaan yang dilakukan pemasaran:

- (1) Kegunaan bentuk (*form utility*): biasanya mengubah bentuk bahan mentah dan menciptakan sesuatu yang baru (mengubah bentuk sesuai keinginan konsumen).
- (2) Kegunaan tempat (*place utility*): produk tersedia di suatu tempat yang masyarakatnya menginginkan barang tersebut (pendistribusian produk).
- (3) Kegunaan waktu (*time utility*): produk tersedia pada saat yang diinginkan/dibutuhkan.
- (4) Kegunaan milik (*possession utility*): barang ditransfer/ditempatkan atas kontrol dari seseorang yang menginginkan (perpindahan kepemilikan suatu produk dari produsen kepada konsumen).

2.1.5. Marjin Pemasaran

Marjin Pemasaran didefinisikan sebagai perbedaan harga atau selisih harga yang dibayar konsumen dengan harga yang diterima petani produsen atau dapat pula dinyatakan sebagai nilai dari jasa-jasa pelaksanaan kegiatan pemasaran sejak dari tingkat produsen sampai ke titik konsumen akhir. Kegiatan untuk memindahkan barang dari titik produsen ke titik konsumen membutuhkan pengeluaran baik fisik maupun materi. Pengeluaran yang harus dilakukan untuk menyalurkan komoditas dari produsen ke konsumen disebut biaya pemasaran.

Dahl dan Hammond (1977) menyatakan bahwa marjin Pemasaran menggambarkan perbedaan harga di tingkat konsumen (Pr) dengan harga di tingkat produsen (Pf). Setiap lembaga pemasaran melakukan fungsi-fungsi

pemasaran yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaan harga jual dari lembaga tataniaga yang satu dengan yang lainnya sampai ke tingkat konsumen akhir. Semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat semakin besar perbedaan harga antar produsen dengan harga di tingkat konsumen. Secara grafis marjin Pemasaran dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Marjin pemasaran pada suatu saluran pemasaran tertentu dapat dinyatakan sebagai jumlah dari marjin pada masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat. Rendahnya biaya pemasaran suatu komoditas belum tentu mencerminkan efisiensi yang tinggi. Salah satu indikator yang berguna dalam melihat efisiensi kegiatan pemasaran adalah dengan membandingkan persentase atau bagian harga yang diterima petani (*farmer's share*) terhadap harga yang dibayar konsumen akhir.

Tingkat efisiensi pemasaran juga dapat diukur melalui besarnya rasio keuntungan terhadap biaya pemasaran. Rasio keuntungan terhadap biaya pemasaran didefinisikan sebagai besarnya keuntungan yang diterima atas biaya pemasaran yang dikeluarkan. Semakin meratanya penyebaran rasio keuntungan terhadap biaya maka dari segi operasional sistem pemasaran akan semakin efisien (Limbong dan Sitorus, 1987).

2.1.6. Pembentukan Harga Beras Pada Setiap Level kelembagaan Pemasaran

Pada perdagangan atau pemasaran hasil pertanian masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi seperti: masih pada lemahnya kelembagaan pemasaran, harga yang tidak stabil dan kurang efisiennya proses pembentukan harga sehingga keuntungan yang diterima tidak sesuai dengan kontribusi dari pelaku usaha, dalam hal ini petani. Kurangnya modal dan kebutuhan jaringan pasar juga menyebabkan petani tergantung pada pedagang dalam memasarkan produk pertaniannya. Beberapa hasil studi mengemukakan bahwa pedagang telah mengeksploitasi petani dengan praktik monopsoni terutama dalam penentuan harga (Ruttan, 1969; Mears *et.al.*, 1974). Namun dalam beberapa studi (Hayami, 1987; Kono, 2000; Nonaka, 2001) tidak menemukan bahwa pedagang melakukan monopsoni untuk mengeksploitasi petani dan sistem perdagangan

hampir mencapai persaingan sempurna (*perfect competition*). Dalam konteks meningkatkan efisiensi, baik ekonomi maupun sosial, sebaiknya pemerintah melakukan intervensi melalui pengawasan harga dan biaya pemasaran. Peningkatan efisiensi ini dapat dilakukan salah satunya dengan mengurangi biaya transportasi dengan investasi pada perbaikan jalan dan pembentukan asosiasi pedagang produk pertanian.

Namun menurut teori harga Samoelson (2004), bahwa harga sangat dipengaruhi oleh tarik menarik antara permintaan dan penawaran jika pasar menggunakan sistem persaingan sempurna. Beberapa variabel pembentuk harga beras adalah: biaya produksi dan distribusi, biaya penyimpangan, bunga pinjaman bank, biaya pemasaran dan lain-lain. Pada aspek biaya produksi, seluruh biaya yang dikeluarkan petani sebagai produsen untuk memproduksi gabah dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan dan mengolah beras semakin tinggi.

Nicholson (2004) juga mengungkapkan bahwa struktur pasar ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu (i) jumlah perusahaan/agen/penjual yang beroperasi di pasar tersebut; (ii) ada tidaknya hambatan bagi perusahaan/agen/penjual untuk masuk dan keluar dari pasar; dan (iii) karakteristik dari komoditas yang diperdagangkan. Struktur pasar tersebut berpengaruh terhadap kekuatan dari para agen/penjual di dalamnya untuk mempengaruhi harga pasar. Secara teoritis, struktur pasar dapat berbentuk pasar monopoli, duopoli, oligopoli, persaingan monopolistik (*monopolistic competition*), dan persaingan sempurna (*perfect competition*). Pada kondisi pasar persaingan sempurna terlihat di level petani pada saat panen raya. Homogenitas dan melimpahnya komoditas pertanian yang akan dijual membuat petani tidak mempunyai *bargaining position* untuk mempengaruhi harga dan pasrah sebagai *price taker*. Sebaliknya untuk level pedagang pengumpul/tengkulak yang jumlahnya relatif sedikit cenderung membentuk pasar oligopoli sehingga mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga. Seringkali para pedagang pengumpul/tengkulak tersebut membentuk sebuah kartel yang dapat membuat kesepakatan dan membentuk harga pasar.

Harga yang terbentuk untuk suatu komoditas merupakan hasil interaksi antara penjual dan pembeli. Harga yang terjadi sangat dipengaruhi oleh kuantitas barang

yang ditransaksikan. Dari sisi pembeli (*demand*) semakin banyak barang yang ingin dibeli akan berpengaruh meningkatkan harga, sementara dari sisi penjual (*supply*) semakin banyak barang yang akan dijual akan menurunkan harga. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku permintaan maupun penawaran dalam interaksi pembentukan harga. Namun untuk komoditas pangan/pertanian, pembentukan harga tersebut disinyalir lebih dipengaruhi oleh sisi penawaran (*supply shock*) karena sisi permintaan cenderung stabil sepanjang waktu mengikuti perkembangan pola trennya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sisi penawaran komoditas pangan/pertanian cenderung sulit untuk dikontrol. Studi empiris yang dilakukan oleh Deaton dan Laroque (1992), Chambers dan Bailey (1996) dan Tomek (2000) menyimpulkan dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan harga komoditas pangan/pertanian, yakni faktor produksi/panen (*harvest disturbance*) dan perilaku penyimpanan (*storage/inventory behavior*). Walaupun keberhasilan panen sangat dipengaruhi oleh kondisi musim/cuaca yang sifatnya tidak terkontrol (*uncontrollable*), pengaruh pola tanam terhadap perkembangan harga komoditas pertanian di Amerika Serikat terlihat sangat dominan. Terdapat pola cyclical yang sistematis antara pola tanam dan variance harga komoditas. Variance harga membesar pada saat musim tanam dan mengecil pada saat musim panen. Sementara keberadaan teknologi penyimpanan atas produk pertanian, khususnya untuk produk yang mudah busuk/basi (*durable products*), akan mengurangi tekanan fluktiasi harga dari komoditas tersebut. Tekanan sisi permintaan juga berpotensi meningkatkan harga komoditas pertanian walaupun derajatnya relatif rendah dibanding tekanan dari sisi penawaran. Sumber utama peningkatan permintaan komoditas pangan adalah peningkatan jumlah dan sebaran penduduk dan pendapatan (Tomek, 2000).

Machmud (2005) menjelaskan bahwa harga beras memiliki keunikan dalam proses penentuannya sehingga perlu kehati-hatian dalam menentukan harganya. Keunikan tersebut antara lain beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan petani perlu adanya kenaikan harga beras, namun jika harga beras tinggi penduduk miskin akan meningkat. Keunikan yang lain meskipun pemerintah telah menaikkan harga dasar penjualan padi tetap saja petani akan miskin. Sihono (2007) menyimpulkan dalam penelitiannya tentang

“Deferensiasi Harga Beras di Indonesia Pasca Krisis Ekonomi”, menyebutkan bahwa persediaan beras di tingkat pengepul (penebas) sangat mempengaruhi harga beras pada tingkat daerah, sedangkan musim juga berpengaruh signifikan terhadap harga beras karena jika musim kemarau hasil beras akan lebih baik jika dibandingkan pada musim penghujan.

2.2. Lokasi dan Responden Kajian

Kajian ini dilakukan di sentra produksi padi/beras nasional yaitu di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan kuesioner terstruktur terhadap responden petani/kelompok tani, RMU/penggilingan padi, pedagang pengumpul gabah/beras, pedagang besar/agen/supplier gabah/beras, pedagang antar pulau, dan pedagang beras di pasar lokasi kajian (eceran dan non eceran). Sementara untuk data sekunder dikumpulkan dari berbagai dinas/instansi terkait seperti Dinas Pertanian, BPS dan literatur yang relevan dengan penelitian.

2.3. Metoda Analisis

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk analisis kuantitatif dilakukan yaitu berupa analisis usahatani, analisis saluran dan efisiensi pemasaran, serta marjin pemasaran dari setiap kelembagaan pemasaran yang terlibat didalamnya. Adapun analisis kualitatif diperlukan untuk mendukung deskripsi dan penjelasan atas berbagai analisis yang dilakukan.

Untuk analisis marjin pemasaran, dalam konteks ini merupakan perbedaan harga yang diterima oleh petani dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Untuk menganalisis marjin pemasaran dalam penelitian ini, data harga yang digunakan adalah harga di tingkat petani dan harga di tingkat lembaga pemasaran, sehingga dalam perhitungan marjin pemasaran digunakan rumus:

$$Mmp = Pr - Pf \rightarrow \text{rumus marjin pemasaran di tingkat petani}$$

$$Mmlp = Ps - Pb \rightarrow \text{rumus marjin pemasaran pada setiap tingkat kelembagaan pemasaran}$$

dimana:

Mmp = marjin pemasaran di tingkat petani

Mmlp = marjin pemasaran di tingkat lembaga pemasaran

Pr = harga di tingkat kelembagaan pemasaran tujuan pemasaran petani

Pf = harga di tingkat petani

Ps = harga jual pada setiap tingkat lembaga pemasaran

Pb = harga beli pada setiap tingkat lembaga pemasaran

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa beberapa variabel pembentuk harga beras adalah; biaya produksi dan distribusi, biaya penyimpangan, bunga pinjaman bank, biaya pemasaran dan lain-lain.Pada aspek biaya produksi, seluruh biaya yang dikeluarkan petani sebagai produsen untuk memproduksi gabah dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan dan mengolah beras semakin tinggi.Analisis pembentukan harga dapat dilakukan di sentra produsen dan konsumen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Provinsi Jawa Timur

3.1.1. Kinerja Produksi dan Rendemen Gabah Ke Beras

Produksi gabah di Jawa Timur mengalami kenaikan signifikan yaitu sekitar 2,99%/tahun dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari 12,20 juta ton tahun 2012 meningkat menjadi 13,63 juta ton (2016). Bila data produksi gabah tersebut dikonversi setara beras dengan rendemen GKG ke beras sekitar 62,74% (BPS, 2017) maka akan diperoleh produksi beras di Jawa Timur sekitar sekitar 7,6 juta ton tahun 2012 dan 8,55 juta ton tahun 2016 dan sekitar 8,23 juta ton tahun 2017. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (2018), bahwa rendemen GKG ke Beras di Jawa Timur berkisar dari 62-65%. Bahkan di Jawa Timur rendemennya selalu hampir 65%. Dengan demikian, produksi beras di Jawa Timur meningkat lagi dari sekitar 8,86 juta ton pada tahun 2016 dan sekitar 8,53 juta ton tahun 2017 (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Perkembangan Produksi Gabah dan Beras di Provinsi Jawa Timur, 2012-2017

Tahun	Produksi Gabah GKG (Ton)	Setara Beras (Ton) ¹⁾	Setara Beras (Ton) ²⁾
2012	12.198.707	7.653.469	7.929.160
2013	12.049.342	7.559.757	7.832.072
2014	12.397.049	7.777.909	8.058.082
2015	13.154.967	8.253.426	8.550.729
2016	13.633.701	8.553.784	8.861.906
2017	13.125.414	8.234.885	8.531.519
r (%/tahun)	2,27	-	-

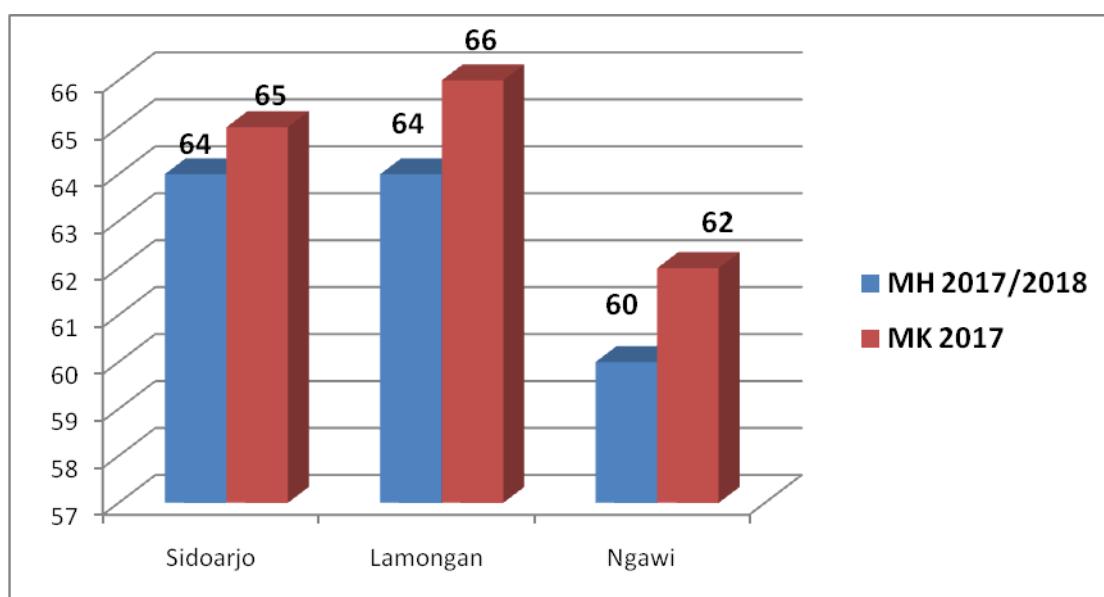
Sumber: Dinas Pertanian Jatim (2018) dan Kementan, 2017 (Data diolah penyajiannya).

Keterangan: 1) Konversi GKG ke beras= 62,74%; 2) Konversi GKG ke beras= 65%;

Pada tahun 2016, dengan tingkat produksi GKG mencapai 13,6 juta ton atau setara dengan kisaran 8,6-8,9 juta ton beras dan setelah dikurangi konsumsi beras masyarakat Jatim sebanyak 3,5 juta ton, maka surplus beras di Jatim pada 2016 berada pada kisaran 5,1-5,4 juta ton. Adapun surplus beras tahun 2017 kisarannya sekitar 4,7-5,0 juta ton.

Rataan rendemen di Provinsi Jawa Timur bersumber dari angka rataan kisaran rendemen dari berbagai Kabupaten yang ada di Provinsi tersebut. Hasil kajian di 3

(tiga) lokasi kajian dari data primer (petani) juga mengisyaratkan terdapatnya variasi rendemen GKG ke beras antar lokasi seperti disajikan pada Gambar 3.1. Rendemen GKG ke Beras tertinggi berada di Kabupaten Lamongan dan Sidoarjo, dengan besaran sekitar 64% saat MH 2017/2018 dan sekitar 65-66% saat MK. Variasi rendemen GKG ke beras sangat ditentukan oleh: (1) Kondisi musim, yang menyangkut kadar air dari gabah hingga digiling menjadi beras, (2) Kualitas gabah yang digiling termasuk varietas gabahnya, dan (3) Kondisi RMU/penggilingan yang melakukan proses giling dari GKG ke beras. Adapun rincian gambaran rendemen gabah ke beras hingga surplus beras yang terdapat di setiap kabupaten di Provinsi Jawa Timur disajikan pada Tabel 3.2.



Sumber: Data Primer Penelitian, 2018

Gambar 3.1. Rataan Rendemen GKG ke Beras di Lokasi Kajian di Provinsi Jawa Timur, MH 2017/2018 dan MK 2017 (%)

Tabel 3.2. Produksi, Konsumsi dan Surplus-Defisit Beras di Propinsi Jawa Timur, 2016

No	Kabupaten / Kota	Produksi GKG (Ton)	Setara Beras (Ton)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Beras (Ton)	Surplus Beras (Ton)
1	Kab. Lamongan	979,004	614,227	1,188,193	135,454	478,773
2	Kab. Bojonegoro	890,767	558,867	1,240,383	141,404	417,464
3	Kab. Ngawi	812,956	510,049	829,480	94,561	415,488
4	Kab. Jember	986,653	619,026	2,419,000	275,766	343,260
5	Kab. Banyuwangi	770,602	483,476	1,599,811	182,378	301,097
6	Kab. Pasuruan	721,434	452,628	1,593,683	181,680	270,948
7	Kab. Nganjuk	610,225	382,855	1,045,375	119,173	263,682
8	Kab. Madiun	531,206	333,279	677,993	77,291	255,987
9	Kab. Tuban	584,307	366,594	1,158,374	132,055	234,540
10	Kab. Ponorogo	451,476	283,256	868,814	99,045	184,211
11	Kab. Lumajang	459,128	288,057	1,033,698	117,842	170,215
12	Kab. Bondowoso	400,933	251,545	765,094	87,221	164,325
13	Kab. Jombang	475,079	298,065	1,247,303	142,193	155,872
14	Kab. Magetan	354,323	222,302	627,984	71,590	150,712
15	Kab. Situbondo	346,719	217,532	673,282	76,754	140,777
16	Kab. Gresik	422,343	264,978	1,270,702	144,860	120,118
17	Kab. Blitar	389,151	244,153	1,149,710	131,067	113,086
18	Kab. Bangkalan	331,330	207,876	962,773	109,756	98,120
19	Kab. Tulungagung	342,618	214,959	1,026,101	116,976	97,983
20	Kab. Mojokerto	347,854	218,244	1,090,075	124,269	93,975
21	Kab. Probolinggo	331,700	208,109	1,148,012	130,873	77,235
22	Kab. Trenggalek	217,195	136,268	691,295	78,808	57,461
23	Kab. Sampang	260,097	163,185	947,614	108,028	55,157
24	Kab. Pacitan	169,081	106,081	552,307	62,963	43,118
25	Kab. Kediri	315,301	197,820	1,554,385	177,200	20,620
26	Kab. Pamekasan	162,469	101,933	854,194	97,378	4,555
27	Kab. Sumenep	200,772	125,964	1,076,805	122,756	3,209
28	Kota Pasuruan	20,339	12,761	196,202	22,367	(9,606)
29	Kota Blitar	8,121	5,095	139,117	15,859	(10,764)
30	Kota Madiun	14,115	8,856	175,607	20,019	(11,163)
31	Kota Mojokerto	4,794	3,008	126,404	14,410	(11,402)
32	Kab. Malang	446,513	280,142	2,560,675	291,917	(11,775)
33	Kota Probolinggo	14,296	8,969	231,112	26,347	(17,377)
34	Kota Batu	4,211	2,642	202,319	23,064	(20,422)
35	Kota Kediri	10,630	6,669	281,978	32,145	(25,476)
36	Kota Malang	14,070	8,828	856,410	97,631	(88,803)
37	Kab. Sidoarjo	218,900	137,338	2,150,482	245,155	(107,817)
38	Kota Surabaya	12,381	7,768	2,862,406	326,314	(318,546)

Sumber: Dinas Pertanian dan KP Jawa Timur (2017)

Berdasarkan Tabel 3.2, terdapat beberapa kabupaten surplus dan terdapat beberapa kabupaten/kota mengalami defisit beras. Lima kabupaten mengalami surpus produksi beras terbesar adalah: Kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Jember, Banyuwangi; sedangkan lima kabupaten/kota mengalami defisit beras

terbesar adalah: Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kota Kediri, dan Kota Batu.

3.1.2. Kinerja Pengembangan Alsintan

Peran mekanisasi pertanian dalam pembangunan pertanian saat ini sangat penting dan signifikan. Pada hampir semua kegiatan produksi pertanian dan pengolahan produk-produknya memerlukan alat dan mesin pertanian (alsintan), sehingga aktivitas produksi berjalan lebih efektif dan efisien. Penerapan inovasi teknologi mekanisasi pertanian, selain dapat mensubtitusi tenaga kerja yang semakin langka, juga perannya lebih kepada peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja, kualitas dan daya saing produk, menekan terhadap kehilangan hasil (*losses*), dan menurunkan biaya produksi. Oleh karena itu, penciptaan dan pengembangan inovasi teknologi mekanisasi pertanian yang lebih efisien dan berdaya saing mutlak diperlukan.

Pada Provinsi Jawa Timur, introduksi teknologi pertanian terus dilakukan melalui penyebaran beragam alsintan terutama alsintan panen dan pengolahan seperti disajikan pada Tabel 3.3. Untuk alsintan panen seperti *Combine Harvester* (CH) dan *power tresher* (PT) telah banyak dikembangkan di lokasi kajian. Kehadiran alat panen tersebut telah membantu petani dalam kegiatan panen (dengan lebih cepat) sekaligus untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja dan mengurangi kehilangan hasil. Pada aktivitas panen dengan PT, umumnya dilakukan oleh kelompok (*group*) pemanen dengan keanggotaan sekitar 7-8 orang. Upah panen jika dibayarkan setara uang sekitar Rp 3,2 juta/ha. Sementara jika panen dengan menggunakan alat panen *Combine Harvester*, upah panennya seharga Rp 3 Juta/ha.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan panen padi saat ini adalah: (1) Jumlah ketersediaan CH masih terbatas, (2) Jumlah dan ketersediaan CH ukuran besar baik dari program ataupun dari mandiri/pribadi sangat terbatas, sedangkan jika pakai CH ukuran kecil akan terbenam pada kondisi lahan sawah yang berlumpur. Adapun dengan kehadiran alat panen CH, maka kualitas gabah menjadi lebih baik, panen lebih cepat dan harga gabah antara yang dipanen dengan CH relatif lebih tinggi Rp 200/Kg –Rp 300/Kg dibandingkan jika dipanen dengan PT.

Tabel 3.3.Penyebaran Alsintan dari APBN di Provinsi Jawa Timur, 2015-2017 (Unit)

No	Jenis Alsintan	2015	2016	2017
1.	Combine Harvester:			
	a. Kecil	450	675	107
	b. Sedang	-	381	123
	c. Besar	-	-	20
2.	Power Tresher	tad	428	tad
3.	RMU	41	tad	tad

Sumber: Dinas Pertanian KP Jawa Timur (2018)

Keterangan: tad=tak ada data

Tabel 3.4. Penyebaran Alsintan dari APBN di Lokasi Kajian Provinsi Jawa Timur, 2015-2017 (Unit)

No	Jenis Alsintan	Sidoarjo	Lamongan	Ngawi
1.	Combine Harvester: (2017)			
	a. Kecil	9	8	5
	b. Sedang	5	7	6
	c. Besar	-	19	10
2.	Power Tresher (2016)	20	27	19
3.	RMU (2015)	1	1	1

Sumber: Dinas Pertanian KP Jawa Timur (2018)

Keterangan: tad=tak ada data

3.1.3. Kinerja Rantai Pasok

Rantai pasok beras menggambarkan rantai distribusi gabah dari produsen (petani) ke penggilingan dan rantai distribusi beras dari penggilingan hingga konsumen. Melalui sistem ratai pasok beras yang efektif dan efisien, seluruh masyarakat konsumen dapat memperoleh beras dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi beras antar wilayah dan antar musim menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi dan rantai pasok, agar beras tersedia sepanjang waktu diseluruh wilayah. Pola rantai pasok komoditas beras dari produsen melibatkan berbagai kelembagaan pemasarannya di dalamnya, baik yang melalui mekanisme penyerapan gabah oleh BULOG maupun melalui mekanisme pasar komersial umum.

Rantai pasok gabah dan beras adalah suatu sistem yang memfasilitasi penyaluran produk gabah/beras dan jasa kepada konsumen. Dengan demikian manajemen rantai pasoknya meliputi integrasi aktivitas pengadaan bahan baku (GKP, GKG) dan pelayanan, pengolahan barang (GKG) menjadi barang setengah jadi

(beras pecah kulit/beras PK dan beras glosor/bahan), pengolahan lanjutan menjadi produk akhir (beras premium, beras medium) serta pengiriman ke konsumen. Panjangnya rantai proses dari gabah menjadi beras dan rantai pasok dari petani ke penggilingan, selanjutnya melalui berbagai pelaku tataniaga hingga sampai ke konsumen membuat panen raya yang berlangsung di sentra-sentra produksi tidak secara cepat berdampak pada pasokan beras di pusat-pusat konsumsi. Paling tidak melibatkan 6-7 pelaku usaha dalam rantai pasok gabah dan beras, yaitu petani, penebas padi/pedagang pengumpul, penggilingan padi, pedagang besar antar wilayah, pedagang besar di pusat-pusat pasar, serta pedagang pengecer atau ritel, tergantung tujuan dan segmen pasarnya.

Pola pemasaran gabah dari petani bisa ke pedagang pengumpul atau ke penggilingan padi. Pada kasus penggilingan skala menengah hingga besar kisaran kapasitas penggilingan antara 3-5 ton beras yang dihasilkan dalam setiap hari operasional. Gabah yang digiling bersumber dari gabah yang dibeli dari petani sekitar Sidoarjo (75%) hingga Ngawi (25%). Mekanisme untuk memperoleh gabah melalui pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul memperoleh gabah di sekitar Kabupaten Sidoarjo dan Ngawi dengan pedagang perantara. Pada kasus dimana penggilingan dimiliki oleh Gapoktan maka pedagang pengumpul adalah merupakan bagian dari pengurus Gapoktan dan hasil pembelian gabah secara otomatis merupakan milik penggilingan Gapoktan. Sementara untuk penggilingan non pemilik Gapoktan, maka pedagang pengumpul bisa menjual gabahnya ke penggilingan atau pedagang pengumpul menggiling padinya menjadi beras terlebih dahulu yang selanjutnya akan menjual berasnya ke pedagang beras/pasar beras.

Pada saat musim panen puncak, volume gabah yang digiling dapat berkisar antara 9-10 ton/hari atau sekitar 60 ton/minggu. Musim panen, dengan pasokan gabah yang besar dapat mencapai sekitar 11 bulan. Adapun rataan rendemen GKG ke beras (varietas Ciherang) tahun ini sekitar 64-65. Untuk rincian biaya yang dikeluarkan pada penggilingan skala besar adalah: (1) Biaya angkut sekitar Rp 100-Rp 150/Kg gabah, (2) Biaya Pengeringan + Penyusutan: Rp 300/Kg gabah, (3) Biaya giling sekitar Rp 350/Kg, (4) Biaya tenaga kerja Rp 200/Kg, (5) Biaya Kemasan Rp 2.500/ukuran 20 kg, dan (4) Biaya transportasi angkutan penjualan sekitar Rp 800-Rp 1000/Kg beras. Penerimaan lain pada usaha penggilingan selain beras adalah

katul, dimana untuk setiap 1 kuintal gabah yang digiling diperoleh katul sebanyak 15 Kg, dan jika dijual sehingga Rp 3.000/Kg.

Beras yang dihasilkan penggilingan dari gabah sendiri selanjutnya sebagian besar dijual sebagian besar ke Pasar Induk Cipinang (85%) dan sisanya ke pedagang di Pasar lokal Sidoarjo, dan bahkan dijual (titip) ke mitra Bulog Jawa Timur. Tujuan penjualan tidak terikat pada pedagang tertentu, namun bersifat bebas sesuai harga yang disepakati. Jenis beras yang dijual ke Pedagang di PIBC adalah jenis beras glosor (setengah putih, untuk beras premium). Harga jual rataan per Maret 2018 Rp 9.400/Kg. Sementara jika dijual ke pasar lokal seharga Rp 9.500/Kg.

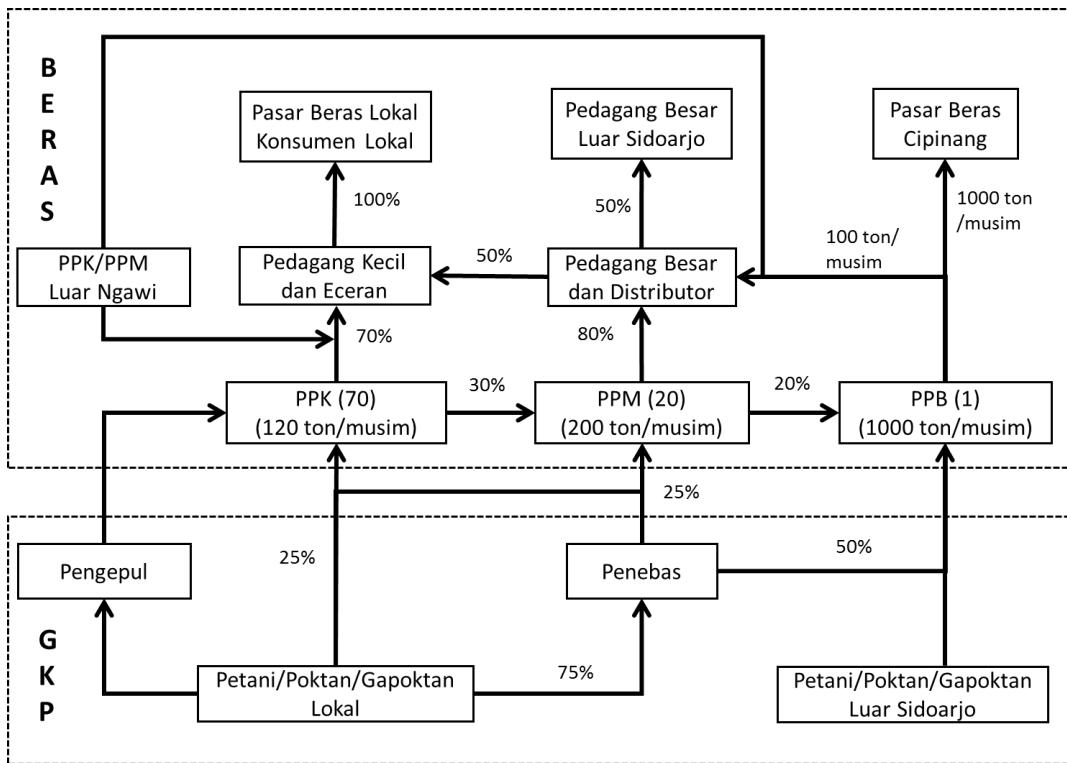
Untuk beras yang dijual ke pedagang/agen di pasar lokal Surabaya, selanjutnya bisa dijual ke pedagang eceran atau konsumen. Berdasarkan perolehan marjin pemasaran tampak bahwa penggilingan memperoleh marjin penjualan beras (beli gabah) sebesar Rp 1.180/Kg, kemudian pedagang beras di pasar lokal memperoleh marjin sebesar Rp 655/kg beras dan pengecer memperoleh marjin sebesar Rp 1.250/Kg (Tabel 3.5). Dengan demikian kecenderungannya adalah bahwa perolehan marjin pemasaran semakin besar ke arah pelaku pasar eceran. Hasil kajian Supriatna (2004) atas pemasaran beras di Sumatera Utara mengungkapkan bahwa tataniaga gabah/beras pada garis besarnya ditemukan dua aliran, yaitu: saluran pemasaran pertama, petani menjual gabah ke pedagang pengumpul sebagai kaki tangan pedagang kongsi; dan saluran pemasaran kedua, petani menjual gabah ke pedagang pengumpul yang merupakan kaki tangan pemilik penggilingan desa. Sementara hasil penelitian Mardianto, *et al.*, (2005) menyebutkan bahwa bahwa tujuan pemasaran gabah dan beras dari para petani padi di Kabupaten Sidoarjo terbanyak ke pasar yang menawarkannya lebih tinggi. Secara detil saluran pemasaran gabah dan beras di daerah ini adalah: petani → pedagang/penggilingan→ pedagang besar → pengecer → konsumen.

Pembentukan harga gabah di tingkat petani dipengaruhi oleh: (1) Pola musim panen atau paceklik serta awal panen atau akhir panen, (2) biaya usahatani, (3) keberhasilan panen (volume panen) dan kualitas gabah yang dijual. Adapun Pembentukan harga beras di tingkat penggilingan beras dipengaruhi oleh: (1) volume beras yang diserap saat panen atau paceklik, (2) Tujuan pemasaran, (3) kualitas beras, dan (3) pengaruh harga BULOG, yakni saat membeli gabah atau

membeli beras. Sementara pembentukan harga beras di tingkat pedagang eceran/agen beras di pasar lokal dipengaruhi oleh: (1) volume beras yang diserap pedagang saat panen atau paseklik, (2) kualitas beras, (3) pengaruh harga saat BULOG melakukan operasi pasar, dan (4) permintaan serta preferensi konsumen terhadap beras yang dibeli.

Rantai pasok pasar disusun oleh sejumlah entitas yang saling berinteraksi melalui pola interaksi yang khas sesuai dengan struktur yang terbentuk. Semakin banyak jumlah entitas yang terlibat dalam rantai pasok maka akan berpengaruh pada struktur yang terbentuk dan menentukan kompleksitas sebuah rantai pasok. Entitasentitas tersebut saling berinteraksi guna mencapai tujuan bersama, yaitu memenuhi kepuasan konsumen akhir (Mahbubi, 2013). Menurut Zhou dan Benton (2007), sebuah rantai pasok merupakan sistem terintegrasi. Sebagai sebuah sistem, sudut pandang analisis terhadap rantai pasok harus bersifat menyeluruh. Seluruh komponen sistem harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

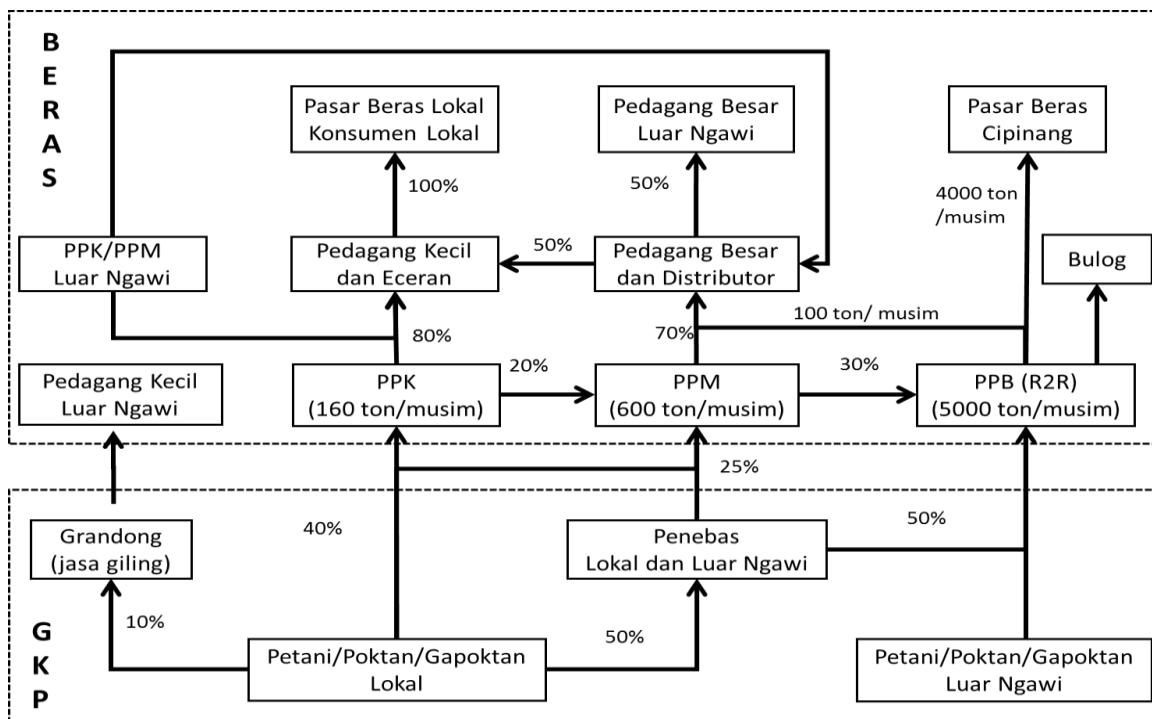
Secara umum dapat dikemukakan bahwa pola rantai pasok beras di Jawa Timur lebih sederhana. Pelaku antara lain petani padi, penebas, penggilingan padi, pedagang besar, dan pedagang eceran. Hasil survey di Sidoarjo memperlihatkan PPK biasanya membeli gabah dari petani/poktan sendiri hanya saat ada panen, sedangkan PPM dan PPB juga membeli gabah dari kabupaten lain di Jawa Timur, bila di Sidoarjo tidak ada panen. Seringkali, karena persaingan dalam mendapatkan GKP, penggilingan padi harus memberi modal awal kepada penebas dalam mencari GKP dengan harga yang ditetapkan oleh penebas, meskipun penggilingan harus mengambil sendiri GKP yang telah didapatkan oleh penebas di sawah. Peran penebas lebih kepada manajemen sewa mesin-mesin panen dan tenaga kerja pemanenan. Beras yang dihasilkan dijual ke segmen pasar yang berbeda karena ada perbedaan mutu. PPK menjual beras kepada pedagang besar lokal yang kemudian menyalurnykannya ke pasar lokal yang pembelinya umumnya konsumen lokal, meskipun ada sebagian kecil yang dijual ke pedagang besar atau PPB untuk dikirim ke Jakarta. Sedangkan PPM mengisi pasar lokal dan luar kabupaten, dan PPB umumnya menjual beras keluar Sidoarjo hingga Cipinang dan Kalimantan. Pola rantai pasok gabah-beras di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.2. Pola rantai pasok gabah-beras di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 2018.

Di Kabupaten Ngawi, pola rantai pasok juga melibatkan jenis pelaku yang sama, yaitu petani padi, penebas, penggilingan padi, pedagang besar beras, dan pedagang pengecer beras. Adakalanya dua posisi dipegang oleh pelaku yang sama, yaitu penggilingan padi juga bertindak sebagai pedagang, khususnya PPB yang mengirim beras ke Jakarta dan Kalimantan. Praktek yang terjadi juga sama seperti yang terjadi di Sidoarjo, namun karena Ngawi termasuk sentra produksi beras yang cukup besar surplusnya, maka banyak penebas dan penggilingan padi dari luar Ngawi yang datang mencari gabah di Ngawi. Karena besarnya volume produksi gabah di Ngawi, di sini beroperasi salah satu perusahaan penggilingan padi dan distributor beras terbesar di Indonesia, yaitu PT Sakti, yang mengirim beras mutu premium ke berbagai kota di Indonesia melalui distributornya yaitu PT Indo Beras Unggul yang berlokasi di Sragen. Selain itu, di Kabupaten Ngawi juga terdapat PPB yang mengolah kembali beras semi-sosoh yang dikenal secara lokal sebagai beras bahan, menjadi beras mutu premium, yaitu PT Daya Tani Sembada. Pengolahan yang dilakukan adalah menyosoh kembali beras bahan dengan mesin penyosoh modern, melakukan pemutuan untuk meningkatkan persentase beras kepala, dan mengemasnya sesuai permintaan pasar. Beras premium kemasan besar yang

dihasilkan menjadi pasokan bagi pasar beras Cipinang di Jakarta, dan kemasan eceran di jual di banyak kota melalui jaringan pertokon Indomaret. Pola rantai pasok gabah-beras di Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Pola rantai pasok gabah-beras di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 2018.

Menurut Sutrisno (2007) bahwa sistem pemasaran beras sangat mempengaruhi pembelian produk oleh konsumen dan efisiensi tata niaga beras secara keseluruhan. Efisiensi pemasaran yang rendah akan menyebabkan tingginya biaya dan harga penjualan akhir, yang akan mempengaruhi sistem bisnis secara keseluruhan. Inefisiensi pemasaran tidak hanya menekan keuntungan yang diraih produsen tetapi juga melemahkan daya saing. Hal ini tentu saja harus dihindarkan mengingat beras merupakan komoditas yang bersaing ketat. Secara lengkap dan terperinci kinerja harga dan marjin pemasaran gabah/beras dari tingkat petani di daerah sentra produksi ke tujuan pasar di tingkat pedagang pengecer disajikan pada Tabel 3.5. Nampak bahwa marjin terbesar diperoleh oleh pedagang pengecer yang mencapai sebesar Rp 1.250/kg, industri penggilingan sebesar Rp 1.180/kg, pedagang pasar lokal sebesar Rp 655/kg, dan pedagang pengumpul hanya sebesar Rp 175/kg.

Tabel 3.5 Kinerja Harga dan Marjin Pemasaran Gabah/Beras dari Tingkat Petani, Pedagang, penggilingan, Grosir dan Pengecer, di Jawa Timur, 2018 (Rp/Kg)

No.	Pelaku Pemasaran	Biaya Susut (Rp/Kg)	Bentuk beli/jual	Harga Beli (Rp/Kg)	Harga Jual (Rp/Kg)	Biaya giling, Pemasaran & lainnya (Rp/kg)	Total Biaya (Rp/Kg)	Marjin Pemasaran (Rp/Kg)
1	Petani	-	(gabah/gabah)	-	4.500	-	1.300	-
2	Pengumpul	-	(gabah/gabah)	4.500	4.800	-	125	175
3	Penggilingan	720	(gabah/beras)	4.800	9.500	2.800	3.520	1.180
4.	Pedagang Pasar lokal	95	(beras/beras)	9.500	10.500	250	345	655
5.	Pengecer	-	(beras/beras)	10.000	11.500	250	250	1.250

Sumber: Data primer penelitian (2018).

Oleh karena itu, sistem dan strategi pemasaran beras harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu berjalan efektif sesuai dengan karakteristik dinamika perubahan pasar dan preferensi konsumen. Untuk membangun sistem agribisnis beras yang efisien, dibutuhkan berbagai informasi pemasaran mutakhir yang bisa mendukung jalannya kegiatan bisnis dari hulu hingga hilir secara terpadu. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pemasaran dapat ditempuh melalui upaya menyederhanakan rantai tata niaga gabah/beras mulai dari petani hingga konsumen/masyarakat. Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemasaran dan sekaligus dapat meningkatkan posisi tawar di tingkat petani.

3.1.4. Penyerapan Gabah Petani oleh Bulog Divre Jawa Timur

Pada tahun 2017, Bulog Divre Jawa Timur menargetkan dapat menyerap gabah (setara beras) sebanyak 906.240 ton. Namun realisasinya hanya sekitar 63,90%. Bila dilihat pada beberapa Subdivre, misalnya pada lokasi sentra padi di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan dari target 95.000 ton, penyerapannya relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur yaitu mencapai 66,40%. Untuk lokasi subdivre seperti Surabaya Utara (didalamnya terdapat Kabupaten Sidoarjo) dan Madiun (didalamnya melingkupi sentra Kabupaten Ngawi) masing-masing realisasi serapannya sebesar 57,60% dan 48% (Tabel 3.6).

Pada tahun 2018, penyerapan gabah (setara beras) di Divre Jawa Timur dari target 697 ribu ton pada posisi 8 Maret 2018 baru sekitar 3,8%. Pada lokasi kajian di tiga subdivre, ternyata realisasi serapannya dibawah rataan serapan gabah (setara beras) di Jawa Timur. Menurut Bulog, bahwa masih rendahnya serapan gabah di Jawa Timur mengingat panen padi di Jawa Timur belum seluruhnya. Musim panen padi MH 2017/2018 di Jawa Timur telah berlangsung sejak Januari 2018, dan meningkat pada bulan Pebruari serta Puncaknya pada bulan Maret 2018.

Menurut Bulog, belum optimalnya panen padi di daerah sentra produksi di Jawa Timur menyebabkan harga gabah masih tinggi di tingkat petani. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, bahwa panen MH 2017/2018 masih berjalan, dan hingga posisi awal Maret proporsi panen baru sekitar 50-60%. Untuk di Sentra produksi seperti di Kabupaten Lamongan dan Sidoarjo baru panen sekitar 50%.

Sesuai INPRES No. 5 tahun 2015, bahwa HPP gabah sebesar Rp 3.700/Kg. Selanjutnya berdasarkan Rapat Koordinasi Terbatas antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan pihak terkait lainnya akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan fleksibilitas harga penyerapan gabah dari sebelumnya 10% di atas harga penyerapan pemerintah (HPP) menjadi 20% di atas HPP. Melalui kenaikan itu, diharapkan Bulog bisa membeli GKP maksimal 20% di atas HPP untuk semua wilayah. Namun hingga kebijakan ini ditetapkan dayaserap Bulog masih relatif rendah masih jauh dari target 4,4 juta ton gabah atau setara beras 2,2 juta ton.

Tabel 3.6. Penyerapan Gabah (Setara Beras) oleh Bulog Divre Jawa Timur, 2017 dan Posisi Maret 2018

No.	Divre/Sub Divre	2017 (Ton)		Hingga Per 8 Maret 2018	
		Target (ton)	Realisasi (%)	Target 2018 (ton)	Realisasi (%)
1.	Divre Jawa Timur	906.240	63,90	697.000	3,8
2.	Lokasi kajian Sub Divre:				
	a. Surabaya Utara	95.000	57,60	74.300	1,4
	b. Bojonegoro	106.301	66,40	76.299	2,8
	c. Madiun	64.150	48,0	38.900	3,3

Sumber: Bulog Divre Jatim (2018)

3.1.5. Dinamika Harga Gabah, Beras dan Pembentukan Harga Beras

Harga gabah (GKP) di lokasi kajian Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur mengalami peningkatan selama tahun 2017, yaitu dari bulan Januari hingga Desember 2017 sebesar 2,61%/bulan. Harga gabah cenderung rendah pada bulan-bulan panen seperti bulan Pebruari-April 2017 (panen MH 2016/2017) dengan kisaran harga antara Rp 3.690/Kg - Rp 3.890/Kg, dan harga gabah meningkat ketika pasokannya menurun yaitu mulai tanam MKI. Selanjutnya harga gabah menurun kembali ketika panen MK I sekitar bulan Juli-Agustus. Perkembangan harga gabah dan beras di Kabupaten Sidoarjo disajikan pada Tabel 3.7 berikut. Jika dicermati perkembangan harga bulanan gabah dan beras pada periode 2017-2018 menunjukkan perkembangan masing-masing sebesar 1,73 % dan 4,87%. Perkembangan harga beras jauh lebih besar dibandingkan harga gabah terutama didorong pangsa produksi beras premium meningkat lebih cepat dibandingkan harga beras medium.

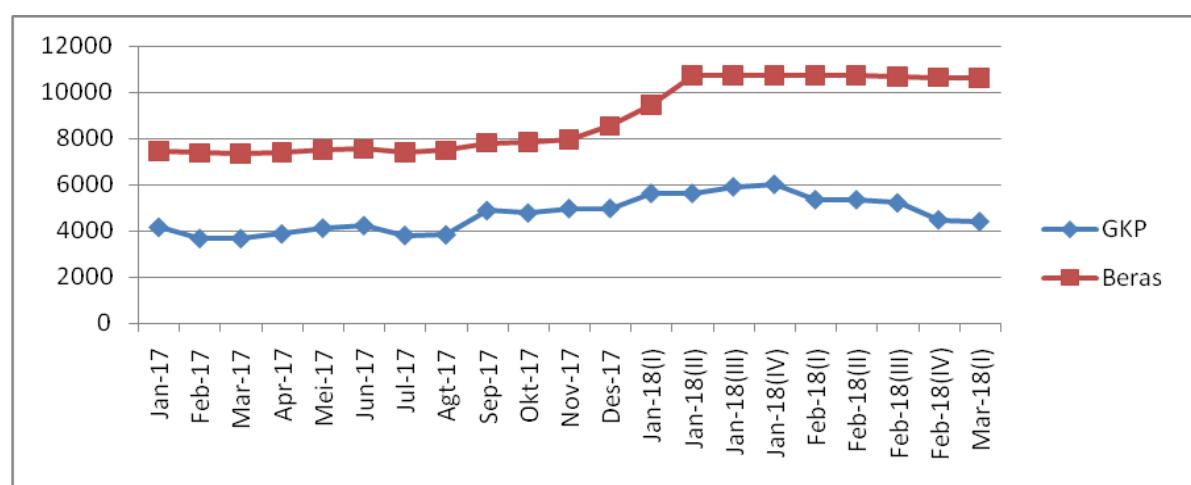
Untuk harga beras, selama tahun 2017 meningkat tipis sekitar 1,03 %/bulan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun harga gabah relatif lebih besar, namun karena keberhasilan produksinya maka ketersediaan beras masih memadai. Akibatnya harga beras hanya mengalami peningkatan yang tipis selama bulan-bulan pada tahun 2017 tersebut. Harga beras terjadi saat bulan panen MH 2016/2017 sekitar Rp 7.320/Kg dan tertinggi saat bulan Desember 2017, ketika menjelang panen MH 2017/2018.

Selanjutnya pada tahun 2018, harga gabah (GKP) kecenderungannya cukup tinggi hingga diatas Rp 5.000/Kg sejak Januari hingga Pebruari Minggu III. Selanjutnya mulai Februari Minggu IV dan posisi Maret Minggu I menurun dan berada pada level Rp 4.400/Kg. Harga ini sesungguhnya berada pada level besaran: HPP + fleksibilitas 20% dari HPP. Selanjutnya untuk harga beras kecenderungan cukup stabil berkisar dari Rp 9.439/Kg- Rp 10.733/Kg. Secara garafis, gambaran harga gabah dan beras medium di Kabupaten Sidoarjo disajikan pada Gambar 3.6

Tabel 3.7. Perkembangan Harga Gabah (GKP) dan Beras Medium di Kab. Sidoarjo, 2017-2018 (Rp/Kg)

Tahun	Bulan	GKP	Beras
2017	Januari	4.172	7.444
	Pebruari	3.697	7.357
	Maret	3.690	7.320
	April	3.890	7.401
	Mei	4.135	7.488
	Juni	4.244	7.538
	Juli	3.822	7.376
	Agustus	3.850	7.473
	September	4.887	7.795
	Okttober	4.786	7.825
	November	4.977	7.931
	Desember	4.984	8.537
	r (%/bln)	2,61	1,03
2018	Januari Mg I	5.625	9.439
	Januari Mg II	5.625	10.722
	Januari Mg III	5.906	10.733
	Januari Mg IV	6.013	10.733
	Pebruari Mg I	5.356	10.733
	Pebruari Mg II	5.356	10.733
	Pebruari Mg III	5.217	10.650
	Pebruari Mg IV	4.489	10.639
	Maret Mg I	4.417	10.617
	r (%/Mg)	1,73	4,87

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo (2018).



Gambar 3.4. Perkembangan Harga Gabah (GKP) dan Beras Medium di Kab.Sidoarjo, 2017-2018 (Rp/Kg)

Menurut petani di lokasi Kajian Kabupaten Sidoarjo dan Lamongan bahwa produktivitas panen saat MH 2017/2018 lebih baik dibandingkan dengan MH tahun sebelumnya hingga 5 tahun yang lalu. Produktivitas yang tinggi berkaitan dengan: (1) Iklim yang cukup baik, dimana meskipun curah hujan tidak terus-menerus, (2) Serangan OPT rendah dan sangat terkendali, dan (3) Terdapatnya dukungan pemerintah yang optimal terkait bantuan/subsidi benih, pupuk dan bantuan alsintan.

Adapun rataan produktivitas gabah di lokasi kajian Kabupaten Sidoarjo cukup tinggi yaitu berkisar antara 8-8,2 ton/ha GKP dan di Lamongan berkisar antara 7,5-8 ton/ha. Perolehan hasil panen juga dipengaruhi oleh potensi varietas padi yang ditanam, dan kehilangan hasil saat panen (panen dengan *Power Tresher* vs panen dengan *Combine Harvester*).

Permasalahan yang dihadapi pada panen MH, dengan masih terdapat curah hujan adalah kesulitan dalam penjemuran hasil panen. Oleh karena itu, dukungan kedepan terkait program hendaknya tidak hanya berupa input terkait benih, pupuk dan alsintan produksi dan panen, akan tetapi juga sangat dibutuhkan berupa bantuan alat pengering dan lantai jemur yang memadai.

Pembentukan harga gabah di tingkat petani dipengaruhi oleh: (1) pola musim panen atau paceklik serta awal panen atau akhir panen, (2) biaya usahatani, (3) keberhasilan panen (volume panen) dan kualitas gabah yang dijual. Adapun pembentukan harga beras di tingkat penggilingan beras dipengaruhi oleh: (1) volume beras yang diserap saat panen atau paceklik, (2) tujuan pemasaran, (3) kualitas beras, dan (3) pengaruh harga Bulog, yakni saat membeli gabah atau membeli beras. Sementara pembentukan harga beras di tingkat pedagang eceran/agen beras di pasar lokal dipengaruhi oleh: (1) volume beras yang diserap pedagang saat panen atau paceklik, (2) kualitas beras, (3) pengaruh harga saat Bulog melakukan operasi pasar, dan (4) permintaan serta preferensi konsumen terhadap beras yang dibeli.

3.1.6.Kinerja Penggilingan Padi dan Rendemen

Penggilingan padi mempunyai peran sentral dalam industri perberasan nasional, karena kuantitas dan kualitas beras ditentukan oleh proses yang terjadi pada tahap ini. Data jumlah dan kondisi penggilingan padi menjadi penting dalam

menghitung jumlah beras yang dihasilkan dari setiap masa panen tiba. Namun data penggilingan padi terbaru yang dikeluarkan resmi oleh BPS adalah data tahun 2012 yang menyebutkan, jumlah penggilingan padi sebanyak 182.199 unit. Terdiri atas 2.076 penggilingan padi berskala besar, 8.628 penggilingan padi skala menengah, dan 171.495 unit penggilingan padi skala kecil. Kinerja rendemen dari gabah kering giling (GKG) menjadi beras ditentukan banyak faktor terutama adalah mutu GKG, teknologi penggilingan padi, dan kapasitas SDM pengelola dan operatornya. Mutu GKG dimulai dari pemanenan gabah kering panen (GKP), perontokan, pembersihan, pengeringan sampai menjadi GKG, sehingga penanganan pascapanen serta alat dan mesin pertanian (alsintan) yang mendukungnya akan memberi dampak pada mutu gabah siap giling. Rendemen beras juga sangat ditentukan oleh teknologi penggilingan padi, teknologi penggilingan modern, skala besar, dengan sistem terintegrasi akan menghasilkan tingkat rendemen beras yang lebih tinggi, beras patah (*broken*) yang lebih rendah, dan beras kepala yang lebih tinggi. Demikian juga halnya kapasitas SDM pengelola dan operator industri penggilingan, semakin tinggi kapasitas SDM maka dapat menghasilkan keputusan terkait pengelolaan industri penggilingan dan pengoperasian mesin.

Hasil sementara sensus ekonomi 2016 (BPS, 2016) tersirat adanya pertumbuhan penggilingan padi sepanjang tahun 2012-2016 terutama PPB, PPM dan PPK keliling. Namun demikian, di beberapa sentra produksi beras, operasi PPK sudah mulai berkurang dengan munculnya PPB di sentra-sentra ekonomi. Selain kalah bersaing dengan PPB dan PPM, PPK yang menetap juga kalah bersaing dengan penggilingan padi keliling (grandong). Walau demikian, di wilayah kajian masih ada PPK yang masih terus beroperasi dengan menghasilkan mutu beras yang bagus seperti di Sidoarjo, Ngawi dan Klaten. Di Sidoarjo, PPK dengan RMU kapasitas kecil namun berteknologi baru, mampu menghasilkan beras sosoh dengan persentase beras kepala 13% lebih besar dan persentase menir yang jauh menurun, dibandingkan dengan beras sosoh yang dihasilkan PPK dengan RMU biasa di daerah yang sama. Rendemen giling kedua jenis RMU hampir sama, dengan kisaran 60-65% dari GKG, tergantung dari kualitas dan kebersihan GKG-nya.

Penggilingan Padi Kecil (PPK)

Menurut data BPS tahun 2012, jumlah PPK atau penggilingan padi rakyat mencapai 171,495 buah atau 94% dari penggilingan nasional. Dengan kapasitas per hari rata-rata adalah 1 ton beras, maka PPK berpotensi memasok beras sebesar 171,495 ton perhari atau 24.760 juta ton dalam setahun (asumsi 48 hari kerja per musim panen dengan IP 300). Jumlah Penduduk Indonesia pada 2017 adalah 262 juta jiwa dengan konsumsi beras per kapita 114 kg beras/tahun maka kebutuhan beras konsumsi adalah 29.868 juta ton, artinya PPK memasok 83% kebutuhan beras konsumsi. Padahal pada umumnya teknologi yang digunakan pada PPK adalah teknologi satu phase yang menghasilkan mutu beras rendah karena prosentase beras patah dan menir tinggi. Preferensi konsumen terhadap mutu beras mulai berubah menuju beras medium dan premium, terutama dikota-kota besar dengan tingkat pendapatan yang tinggi, menjadi tantangan bagi PPK. Pada beberapa sentra produksi beras seperti di Kabupaten Sragen dan Klaten, volume operasi PPK mulai berkurang dengan munculnya penggilingan padi besar di sentra-sentra ekonomi. Salah satu penggilingan padi besar yang dibangun di Kabupaten Sragen adalah PT. Tiga Pilar. Selain kalah bersaing dengan penggiling padi besar, penggilingan padi kecil yang menetap juga kalah bersaing dengan penggilingan padi keliling (grandong). Penggilingan padi kecil yang masih beroperasi adalah penggilingan yang berlokasi di pedesaan terutama melayani penggilingan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga tani dan pasar lokal desa. Penggilingan padi kecil yang masih terus beroperasi adalah penggilingan yang mampu melakukan pembaharuan alat dan teknologi seperti di wilayah Sidoarjo dan Ngawi. Gambar penggilingan padi skala kecil disajikan pada Lampiran 1.

Penggilingan Padi Menengah (PPM)

Tumbuhnya penggilingan padi besar di sentra produksi padi, juga mempengaruhi operasional kerja penggilingan padi menengah (sedang) terutama pada masa panen MT III. Kondisi ini, membuat sebagian PPM mengubah strategi usaha, mengolah GKP menjadi PK atau beras bahan/glosor/asalan. Beras pecah kulit adalah GKG yang diproses sampai tahap pecah kulit (*husking*) tanpa dilakukan penyosohan (*polishing*), sedang beras bahan atau beras glosor adalah beras yang

telah diproses oleh penggilingan menjadi beras dengan tingkat sosoh rendah untuk diolah kembali (*rice to rice processing*). Alasan yang dikemukakan oleh responden merubah strategi bisnis adalah: (a) teknologi pengolah gabah-beras yang mereka miliki pada umumnya sudah tua dan sifatnya tidak terpadu (*husking*, ayakan dan *polishing* terpisah) sehingga efisiensi dan mutunya rendah karena banyak *broken*, (b) limbah sekam tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal sebagai bahan energi, dan (c) banyak penggilingan besar yang mengolah beras PK atau beras glosor menjadi beras putih dengan mutu yang lebih baik.

Pada saat ketersediaan gabah sedikit, harga beras tinggi maka PPM memproses GKG menjadi beras konsumsi dan dikirim ke pedagang-pedagang beras yang ada di pasar lokal dalam bentuk karungan dengan berat 50-80 kg/karung. Namun pada saat ketersediaan gabah banyak, harga beras rendah hingga moderat maka sebagian PPM memproses GKG menjadi beras PK atau glosor untuk memasok PPB. Kapasitas PPM pada kisaran 7-15 ton beras bahan per hari dengan rendemen GKG-Beras adalah 63%-65%. Gambar penggilingan padi skala menengah disajikan pada Lampiran 2.

Penggilingan Padi Besar

Populasi penggilingan padi besar terus bertambah di sentra-sentra produksi beras, sementara di sentra-sentra ekonomi tumbuh penggilingan besar yang mengkhusukan usahanya pada *reprocessing* yaitu mengolah beras dari mutu rendah menjadi beras mutu premium (*rice to rice*) dengan kapasitas 100-500 ton beras/hari (8 jam kerja/hari). Beras mutu rendah, beras pecah kulit dan beras bahan/glosor diolah dengan teknologi *processing* yang lebih bagus seperti penyosohan ulang yang diikuti dengan pengkabutan, penghilangan kotoran (*blower*), sortasi beras patah dan menir menjadi beras bermutu sedang dan premium. Pada penggilingan padi yang melakukan *reprocessing*, beras dikemas dalam satuan 25 kg dan 5 kg/kemasan yang diberi merk sesuai tujuan dan permintaan pasar. Beberapa penggilingan besar yang menjadi rekanan Bulog, melakukan *reprocessing* beras mutu rendah dengan melakukan proses pembersihan kotoran menggunakan blower dan disortasi menir dan beras patahnya untuk memenuhi syarat beras standar mutu Bulog. Mesin-mesin tersebut biasanya dimiliki

oleh industri penggilingan padi besar. Gambar penggilingan padi skala besar disajikan pada Lampiran 3 dan Lampiran 4.

3.2. Provinsi Jawa Tengah

3.2.1. Produksi Padi

Secara total produksi padi di wilayah Jawa Tengah sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras bagi penduduknya. Walau demikian bila ditelisik lebih dalam, tidak semua wilayah yang ada Provinsi Jawa Tengah mengalami surplus, ada beberapa wilayah yang mengalami kekurangan atau defisit dalam memenuhi kebutuhan beras. Adapun peta produksi dan potensi padi-beras per kabupaten yang ada Provinsi Jawa Tengah seperti disajikan pada Tabel 3.8.

Rata-rata, wilayah yang mengalami defisit adalah wilayah kota dengan defisit terbesar adalah Kota Semarang dan kota Magelang. Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi yang merupakan pusat pemerintahan dan bisnis, sedangkan Kota Magelang adalah kota dataran tinggi yang tidak memiliki lahan persawahan. Hasil survei di wilayah Jawa Tengah (Klaten, Sragen dan Demak), mendapatkan infomasi bahwa kekurangan di kedua wilayah tersebut dipasok dari wilayah Solo Raya. Salah satu penggilingan besar di wilayah Sragen, memasok beras bahan ke wilayah Magelang dengan jumlah yang cukup besar yaitu 500 ton per kontrak dimana dalam satu bulan bisa melakukan 2-3 kontrak. Surplus yang ada di wilayah pantai utara Jawa Tengah (Demak, Pati, Grobogan, Blora) banyak dikirim dalam bentuk GKG ke industri penggilingan padi di wilayah pantura Jawa Barat dan ke wilayah Kalimantan dalam bentuk beras konsumsi. Secara lengkap perkembangan produksi beras dan konsumsinya per Kabupaten di Jawa Tengah disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.8 Produksi GKG, Beras dan Surplus Beras di Provinsi Jawa Tengah, 2012-2016

Tahun	Produksi (Ton GKG)	Produksi Setara Beras (Ton)	Jumlah penduduk (Jiwa)	Surplus Beras (Ton)
2012	10.232.934	6.420.143	32.988.692	2.659.432
2013	10.344.816	6.490.338	32.264.339	2.812.203
2014	9.648.104	6.053.220	33.522.663	2.231.37
2015	11.301.422	7.090.512	33.774.141	3.240.260
2016	11.473.161	7.198.261	34.019.095	3.320.084

Keterangan:

Surplus dihitung dengan : (a) Nilai rendemen 62.74% (BPS 2012);
(b) Konsumsi percapita 114 kg/tahun

Sumber Data : BPS 2012, BPS 2015

Bila dirinci analisisnya per kabupaten, maka diketahui bahwa terdapat 7 (tujuh) kota yang mengalami defisit dalam memenuhi kebutuhan beras, secara berturut-turut adalah : Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kabupaten Banjarnegara. Sementara itu, 10 kabupaten surplus beras terbesar terdapat di Kabupaten Grobogan, Cilacap, Sragen, Pati, Demak, Blora, Brebes, Wonogiri, Kebumen, dan Sukoharjo.

Tabel 3.9. Produksi, Konsumsi dan Surplus-Defisit Beras Meunurut Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, 2016

No	Kabupaten / Kota	Poduksi GKG (Ton)	Setara Beras (Ton)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Beras (Ton)	Surplus beras (Ton)
1	Cilacap	888,979	557,745	1,703,390	194,186	363,559
2	Grobogan	843,898	529,462	1,358,400	154,858	374,604
3	Pati	666,379	418,086	1,239,990	141,359	276,728
4	Sragen	654,672	410,741	882,090	100,558	310,183
5	Brebes	635,316	398,598	1,788,880	203,932	194,665
6	Demak	608,533	381,793	1,129,300	128,740	253,053
7	Kab. Blora	531,792	333,646	855,570	97,535	236,111
8	Kab. Kebumen	471,326	295,710	1,188,600	135,500	160,209
9	Kab. Wonogiri	443,432	278,210	951,980	108,526	169,684
10	Klaten	438,847	275,333	1,162,220	132,493	142,840
11	Kab. Pemalang	432,819	271,551	1,292,610	147,358	124,193
12	Kab. Sukoharjo	411,055	257,896	871,400	99,340	158,556
13	Kab. Magelang	396,774	248,936	1,257,120	143,312	105,625
14	Kab. Tegal	395,466	248,116	1,429,390	162,950	85,165
15	Kab. Banyumas	370,993	232,761	1,650,630	188,172	44,589
16	Kab. Karanganyar	345,350	216,673	864,020	98,498	118,175
17	Kab. Purworejo	317,905	199,454	712,690	81,247	118,207
18	Kab. Boyolali	300,402	188,472	969,330	110,504	77,969
19	Kab. Jepara	273,801	171,783	1,205,800	137,461	34,321
20	Kab. Kendal	260,889	163,682	949,680	108,264	55,418
21	Kab. Semarang	239,338	150,161	1,014,200	115,619	34,542
22	Kab. Purbalingga	237,471	148,989	907,510	103,456	45,533
23	Kab. Batang	216,643	135,922	749,720	85,468	50,454
24	Kab. Temanggung	204,633	128,387	752,490	85,784	42,603
25	Kab. Pekalongan	193,943	121,680	880,090	100,330	21,350
26	Kab. Wonosobo	175,487	110,101	780,790	89,010	21,090
27	Kab. Kudus	171,498	107,598	841,500	95,931	11,667
28	Kab. Rembang	152,801	95,867	624,100	71,147	24,720
29	Kab. Banjarnegara	133,261	83,608	907,410	103,445	(19,837)
30	Kota Semarang	30,261	18,986	1,729,080	197,115	(178,129)
31	Pekalongan	12,377	7,765	880,090	100,330	(92,565)
32	Salatiga	8,750	5,490	186,420	21,252	(15,762)
33	Tegal	3,720	2,334	247,210	28,182	(25,848)
34	Magelang	3,012	1,890	1,257,120	143,312	(141,422)
35	Surakarta	1,338	839	514,170	58,615	(57,776)

Sumber Data: BPS Jateng, 2016 diolah

3.2.2. Penyebaran Alsintan Panen

Penyebaran alsintan bantuan dari pemerintah yang tercatat dari tahun 2012 sampai tahun 2017 untuk wilayah Jawa Tengah disajikan pada Tabel 3.10. Sistem pengelolaan *Combine Harvester* bantuan di beberapa daerah kajian seperti Kabupaten Klaten dan Demak telah dilakukan melalui Brigade Panen. Di wilayah kajian (Kabupaten Klaten), telah ada kesepakatan aturan pengelolaan CH sebagai berikut: (a) 30 % dari hasil yang diperoleh disisihkan untuk biaya perawatan alsintan; (b) 25 % untuk biaya operasional; (c) 25 % untuk biaya pergerakan alsintan; (d) 10 % untuk dana peluncur (individu yang mencari tempat lahan untuk dipanen dan jaminan keamanan CH); (e) 10 % biaya BBM. Tingginya permintaan masyarakat tani akan jasa alsintan termasuk mesin panen, menumbuhkan usaha jasa alsintan di wilayah-wilayah sentra produksi. Alsintan yang dikelola pihak swasta pada umumnya berkapasitas besar, sehingga dalam operasionalnya tidak hanya melayani satu wilayah kabupaten tetapi lintas kabupaten bahkan lintas propinsi. Untuk menghindari gesekan antar pengelola swasta maupun brigade alsintan maka didirikan paguyuban pengelola *Combine Harvester* dengan nama ILC (Ikatan Lintas *Combine*) yang bertujuan melakukan koordinasi dan kerjasama antar operator CH yang bersifat lintas daerah administratif (lintas kota dan propinsi)

Tabel 3.10. Penyebaran Alsintan dari APBN di Provinsi Jawa Tengah, 2012-2017

No	Jenis Alsintan	Jumlah (Unit)
1.	Combine Harvester:	
	a. Kecil	1.132
	b. Sedang	155
	c. Besar	59
2.	Power Tresher	365
3.	RMU	-

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (2018)

Penyebaran bantuan alsintan untuk tiga wilayah survey, yaitu di Kabupaten Klaten, Sragen dan Demak disajikan pada Tabel 3.11. Berdasarkan hasil kajian di lapang dengan Gapoktan, kelompok tani dan kelompok UPJA jumlah alsintan yang diperlukan dan masih dirasakan kurang adalah *combine harvester besar* dan pengering padi (*dryer*). Diperkirakan tambahan bantuan CH besar dan dryer dapat

meningkatkan kinerja panen, pasca panen, dan memperpendek waktu panen raya dengan ketersediaan beras di pusat-pusat pasar sehingga dapat membantu menstabilkan harga gabah di daerah sentra produksi dan beras di pusat-pusat pasar.

Tabel 3.11. Penyebaran Alsintan dari APBN di Lokasi Kajian Kabupaten Sragen, Demak dan Klaten, 2012-2017 (Unit)

No	Jenis Alsintan	Sragen	Demak	Klaten
1.	Combine Harvester:			
	a. Kecil	99	31	41
	b. Sedang	20	10	12
	c. Besar	4	2	4
2.	Power Tresher	9	5	16
3.	RMU	-	-	-

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (2018).

3.2.3. Kinerja Rantai Pasok

Rantai pasok gabah dan beras menggambarkan rantai distribusi gabah dan beras dari produsen (petani) ke industri penggilingan padi dan rantai distribusi beras dari penggilingan padi hingga konsumen. Melalui sistem rantai pasok gabah dan beras yang efektif dan efisien, seluruh konsumen/masyarakat dapat memperoleh beras dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi padi atau beras antar wilayah dan antar musim menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi dan rantai pasok, agar beras tersedia sepanjang waktu diseluruh wilayah. Pola rantai pasok komoditas gabah dan beras dari produsen melibatkan berbagai kelembagaan pemasarannya, baik yang melalui mekanisme penyerapan gabah oleh BULOG maupun melalui mekanisme pasar komersial umum.

Rantai pasok gabah dan beras adalah suatu sistem yang memfasilitasi penyaluran produk gabah/beras dan jasa dari produsen kepada konsumen. Dengan demikian manajemen rantai pasoknya meliputi integrasi aktivitas pengadaan bahan baku (GKP, GKG) dan pelayanan, pengolahan barang (GKG) menjadi barang setengah jadi (beras pecah kulit/beras PK dan beras glosor/bahan), pengolahan lanjutan menjadi produk akhir (beras premium, beras medium) serta pengiriman ke konsumen. Panjangnya rantai proses dari gabah menjadi beras dan rantai pasok dari petani ke penggilingan, selanjutnya melalui berbagai pelaku tataniaga hingga sampai ke konsumen membuat panen raya yang berlangsung di sentra-sentra produksi tidak

secara cepat berdampak pada pasokan beras di pusat-pusat konsumsi. Paling tidak melibatkan 6-7 pelaku usaha dalam rantai pasok gabah dan beras, yaitu petani, penebas padi/pedagang pengumpul, penggilingan padi, pedagang besar antar wilayah, pedagang besar di pusat-pusat pasar, serta pedagang pengecer atau ritel, tergantung tujuan dan segmen pasarnya.

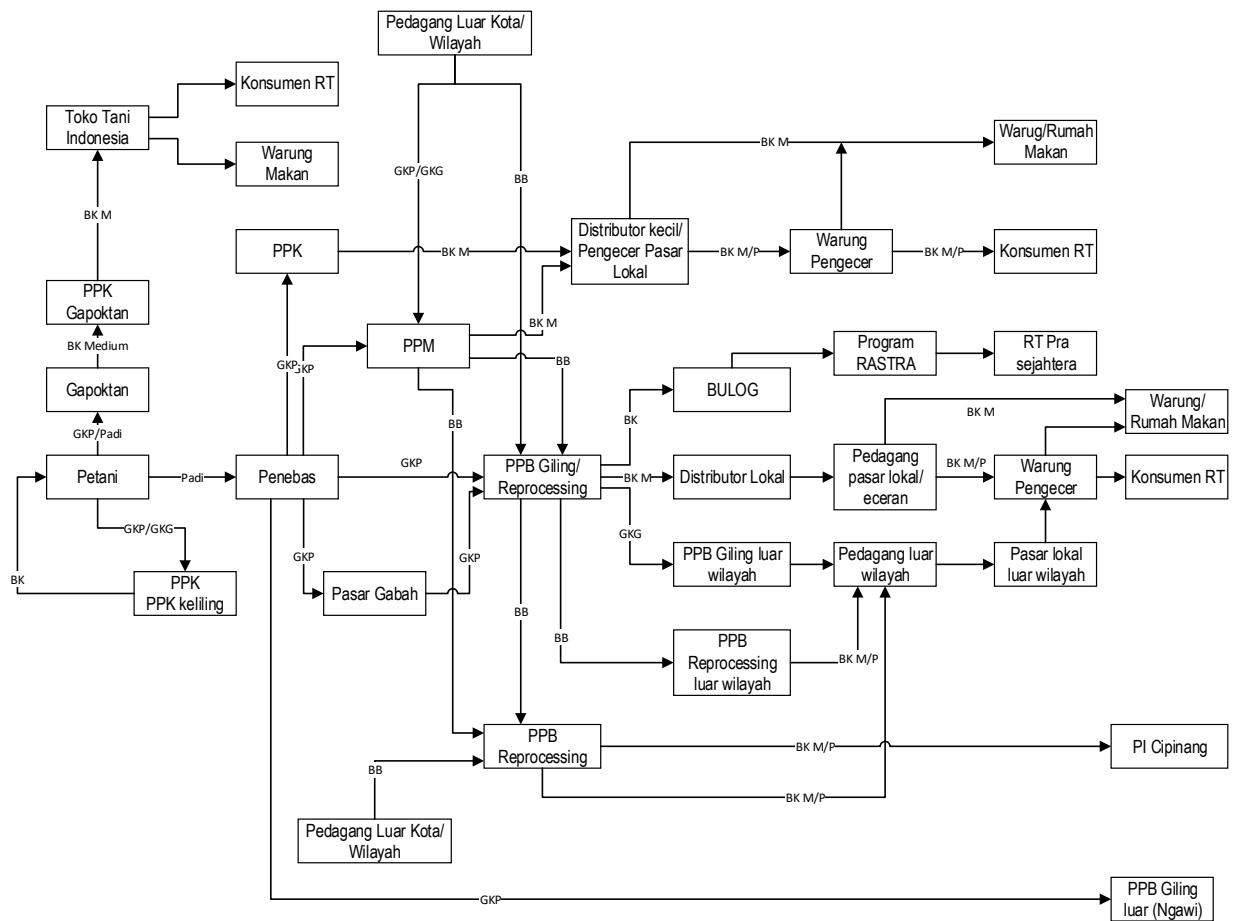
Pada wilayah kabupaten/kota yang produksi padi melebihi kebutuhan penduduknya, rantai pasok beras untuk sampai di konsumen akhir relatif lebih pendek karena pedagang-pedagang pasar lokal langsung menerima pasokan beras dari PPM atau PPK yang ada disekitarnya (Petani-Penebas-PPM/PPK- Pedagang Pasar Lokal-Konsumen atau Warung-Konsumen). Rantai pasok beras menjadi lebih panjang untuk wilayah yang produksi berasnya tidak mencukupi kebutuhan penduduknya karena pasokan berasnya berasal dari pasar-pasar induk (Petani-Penebas - PPB/(PPM-distributor) - Pasar Induk Beras – Distributor – Subdistributor - Pedagang Pasar local - Konsumen atau Warung - Konsumen). Pola ini ditemukan pada survei di pasar Kota Solotigo dan Kota Solo. Beras berasal dari Kabupaten Sragen, Karanganyar, Klaten dalam kemasan 25 kg masuk ke distributor yang berlokasi di jalan Tambak Segaran (Pasar Legi) Solo, salah satu distributornya adalah Toko Beras Adi Rasa. Dari Toko Adi Rasa, beras dikirim ke sub distributor yang ada di Pasar Solotigo (salah satunya adalah Toko Elsa Beras). Sub distributor tersebut menjadi pemasok pedagang pengecer dan sekaligus distributor kecil bagi warung pengecer. Pedagang yang juga berperan sebagai distributor kecil umumnya menjual eceran dalam kemasan 5 kg sedang yang kemasan 25 kg diperuntukkan pedagang warung pengecer atau warung nasi/restoran. Warung pengecer menjual beras dalam wadah-wadah ember dengan satuan berat sesuai permintaan konsumen. Sejak harga beras naik di akhir tahun 2017, warung pengecer juga menjadi mitra BULOG dalam operasi pasar menyediakan beras medium dengan harga Rp 9350/kg. Pada wilayah responden (Jawa Tengah), beras medium yang dipasok oleh BULOG banyak diminati oleh pedagang warung nasi goreng karena jenis berasnya cocok untuk membuat nasi goreng.

Rantai pasok beras yang panjang dirasakan oleh pemerintah (Kementerian Pertanian) dan ditengarai menjadi salah satu sebab tingginya harga beras di tingkat konsumen dan rendahnya harga GKP di tingkat petani. Upaya dilakukan sejak tahun

2016 oleh pemerintah (Kementerian Pertanian) dengan meluncurkan Toko Tani Indonesia (TTI).TTI yang berlokasi di pedesaan atau perkampungan dibentuk dengan pola rantai pasok Petani-Gapoktan (PUPM)-TTI (3 pelaku).Gapoktan yang mendapat bantuan PUPM membeli gabah dari anggotanya dan mengolahnya menjadi beras dengan fasilitas bantuan pengering dan penggiling beras dari pemerintah.Hasil olahan beras (beras medium) di jual langsung ke TTI dengan harga yang dikendalikan oleh pemerintah memalui ketentuan HET karena mendapat subsidi biaya pengolahan dan distribusi.TTI adalah toko-toko kelontong yang ada disekitar wilayah Gapoktan.Pola ini, telah dirasakan manfaatnya baik oleh konsumen maupun toko kelontong yang menyediakan beras TTI.Konsumen mendapat beras bermutu dengan harga murah.Bagi toko kelontong yang menyediakan beras TTI mendapat keuntungan ganda selain mendapat kuntungan dari menjual beras, juga keuntungan dari penjualan barang kelontongnya karena konsumen tidak hanya membeli beras saat datang ke toko tersebut.

Hasil survei di lokasi memberikan gambaran bahwa terdapat keragaman rantai pasok gabah dan beras yang terbentuk. Gambar 3.5 merupakan rantai pasok gabah-beras di Kabupaten Sragen, sedang rantai pasok untuk Kabupaten Klaten dan Demak disajikan pada Gambar 3.6.

Berdasarkan Gambar 3.2 memberikan beberapa gambaran sebagai berikut: (1) Pada sistem ranpai pasok yang telah berlaku selama ini melibatkan 6-7 pelaku tataniaga gabah dan beras, yaitu: petani, penebas padi, penggilingan padi kecil, penggilingan padi menengah/besar, pedagang antar daerah di daerah sentra produksi, pedagang besar/grosir di pusat-pusat konsumsi, pedagang pengecer (pasar, desa); dan (2) Pada sistem rantai pasok pola intervensi pemerintah hanya melibatkan 4 (empat) pelaku, yaitu petani, Gapoktan, PPK Gapoktan dan TTI. Jika pola TTI introduksi dari Kementerian Pertanian dan Rumah Pangan Kita (RPK) yang diintroduksi BULOG berjalan baik maka diperkirakan dapat membantu menstabilkan harga beras baik di pusat-pusat pasar daerah sentra produksi maupun di pusat-pusat pasar pusat-pusat pasar atau konsumsi. Serara lebih lengkap dan terperinci berbagai alternatif rantai pasok gabah dan beras dari petani ke konsumen disajikan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5. Aliran Jenis produk pada rantai pasok padi-beras di Kabupaten Sragen, 2018

Keterangan :

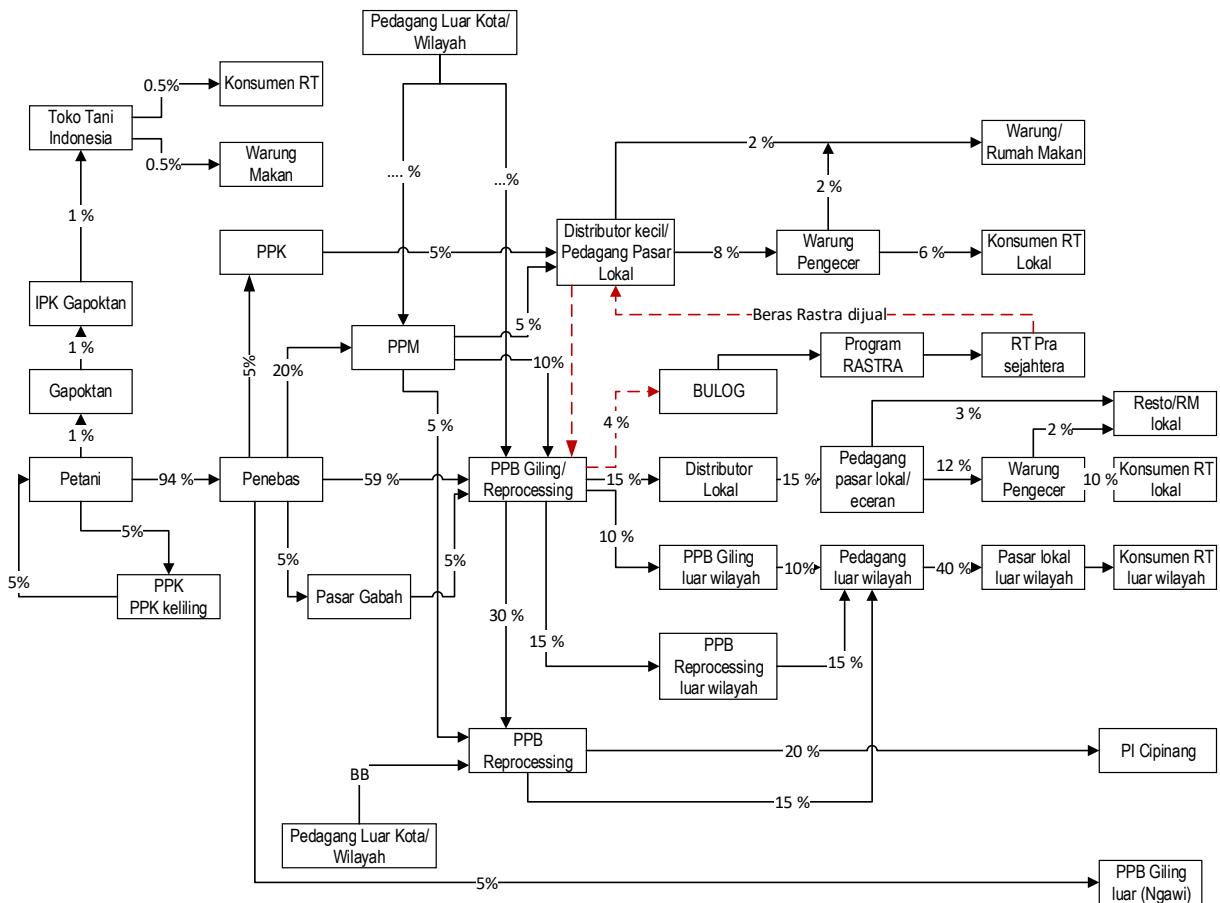
BK : Beras Konsumsi

BB : Beras Bahan/Beras Glosor

BKM/P : Beras konsumsi mutu medium/premium

Sementara itu rantai pasok untuk Kabupaten Demak dan Klaten disajikan pada Gambar 3.6. Berdasarkan Gambar 3.6 memberikan beberapa gambaran sebagai berikut: (1) Pada sistem ranpai pasok yang telah berlaku selama ini melibatkan 6-7 pelaku tataniaga gabah dan beras, yaitu: petani, penebas padi, penggilingan padi kecil, penggilingan padi menengah/besar, pedagang antar daerah di daerah sentra produksi, pedagang besar/grosir di pusat-pusat konsumsi, pedagang pengecer (pasar, desa) baik untuk wilayah Demak dan sekitarnya hingga ke Wilayah Pantura Jawa (Cirebon, Indramayu, dan Karawang) dan untuk asal beras Klaten karena kualitasnya bahkan sampai pasar induk Cipinang; dan (2) Pada sistem rantai pasok pola intervensi pemerintah hanya melibatkan 4 (empat) pelaku, yaitu petani,

Gapoktan, PPK Gapoktan dan TTI. Jika pola TTI introduksi dari Kementerian Pertanian dan Rumah Pangan Kita (RPK) yang diintroduksi BULOG berjalan baik maka diperkirakan dapat membantu menstabilkan harga beras baik di pusat-pusat pasar daerah sentra produksi maupun di pusat-pusat pasar pusat-pusat pasar atau konsumsi.



Gambar 3.6. Aliran produk /beras pada rantai pasok padi-beras di Kabupaten Demak dan Klaten, 2018.

Petani adalah pelaku utama sebagai pemasok bahan baku beras. Padi dipanen oleh petani atau penebas dan dijual dalam bentuk GKP. Masuknya alisintan panen seperti PT dan CH mulai menggerser pelaku panen dari petani ke penebas. Kecepatan proses kegiatan panen, kehilangan tercecer rendah dan mutu gabah lebih baik (bersih dari kotoran dan gabah hampa), menjadi alasan pergeseran tersebut. Pemanenan dengan tebasan hingga mencapai 94% sedang yang 6% dilakukan oleh petani untuk keperluan rumah tangga tani sedang 1% dari produksi digunakan

untuk program pemerintah PUPM Gapoktan dalam menyediakan beras TTI (**Toko Tani Indonesia**)

Penebas ada dua tipe, yaitu penebas yang bekerja untuk PPB/PPM dan penebas bebas. Penebas bebas dapat menjual hasil tebasan ke penggiling lokal atau penggiling luar wilayah tergantung keuntungan yang didapat. Khusus di Kabupaten Sragen, ada **pasar gabah** yang fungsinya sebagai tempat transaksi penebas bebas kepada pihak luar (pedagang antar daerah dan pedagang luar daerah). Hasil panen yang masuk di pasar gabah tersebut tidak lebih dari 5%. Pasar gabah sifatnya temporer dan hanya ada saat panen raya di wilayah Sragen. Penebas luar wilayah kadang memanfaatkan pasar gabah dalam mendapat GKP. Istilah tukar nota juga terjadi di pasar gabah yaitu pelaku bertransaksi saat gabah sedang dalam perjalanan dari sawah, dan bila harga disepakati maka gabah langsung berpindah ke truk pembeli tanpa diturunkan ke gudang.

3.2.4. Kinerja Penggilingan Padi dan Rendemen

Jumlah penggilingan padi di Jawa Tengah adalah 9.551 unit menempati urutan ke tiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur (BPS 2012). Mengacu pada persentase penggilingan padi nasional, maka jumlah penggilingan padi kecil mencapai 90-94% (8959-8989 unit), 4.7 % penggilingan padi menengah (PPM) dan sisanya adalah penggilingan padi besar (PPB). Peningkatan produksi padi Jawa Tengah dari 9.648.104 ton pada tahun 2014 berturut turut menjadi 11.301.422 ton dan 11.473.161 ton pada tahun 2015-2016, telah mendorong tumbuhnya penggilingan padi baru baik berkapasitas sedang maupun besar. Sepanjang tahun 2012-2016 berdiri industri penggiling padi menengah dan besar serta penggilingan padi keliling di wilayah Sragen (data sementara BPS 2017). Selain mengolah gabah menjadi beras putih, tumbuh penggilingan padi besar yang hanya melakukan *reprocessing* dengan mengolah beras menjadi beras (*rice to rice*).

PPK di beberapa wilayah sentra produksi padi Jawa Tengah seperti di Kabupaten Sragen, Klaten dan Demak mengalami kekurangan gabah terutama pada MT II dan MT III, oleh karenanya sebagian sudah tidak dioperasikan atau tutup terutama yang berlokasi di sentra ekonomi (perkotaan). Penggilingan padi kecil yang masih beroperasi berada di wilayah perdesaan dan lebih banyak melayani

pengolahan beras untuk kebutuhan rumah tangga petani dan pedagang beras di pasar desa. Petani pada umumnya menyimpan sebagian gabah hasil panen MT II untuk dikonsumsi, terutama wilayah yang mempunyai indek penanaman (IP) 200. Penyimpanan dilakukan dalam bentuk GKG dan akan diolah menjadi beras saat akan dikonsumsi. Kebiasaan seperti itu, menjadikan penggilingan kecil terus bertahan dan bahkan tumbuh terutama untuk penggilingan keliling.

Penggilingan padi menengah (PPM) di wilayah sentra ekonomi yaitu pada lokasi yang mudah diakses pedagang juga bertambah. Data statistik ekonomi tahun 2017 oleh BPS (belum di publish), di wilayah kabupaten Sragen berdiri penggilingan padi menengah baru. Kapasitas penggilingan menengah pada kisaran 10-15 ton beras/hari dengan produk yang dihasilkan adalah beras glosor atau beras bahan (beras asalan). Hasil produk tersebut terutama ditujukan untuk penggilingan beras yang mengolah *rice to rice*.

Dalam proses pengolahan dari GKG menjadi beras putih dalam PPB dibedakan menjadi empat yaitu: (a) pengeringan, (b) penyimpanan GKG, (c) penggilingan, dan (d) pengemasan. Pada prakteknya, penyimpanan gabah merupakan sub-sistem dari proses produksi karena dihubungkan langsung dengan pengering juga dengan penggilingan. Oleh karena itu, pengeringan dan penyimpanan dalam PPB menjadi satu sistem terintegrasi.

Tahapan proses pada pengeringan adalah *intake*, pembersihan pendahuluan (*pre-cleaning*) dan pengeringan. Intake adalah proses penerimaan dan pemasukan gabah basah kedalam satuan pengering. Pembersihan pendahuluan dimaksudkan untuk memisahkan kotoran-kotorang non-padi seperti daun, tangkai, gabah kosong dan lain-lainnya.

Penggilingan padi besar (PPB) tumbuh dan berkembang di beberapa sentra padi Jawa Tengah, baik di wilayah pantura, wilayah tengah maupun wilayah selatan. PPB yang alatnya sudah tua (>7 tahun), 30% gabahnya diolah menjadi beras bahan dan dipasok ke pengolah beras *rice to rice* baik yang ada di wilayah Sragen maupun di luar Kabupaten Sragen (Magelang, Cilacap, Indramayu, Karawang). Meningkatnya permintaan konsumen akan beras berkualitas, menjadi peluang tumbuhnya penggilingan beras (bukan padi) yang khusus mengolah beras bahan/glosor/asalan menjadi beras putih berkualitas medium dan prima atau super. Selain faktor

permintaan pasar, alasan penggilingan padi besar mengembangkan usaha mengolah *rice to rice* adalah untuk mempercepat proses produksi beras putih. Teknologi tambahan selain polisher yang digunakan untuk mengolah beras bahan menjadi beras prima antara lain adalah *waterpolish* sering disebut dengan istilah Kibi, grader untuk memisahkan menir dan beras pecah, blower sentrifugal untuk menyedot katul/dedak.

3.2.5. Kondisi dan Perkembangan Harga Beras

Peningkatan harga beras sejak bulan September 2017 berdampak pada tingginya harga beras diawal tahun 2018 bahkan masih berlangsung sampai dengan akhir Februari walau di beberapa wilayah sentra produksi seperti Sragen, Klaten dan Demak sudah mulai panen. Hasil survei di lapangan menunjukkan pergerakan harga GKP dan GKG yang cukup cepat tuun dan naik salah satunya disebabkan oleh cepatnya masa panen dilakukan. Penggunaan CH berkapasitas besar, membuat panen yang biasanya dilakukan dalam waktu 6 hari/Ha dapat diselesaikan dalam waktu 6 jam. Hal ini berimplikasi pada psikologi masyarakat bahwa padi sudah tidak ada lagi sehingga harga kembali naik dengan cepat. Hasil survei lapang di wilayah Sragen dan Klaten menunjukkan fenomena tersebut, yaitu pergerakan harga turun dan naik sangat cepat dalam hitungan hari. Penggunaan CH besar di wilayah ini telah membuat panen cepat selesai. Pada awal Februari harga GKP masih Rp 5600/kg, dipertegahan bulan sudah turun hingga Rp 4800/kg dan paling rendah mencapai harga Rp 4400/kg. Harga ini hanya bertahan 2 hari, kemudian naik hingga pertengahan bulan Maret harga kembali tinggi mencapai 5400/kg. Kerja penebas yang beroperasi lintas wilayah dan propinsi membuat hasil panen disuatu wilayah cepat berpindah ke wilayah lain sehingga memberi dampak pada suplay di wilayah tersebut terasa kecil walau masih dalam musim panen raya. Hal ini menyebabkan pergerakan harga GKP atau GKG cepat kembali tinggi.

Secara lengkap dan terperinci kondisi dan perkembangan harga gabah kering panen pada tahun 2018 di daerah sentra produksi di Jawa Tengah disajikan pada Tabel 3.12. Berdasarkan Tabel 3.12 tersebut menunjukkan bahwa lonjakan harga gabah yang terjadi pada bulan Januari-Februari 2018 yang mencapai Rp 5.400-5.600/kg menurun menjadi Rp 4.200-4.500/kg pada bulan Maret 2018.

Tabel 3.12. Kondisi harga gabah kering panen di beberapa wilayah sentra produksi di Jawa Tengah, 2018

Wilayah	Pada bulan akhir Januari-Februari 2018	Harga bulan Maret awal 2018
Demak	5.400	4.200
Grobogan	5.500	4.350
Klaten	5.600	45.00
Sragen	5.500	4.300

Sumber: Data primer

Harga jual beras untuk kualitas medium di tingkat penggilingan padi pada bulan Maret 2018 berkisar antara Rp 9.200 – 10.000/Kg, sedangkan untuk kelas premium bervariasi antara Rp 11.000 – 12.000/Kg. Keuntungan bersih yang diterima industri penggilingan hanya sekitar Rp 100 – 200/Kg plus bekatul dan menir. Jika dikalkulasikan secara keseluruhan keuntungan Rp 150-300/Kg beras. Jenis produksi yang dihasilkan terdiri atas beras premium (50 %), beras medium (30%), serta beras broken dan menir (20 %). Secara lengkap dan terperinci kondisi harga jual beras menurut kualitas di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Kondisi Harga beras yang dihasilkan Penggilingan Padi UD Pro Tani, di Kabupaten Klaten, 2018

No.	Jenis beras yang dihasilkan	Harga jual (Rp/Kg)
1	Rata-rata beras premium	10.000-10.500
2	Rata-rata beras medium	9.500
3	Menthik Wangi	12.000
4	Pandan Wangi	12.500
5	Rojo Lele	13.500-15.000
6	Membramo	10.500-11.000
7	Beras pecah/broken	8.000
8	Menir	7.000

Sumber: data primer.

Hasil kajian di daerah sentra produksi padi di Kabupaten Demak diperoleh beberapa temuan pokok. Sumber perolehan beras antara lain dari daerah sentra produksi Demak dan dari Luar Demak. Jumlah pedagang grosir di pasar sekitar 15-20 orang, sedangkan jumlah pedagang pengecer kurang lebih 50 orang pedagang. Volume atau omset penjualan: 5 kuintal – 1 ton/hari. Beras dijual dengan kemasan 5 Kg, 25 Kg, dan beras curah. Penjualan beras dengan sistem curah semakin kecil, karena konsumen pingin yang praktis. Secara lengkap dan terperinci kondisi harga beras di Pasar Bintoro, Kabupaten Demak disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Kondisi harga beras menurut kualitas di Pasar Bintoro, di Kabupaten Demak, 2018

Jenis beras	Pada bulan akhir Januari-Februari 2018		Harga bulan Maret awal 2018	
	Harga Beli (Rp/Kg)	Harga Jual (Rp/Kg)	Harga Beli (Rp/Kg)	Harga Jual (Rp/Kg)
Beras Premium Delanggu	13.500	15.000	12.000	13.000
Beras Menthik Wangi	12.800	14.000	11.000	12.000
Beras Premium Sragen	10.500	12.000	9.000	10.000
Beras Medium Demak	9.500-10.000	11.000	8.000	9.000
Beras C4 super kemasan	10.000	11.500	9.000	9.500-10.000
Beras C4/beras Kawak	10.000	11.000-11.500	8.000	9.000
Beras Tanag	12.000 – 12.400	13.000-13.400	11.400	12.400
Beras membramo	10.000	11.500	9.000	10.000

Sumber: data primer.

Saat ini harga beras sudah mulai stabil dan penjualan mulai agak sepi lagi, karena sudah musin panen raya. Informasi ini menunjukkan memang ada senjang waktu panen dengan ketersediaan beras di pasar. Harga beras medium yang di tingkat eceran yang dipandang standar adalah sebesar Rp 10.000/Kg, sedangkan harga beras premium yang dipandang standar sebesar Rp 11.000-11.500/Kg. Konsumen beras terdiri atas Konsumen Rumah Makan (60-70%) dan Konsumen Rumah Tangga (30-40%). Menurut pedagang faktor yang menyebabkan harga beras melonjak pada akhir bulan Januari – Februari adalah kurangnya pasokan beras di pasar karena beras di penggilingan menipis terutama karena belum panen dan faktor cuaca musim hujan.

Jumlah pedagang beras di Pasar Klaten cukup banyak. Jumlah pedagang grosir kurang lebih 4-5 orang dan pedagang pengecer sekitar 20-25 orang. Rata-rata pedagang saat ini tidak hanya menjual beras, tetapi melakukan diversifikasi usaha untuk sembako. Volume atau omset penjualan sebesar 5 ku-1 ton/hari. Sumber perolehan beras: (a) Soran, Kecamatan Ngawe; (b) Kecamatan Delanggu; dan (c) Kecamatan Karang Dowo. Tidak ambil beras dari wilayah Sragen dan Purwodadi, karena rasa kurang enak, beras pera, warna agak kusam. Secara lengkap dan rinci kondisi harga beras eceran di Pasar klaten disajikan pada Tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.15. Kondisi harga beras menurut jenis atau kualitas di Pasar Klaten, 2018

Jenis beras	Pada bulan akhir Januari-Februari 2018		Harga bulan Maret awal 2018	
	Harga Beli (Rp/Kg)	Harga Jual (Rp/Kg)	Harga Beli (Rp/Kg)	Harga Jual (Rp/Kg)
IR 64	10.000	11.000	9.000	10.000
C4 Delanggu	11.000	12.000	10.000	11.000
Beras Tanag	13.000	14.000	12.000	13.000
Cisadane	11.000	12.000	10.000	10.000
Menthik Wangi	13.000	14.000	12.000	13.000
Rojo Lele	13.500	14.500	11.500	12.500

Sumber: data primer.

Harga beras saat ini sudah stabil. Harga beras medium di tingkat eceran yang dipandang standar adalah sebesar Rp 10.000-10.500/Kg, sedangkan harga beras premium yang dipandang standar sebrsar Rp 12.000-13.000/Kg. Konsumen beras terdiri atas: Pedagang pengecer kecil (50%), Konsumen Rumah Tangga (35%), Katering (10%), dan Konsumen Rumah Makan (5%). Menurut pedagang faktor yang menyebabkan harga beras melonjak pada akhir bulan Januari – Februari adalah kurangnya pasokan karena belum ada panen dan masalah cuaca musim hujan.

Di Pasar Legi, Solo terdapat jumlah pedagang beras cukup banyak baik pedagang grosir dan sekaligus pedagang pengecer kurang lebih 4-5 orang dan pedagang pengecer kecil sekitar 25 orang. Rata-rata pedagang saat ini tidak hanya menjual beras, tetapi melakukan diversifikasi usaha untuk sembako (beras, kacang hijau, gula pasir, gula merah, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain). Volume atau omset penjualan sebesar 5 ku/hari, jika musim sepi hanya 4 ku/hari dan jika musim rame bisa mencapai 8 ku/hari dengan modal yang diputar rata-rata sebesar Rp 10.000. Jika pasar rame bisa mencapai Rp 15 juta. Sumber perolehan beras terutama dari Kabupaten Sragen, sebagian dari Karang Anyar, Klaten, dan Sukoharjo. Secara lengkap dan terperinci kondisi harga menurut jenis beras disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Kondisi harga beras menurut jenis atau kualitas di Pasar Pasar Legi, di Kota Solo, 2018

Jenis beras	Pada bulan akhir Januari-Februari 2018		Harga bulan Maret awal 2018	
	Harga Beli (Rp/Kg)	Harga Jual (Rp/Kg)	Harga Beli (Rp/Kg)	Harga Jual (Rp/Kg)
C4 Sragen	11.500	12.000	10.000-10.500	11.000
IR 64	10.000	10.500	9.000	9.500
C4 Super	12.500	12.500	11.000	12.000
Menthik Wangi	13.000	14.000	12.500	13.000

Sumber: data primer.

Saat ini harga beras sudah stabil atau turun, karena sudah musin panen raya dan isu pemerintah mau melakukan impor. Harga beras saat ini di Pasar Legi, Solo sudah mulai stabil kembali. Harga beras medium di tingkat eceran yang dipandang standar adalah sebesar Rp 10.000-10.500/Kg, sedangkan harga beras premium yang dipandang standar sebrsar Rp 11.500-12.000/Kg. Konsumen beras terdiri atas: Pedagang pengecer kecil (60-70%), Konsumen Rumah Tangga (20%), dan Konsumen Rumah Makan (10%).

Menurut pedagang faktor yang menyebabkan harga beras melonjak pada akhir bulan Januari – Februari adalah kurangnya pasokan karena belum ada panen dan masalah cuaca musim hujan. Kendala dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam perdagangan beras: (a) Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi, menjadikan pasar-pasar tradisional sepi, karena industri penggilingan padi langsung berhubungan dengan pembeli; (b) persaingan dengan toko-toko beras besar yang pada prakteknya juga menjual eceran. Konsekuensi dari kondisi tersebut, maka dalam penjualan beras harus bersaing dan mengambil keuntungan yang relatif terbatas, hanya dengan selisih harga Rp 500/Kg masih kotor, sehingga keuntungan bersih hanya sebesar Rp 200/Kg.

Meskipun harga gabah pada periode tersebut telah turun cukup signifikan, namun harga beras di salah satu pusat pasar beras di Dargo sedikit menurun namun masih tetap tinggi. Secara lengkap dan terperinci kondisi dan perkembangan harga beras menurut jenis pada tahun 2018 di Pasar Dargo, Jawa Tengah disajikan pada Tabel 3.17. Berdasarkan Tabel 3.17 tersebut menunjukkan bahwa lonjakan harga

beras yang terjadi pada bulan Januari-Februari 2018 yang mencapai Rp 10.500-11.500/kg menurun menjadi Rp 10.500/kg pada bulan Maret 2018.

Saat ini harga beras sudah mulai stabil dan penjualan mulai agak sepi lagi, karena sudah musim panen raya. Pasar beras lesu atau sepi disebabkan: (a) mulai musim panen, (b) transaksi beras saat ini tidak harus di pasar, (c) biaya transportasi mahal, (d) daya beli masyarakat menurun, (e) adanya isue impor beras, dan (e) diperkirakan harga beras akan meningkat kembali secara bertahap, karena panen raya sudah habis. Harga beras medium yang di tingkat eceran yang dipandang standar adalah sebesar Rp 10.000 – 10.500/Kg untuk beras medium, sedangkan harga beras premium yang dipandang standar sebesar Rp 11.500-12.000/Kg tergantung jenis dan kualitasnya. Menurut pedagang faktor yang menyebabkan harga beras melonjak pada akhir bulan Januari – Februari adalah kurangnya pasokan beras di pasar karena beras di penggilingan menipis terutama karena belum panen dan faktor cuaca musim hujan.

Tabel 3.17. Kondisi dan Perkembangan harga beras menurut jenis beras di Pasar Dargo Semarang, 2018

Jenis beras	Pada bulan akhir Januari-Februari 2018		Harga bulan Maret awal 2018	
	Harga Beli (Rp/kg)	Harga Jual (Rp/kg)	Harga Beli (Rp/kg)	Harga Jual (Rp/kg)
Beras Super Delanggu	13.000	14.000	12.800	13.500
Beras Pandan Wangi	14.000	15.000	13.000	14.000
Beras Menthik Wangi	13.000	14.000	12.000	13.000
Beras Premium Sragen	11.500	12.500	10.500	11.500
Beras Medium Demak	10.500	11.500	9.500	10.500
Beras C4 super kemasan	11.000	12.000	10.000	11.000
Beras C4/beras Kawak	10.000	11.000	9.000	10.000
Beras Tanag	13.500	14.500	12.500	13.500
Beras membramo	11.500	12.500	10.500	11.500

Sumber: Data primer

3.2.6. Pembentukan harga beras

Pembentukan harga gabah dan beras dengan asumsi pasar bersaing sempurna sangat ditentukan kekuatan penawaran dan kekuatan permintaan, dalam kenyataannya pasar tidak selalu berjalan secara sempurna. Pada saat musim panen raya struktur pasar gabah dan beras cenderung mengarah pada struktur pasar *oligopsonistik* dimana kekuatan pembeli terutama industri penggilingan menengah-

besar memiliki kekuatan yang lebih dominan dibandingkan petani yang jumlahnya sangat banyak dalam menentukan harga. Kondisi tersebut biasanya diperburuk oleh situasi saat panen raya terjadi pada kondisi curah hujan tinggi, sehingga menyebabkan terganggunya proses kegiatan pemanenan, penjemuran, dan dalam distribusi gabah dan beras. Kondisi tersebut sering menekan harga di tingkat petani pada saat musim panen raya. Namun fenomena yang agak berbeda terjadi pada musim panen raya MH 2007/2018 di mana harga tetap tinggi, meskipun mengalami sedikit penurunan.

Beberapa faktor penjelas dari fenomena tersebut dapat dilihat dari aspek teknis, ekonomi, kelembagaan pemasaran, dan aspek kebijakan. Faktor teknis yang utama adalah teknologi panen dengan menggunakan *combine harvester* mempercepat proses kegiatan panen lintas daerah sentra produksi, namun pada sisi lain ketersediaan dan penggunaan alat pengering (*dryer*) oleh penggilingan padi skala menengah dan besar dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas sehingga proses penanganan pasca panen terutama kegiatan penjemuran atau pengeringan terhambat. Kondisi ini menyebabkan adanya keterlambatan waktu (*lag time*) antara kegiatan panen dan pasca panen hingga beras siap tersedia di pasar.

Faktor ekonomi yang berpengaruh tetap tingginya harga beras terutama adalah perubahan preferensi konsumsi konsumen terutama kelas menengah-atas dari beras medium ke arah beras premium yang dalam literatur ekonomi disebut "*value ladder*" atau struktur peningkatan nilai tambah pertanian. Kondisi tersebut telah mendorong industri penggilingan padi menengah (PPM) dan penggilingan padi besar (PPB) memperbesar pangsa produksi beras premium dengan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan beras medium sehingga harga beras secara keseluruhan tertarik ke atas dan tetap tinggi.

Faktor kelembagaan pemasaran, adanya teknologi informasi dan komunikasi rantai pasok beras tidak mengikuti pola lama yang telah mapan melalui berbagai tingkatan pelaku tataniaga pada. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut penggilingan padi dapat langsung melakukan penetrasi pasar ke pasar pusat konsumsi langsung (pasar eceran di pasar-pasar tradisional), bahkan ke konsumen institusi secara langsung (restoran/rumah makan, hotel, katering). Kondisi tersebut mempengaruhi dan berdampak pada psikologi di pasar-pasar

tradisional bahwa pasokan beras makin berkurang (fenomena semu bahwa beras langka) dan mendorong harga tetap tinggi di pasar. Situasi dan kondisi seperti tersebut dijumpai di pasar Legi Solo dan pasar Dargo, Semarang.

Faktor kebijakan, isu kebijakan impor beras yang tidak menentu menyebabkan psikologi pasar bahwa beras benar-benar langka atau kurang pasokan beras di pasar domestik, sehingga harga yang secara bertahap mengalami penurunan dari Rp5.400/Kg hingga Rp3.800/Kg, kembali secara perlahan menunjukkan tendensi meningkat kembali hingga mencapai Rp4.200/Kg hingga mencapai Rp4.400/Kg, bahkan daerah tertentu menembus harga Rp4.800/Kg.

IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

4.1. Kesimpulan

Kinerja rendemen beras

- 1) Kinerja rendemen dari GKG menjadi beras ditentukan banyak faktor terutama adalah mutu gabah yang digiling dan teknologi penggilingan padi. Mutu gabah dimulai dari lahan sampai menjadi GKG, sehingga penanganan pascapanen serta alat dan mesin pertanian yang mendukungnya sangat menentukan mutu gabah siap giling.
- 2) Dampak bantuan alsintan terutama *Combine Harvester* (CH) sudah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat petani, yaitu: (a) membantu petani mempercepat proses pemanenan, kegiatan pengolahan lahan, serta penanaman tepat waktu dan serempak; (b) mengurangi biaya panen menjadi sebesar Rp 2,5 – 2,8 juta/ha, sementara biaya panen menggunakan *power thresher* (PT) antara Rp 4,2 – 4,9 juta/Ha; (c) meningkatkan rendemen dari GKP ke beras menjadi sebesar 53-60%, sedangkan jika menggunakan PT rendemen dari GKP ke beras hanya 48-55 %; (d) rendemen dari GKG ke beras dengan PT mencapai 60-63%, sedangkan dengan CH bisa mencapai 63-67%; (e) GKP hasil panen menggunakan CH harganya meningkat 200-300 Rp/kg, sedangkan yang dipanen manual dan dirontok dengan PT harganya meningkat 100-200 Rp/kg, dibandingkan GKP yang dihasilkan dari panen dan perontokan manual; (f) kehilangan susut hasil dapat ditekan dari 10-12 % menjadi 2 - 4 % saat panen, perontokan dan pengangkutan hasil; dan (g) banyak tenaga kerja muda yang tertarik terjun di pertanian baik sebagai operator traktor, *transplanter*, maupun *combine harvester*.
- 3) Pengeringan GKP (kadar air berkisar 20-25% pada MK dan 25-30% pada MH) hingga menjadi GKG (kadar air 13-14%) memerlukan waktu 2-5 hari tergantung kadar air GKP dan keadaan cuaca di lokasi penjemuran. Beberapa Gapoktan dan Penggilingan Padi Menengah (PPM) sudah memperoleh bantuan alat pengering (*dryer*) tipe bak dengan kapasitas 10 ton GKP/proses pengeringan (sekitar 24 jam) menggunakan bahan bakar gas sebagai sumber panasnya, dan listrik untuk blowernya. Kapasitas yang kecil dan penggunaan

bahan bakar gas membuat ongkos pengeringan menjadi mahal, sekitar 250-400 Rp/kg, lebih mahal dari ongkos penjemuran dengan tenaga surya yang sekitar 100-200 Rp/kg. Sementara itu, Penggilingan Padi Besar (PPB) mempunyai pengering mekanis modern berbahan bakar sekam sebagai sumber panasnya, ongkos pengeringannya sangat murah, sekitar 25 Rp/kg untuk kapasitas 60 ton GKP/proses (sekitar 19 jam pada musim kemarau dan 24 jam pada musim hujan). Pengering modern semacam ini minimal berkapasitas 30 ton GKP/proses, dengan investasi yang jauh lebih mahal dari pada pengering tipe bak.

- 4) Hasil sementara sensus ekonomi 2016 oleh BPS tersirat adanya pertumbuhan penggilingan padi sepanjang tahun 2012-2016 terutama PPB, PPM dan Penggilingan Padi Kecil (PPK) keliling. Namun demikian, di beberapa sentra produksi beras, operasi PPK sudah mulai berkurang dengan munculnya PPB di sentra-sentra ekonomi. Selain kalah bersaing dengan PPB dan PPM, PPK yang menetap juga kalah bersaing dengan penggilingan padi keliling (grandong). Walau demikian, masih ada PPK yang masih terus beroperasi dengan menghasilkan mutu beras yang bagus seperti di wilayah Sidoarjo, Ngawi dan Klaten. Di Sidoarjo, PPK dengan RMU berkapasitas kecil namun berteknologi baru, mampu menghasilkan beras sosoh dengan persentase beras kepala 13% lebih besar dan persentase menir yang jauh menurun, dibandingkan dengan beras sosoh yang dihasilkan PPK dengan RMU biasa di daerah yang sama. Rendemen giling kedua jenis RMU hampir sama, dengan kisaran 60-65% dari GKG, tergantung dari kualitas dan kebersihan GKG.
- 5) Dibangunnya PPB di sentra produksi padi, juga mempengaruhi operasional kerja PPM terutama pada masa panen MT3 (musim tanam ketiga). Kondisi ini, membuat sebagian PPM mengubah strategi usaha, mengolah GKP menjadi Pecah Kulit (PK) atau beras bahan/glosor/asalan. Beras pecah kulit adalah GKG yang diproses sampai tahap pecah kulit (*husking*) tanpa dilakukan penyosohan (*polishing*), sedang beras bahan atau beras glosor adalah beras yang telah diproses oleh penggilingan menjadi beras dengan tingkat sosoh rendah untuk diolah kembali (*rice to rice processing*). Alasan yang dikemukakan oleh responden merubah strategi bisnis ini adalah: (a) teknologi pengolah gabah-

beras yang mereka miliki pada umumnya sudah tua dan sifatnya tidak terpadu (*husking*, ayakan dan *polishing* terpisah) sehingga efisiensi rendah dan mutu rendah karena banyak *broken*, (b) limbah sekam tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, (c) banyak penggilingan besar yang mengolah beras PK atau beras glosor menjadi beras putih dengan mutu yang lebih baik; dan (d) pada saat ketersediaan gabah terbatas sedangkan kapasitas PPM berkisar 7-15 ton beras bahan per hari dengan rendemen GKG – Beras 63%-65% dengan harga beras tinggi maka PPM memproses menjadi beras konsumsi dan dikirim ke pedagang-pedagang beras yang ada di pasar lokal dalam bentuk karungan dengan berat 50-80 kg/karung.

- 6) Populasi PBB terus bertambah di sentra-sentra produksi beras. Beberapa PBB, mengkhususkan usahanya pada *reprocessing* yaitu mengolah beras dari mutu rendah menjadi beras mutu premium (*rice to rice processing*) dengan kapasitas 100-500 ton beras/hari (8 jam kerja/hari). Beras mutu rendah, beras pecah kulit dan beras bahan/glosor diolah dengan teknologi *processing* yang lebih modern seperti penyosohan ulang yang diikuti dengan pengkabutan (*mist polishing*), penghilangan kotoran (*blower*), sortasi beras patah dan menir menjadi beras bermutu sedang dan premium. Pada penggilingan padi yang melakukan *reprocessing*, beras dikemas dalam satuan 25 kg dan 5 kg/kemasan yang diberi merk sesuai tujuan dan segmen pasar. Beberapa PPM dan PBB yang menjadi rekanan Bulog, melakukan *reprocessing* (*rice to rice processing*) dari beras mutu rendah dibersihkan kotorannya dengan blower dan disortasi menir dan beras patahnya untuk memenuhi syarat beras standar mutu Bulog.

Kinerja Rantai Pasok Beras

- 7) Rantai pasok gabah dan beras adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan gabah dan beras dan jasa kepada pelanggan. Dengan demikian manajemen rantai pasok gabah dan beras adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan baku (GKP, GKG) dan pelayanan, pengubahan barang (GKG) menjadi barang setengah jadi (beras pecah kulit/beras PK dan beras glosor/bahan) menjadi produk akhir (beras premium, beras medium) serta pengiriman ke pelanggan. Panjangnya rantai proses dari gabah menjadi beras dan rantai pasok dari petani ke penggilingan selanjutnya menuju melalui berbagai pelaku

tataniaga hingga sampai ke konsumen membuat panen raya yang berlangsung di sentra-sentra produksi tidak cepat berdampak pada pasokan beras di pusat-pusat pasar atau konsumsi. Paling tidak melibatkan 6-7 pelaku usaha dalam rantai pasok beras, yaitu petani, penebas padi/pedagang pengumpul, penggilingan padi, pedagang besar antar wilayah, pedagang besar (grosir) di pusat-pusat pasar, serta pedagang pengecer atau ritel tergantung tujuan dan segmen pasarnya.

- 8) Beras sebagai bagian dari rantai pasok pangan lebih unik lagi, selain ada penurunan mutu dan susut bobot sepanjang rantai pasok juga adanya konversi dari gabah menjadi produk siap konsumsi dalam bentuk beras. Perubahan berat bahan dimulai dari Gabah Kering Panen (GKP) menjadi Gabah Kering Giling (GKG) terkonversi karena penurunan kadar air, dan dari GKG menjadi beras terkonversi karena rendemen giling. Konversi dan susut sepanjang rantai pasok tersebut menjadikan GKP yang dipanen akan menghasilkan beras yang ditujukan untuk konsumsi pada kisaran 40-55% basis GKP. Teknologi pascapanen pada kegiatan panen, perontokan, pengeringan, penggilingan dan penyimpanan sangat berpengaruh terhadap beras yang dihasilkan baik kuantitas maupun kualitas. Variasi teknologi panen, perontokan, pengeringan dan penggilingan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas produk beras sebagai barang yang mengalir dalam rantai pasok. Oleh karena itu dibahas profil rantai pasok dalam tiga kelompok yaitu kelompok teknologi sederhana (panen sabit, perontokan dengan *pedal thresher* dan penggilingan kecil), kelompok menengah (panen sabit, perontokan dengan *power thresher* dan penggilingan sedang), dan kelompok maju (panen dan perontokan dengan *combine harvester* dan penggilingan besar).
- 9) Secara umum struktur agribisnis terdiri dari lima subsistem, yaitu : (a) subsistem pengadaan sarana produksi dan alsintan, (b) subsistem usaha tani atau produksi, (c) subsistem pascapanen termasuk didalamnya penggilingan padi-beras, (d) subsistem distribusi dan pemasaran; dan sub sistem penunjang. Dari kelima subsistem tersebut, subsistem ke satu dan ke dua telah sukses dikelola pemerintah melalui Kementerian Pertanian seperti ditunjukkan oleh angka produksi yang terus meningkat sejak tahun 2014 sampai 2017 (tahun

2014: 70.846.465 ton; tahun 2015 : 75.397.841 ton; tahun 2016: 79.354.767 ton; tahun 2017: 82,3 juta ton). Tingkat produksi tersebut mampu memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang berjumlah 255,46 juta jiwa (tahun 2015) dengan konsumsi per kapita 92 kg/tahun (1,63 kg/minggu; BPS 2015), bahkan surplus hingga 20%. Namun dalam kenyataan setiap tahunnya, ada pergerakan harga beras meningkat hingga membebani masyarakat konsumen dan sebaliknya harga gabah menurun tajam sehingga giliran petani yang dirugikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa subsistem ke tiga, ke empat, dan ke lima belum berjalan dengan baik dan efisien.

- 10) Subsistem ke tiga yaitu pascapanen yang didalamnya adalah industri penggilingan padi-beras. Penggilingan padi mempunyai peran sentral dalam perberasan nasional, karena kuantitas dan kualitas beras terutama ditentukan oleh proses yang terjadi pada tahap ini. Data jumlah dan kondisi penggilingan padi menjadi penting dalam menghitung jumlah beras yang akan dihasilkan dari setiap masa panen tiba. Namun data penggilingan padi terbaru yang dikeluarkan resmi oleh BPS adalah data tahun 2012 yang menyebutkan, jumlah penggilingan padi sebanyak 182.199 unit. Terdiri atas 2.076 penggilingan padi berskala besar (PPB), 8.628 penggilingan padi skala menengah (PPM), dan 171.495 unit penggilingan padi skala kecil (PPK).
- 11) Selain mutu gabah, teknologi dan kebaruan alat penggiling mempengaruhi besarnya rendemen giling dari GKG menjadi beras. Hasil survei di penggilingan padi besar (kasus di Kabupaten Sragen), alat penggiling padi yang dibeli tahun 2005 mempunyai kapasitas 6 ton/jam dengan rendemen 57-58 % dari GKP ke beras, menurun kapasitasnya menjadi 4-5 ton/jam dengan rendemen 50-55% pada tahun 2017. Dengan demikian, angka konversi GKG ke beras sebesar 62,74% perlu diperbarui mengingat data tersebut diterbitkan oleh BPS tahun 2012 yang kemungkinan saat ini populasi penggilingan didominasi oleh penggilingan tua. Oleh karenanya data profil penggilingan padi tidak hanya pengelompokan berdasarkan besar-kecilnya kapasitas, tetapi ditambah dengan data pengelompokan berdasarkan tahun operasional alat (umur alat). Penambahan informasi tersebut dapat menambah akurasi informasi nilai perkiraan produksi beras yang dihasilkan.

- 12) Subsistem agribisnis ke empat yaitu distribusi dan pemasaran juga belum terlaksana dengan baik, hal ini dicerminkan adanya gejolak harga beras di konsumen maupun harga gabah di petani baik di saat panen raya maupun panen musim kering. Panjangnya rantai pasok dan struktur pasar yang mengarah struktur pasar *oligopsonistik* terutama pada musim panen raya ditengarai menjadi penyebab rendahnya nilai *market share* dari pasar yang terbentuk. Kondisi tersebut menyebabkan pada satu sisi harga beras di pasar konsumen tetap tinggi, sedangkan harga gabah yang diterima petani relatif rendah. Pergerakan harga yang diserahkan kepada mekanisme pasar, sedangkan pasar tidak berjalan secara sempurna menyebabkan harga mengalami fluktuasi yang cukup tinggi antar waktu.
- 13) Selain aliran bahan, waktu yang diperlukan sejak padi dipanen (GKP) sampai dengan beras dapat diakses oleh *end user* dalam bentuk beras perlu dicermati karena berdampak pada ketersediaan pasokan beras di pusat-pusat pasar. Hal ini sering dijumpai adanya kondisi dimana panen raya sudah berlangsung tetapi harga beras di pusat-pusat pasar masih tetap tinggi. Informasi rentang waktu tersebut (waktu supply) sangat penting untuk mengatur stok beras yang ada di pasar, sehingga dapat diperkirakan kapan dampak panen berpengaruh terhadap perubahan harga pasar karena sudah terbentuknya kesetimbangan penawaran dan permintaan.
- 14) Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa rentang waktu panen hingga tersedia beras di pasar berbeda antar musim, pada musim hujan (MH) diperkirakan 14 – 28 hari, pada MK I sekitar 14-21 hari, pada MK-II sekitar 7-14 hari. Rentang waktu tersebut sangat ditentukan ketersediaan dukungan alat pengering (*dryer*) dan kelancaran distribusi. Kegiatan yang sangat mempengaruhi panjangnya rentang waktu panen sampai beras tersedia di pasar adalah ketersediaan alat angkut, *dryer*, dan tenaga kerja untuk aliran gabah ke RMU dan ketersediaan moda transportasi dan kelancaran jalur distribusi untuk aliran beras ke konsumen.
- 15) Alternatif-alternatif rantai pasok baru, seperti model TTI (Toko Tani Indonesia) Kementerian Pertanian dan RPK (Rumah Pangan Kita) Bulog yang dapat dikontrol oleh pemerintah perlu diciptakan dan ditumbuh kembangkan untuk

memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses kebutuhan pangan pokok beras dengan harga yang terjangkau dan mutu yang baik. Analisis rantai pasok yang ada di sentra-sentra produksi dan sentra-sentra ekonomi perlu dilakukan secara berkelanjutan karena perubahan teknologi proses pengolahan, perubahan preferensi konsumen terhadap mutu beras, perubahan teknologi informasi akan berdampak pada sistem rantai pasok di suatu wilayah.

Pembentukan harga beras

- 16) Pembentukan harga gabah dan beras dengan asumsi pasar bersaing sempurna sangat ditentukan kekuatan penawaran dan kekuatan permintaan, dalam kenyataannya pasar tidak selalu berjalan secara sempurna. Pada saat musim panen raya struktur pasar gabah dan beras cenderung mengarah pada struktur pasar *oligopsonistik* dimana kekuatan pembeli terutama industri penggilingan menengah-besar memiliki kekuatan yang lebih dominan dibandingkan petani dalam menentukan harga. Kondisi tersebut biasanya diperburuk oleh situasi saat panen raya terjadi pada kondisi curah hujan tinggi, sehingga menyebabkan terganggunya proses kegiatan pemanenan, penjemuran, dan dalam distribusi. Kondisi tersebut sering menekan harga di tingkat petani pada saat musim panen raya. Namun fenomena yang agak berbeda terjadi pada musim panen raya MH 2007/2018 di mana harga tetap tinggi, meskipun mengalami sedikit penurunan. Pertanyaannya adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan harga beras tetap tinggi di kala musim panen raya?
- 17) Beberapa faktor penjelas dari fenomena tersebut dapat dilihat dari aspek teknis, ekonomi, kelembagaan pemasaran dan aspek kebijakan. Faktor teknis yang utama adalah penggunaan teknologi *combine harvester* mempercepat proses kegiatan panen lintas daerah sentra produksi, namun pada sisi lain ketersediaan dan penggunaan alat pengering (*dryer*) oleh penggilingan padi skala menengah dan besar dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas sehingga proses penjemuran atau pengeringan terhambat. Konsekuensinya adalah ada keterlambatan waktu yang cukup lama antara saat panen raya dengan ketersediaan beras di pusat-pusat pasar.

- 18) Faktor ekonomi yang terutama adalah perubahan preferensi konsumsi konsumen terutama kelas menengah-atas dari beras medium ke arah beras premium yang dalam literatur ekonomi disebut "*value ladder*" atau struktur peningkatan nilai tambah pertanian. Kondisi tersebut telah mendorong industri penggilingan menengah (PPM) dan besar (PPB) memperbesar pangsa produksi beras premium dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan beras medium sehingga harga beras secara keseluruhan tertarik ke atas dan tetap tinggi.
- 19) Faktor kelembagaan pemasaran, adanya teknologi informasi dan komunikasi rantai pasok beras tidak mengikuti pola lama yang telah mapan melalui berbagai pelaku tataniaga pada berbagai tingkatan. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut penggilingan padi dapat langsung melakukan penetrasi pasar ke pusat-pusat pasar atau konsumsi langsung, bahkan ke konsumen institusi secara langsung (restoran/rumah makan, hotel, catering). Kondisi tersebut berdampak pada psikologi pasar, dimana seakan-akan terjadi fenomena kelangkaan beras di pasar-pasar tradisional dan mendorong harga tetap tinggi di pasar.
- 20) Faktor kebijakan, isu kebijakan impor beras yang tidak menentu menyebabkan psikologi pasar bahwa beras di pasar domestik benar-benar langka atau kurang pasokan, sehingga harga yang secara bertahap mengalami penurunan dari Rp 5400/Kg hingga Rp 3800/Kg, kembali secara perlahan menunjukkan tendensi meningkat kembali hingga mencapai Rp 4200/Kg hingga mencapai Rp 4400/Kg, bahkan daerah tertentu menembus harga Rp 4800/Kg. Harus ada kebijakan yang perberasan yang transparan dengan argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- 21) Selain itu, pembentukan harga gabah di tingkat petani lain dipengaruhi oleh: (1) pola musim panen atau paceklik serta awal panen atau akhir panen, (2) biaya usahatani yang terus meningkat dari waktu ke waktu terutama dipicu kenaikan harga input, upah tenaga kerja termasuk alsintan, dan nilai sewa lahan; dan (3) keberhasilan panen (volume panen) dan kualitas gabah yang dihasilkan petani. Adapun pembentukan harga beras di tingkat penggilingan beras dipengaruhi oleh: (1) volume beras yang diserap saat panen atau paceklik, (2) tujuan pemasaran dan segmen pasar, (3) kualitas beras, dan (3)

pengaruh harga pembelian Bulog, yakni saat membeli gabah atau membeli beras. Sementara pembentukan harga beras di tingkat pedagang eceran/agen beras di pasar lokal dipengaruhi oleh: (1) volume beras yang diserap pedagang saat panen atau paceklik, (2) kualitas beras, (3) pengaruh harga penjualan Bulog melakukan operasi pasar, dan (4) dinamika permintaan dan perubahan preferensi konsumen terhadap beras yang dibeli.

Penyerapan Gabah Petani oleh Bulog Divre Jawa Timur

- 22) Pada tahun 2017, Bulog Divre Jawa Timur menargetkan dapat menyerap gabah (setara beras) sebanyak 906.240 ton. Namun realisasinya hanya sekitar 63,90%. Bila dilihat pada beberapa Subdivre, misalnya pada lokasi sentra padi Bojonegoro dan Lamongan dari target 95.000 ton, penyerapannya relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur yaitu mencapai 66,40%. Untuk lokasi subdivre seperti Surabaya Utara (didalamnya terdapat Kabupaten Sidoarjo) dan Madiun (didalamnya melingkupi sentra Kabupaten Ngawi) masing-masing realisasi serapannya sebesar 57,60% dan 48% (Tabel 3).
- 23) Pada tahun 2018, penyerapan gabah (setara beras) di Divre Jawa Timur dari target 697 ribu ton pada posisi 8 Maret 2018 baru sekitar 3,8%. Pada lokasi kajian di tiga subdivre, ternyata realisasi serapannya dibawah rataan serapan gabah (setara beras) di Jawa Timur. Menurut Bulog, bahwa masih rendahnya serapan gabah di Jawa Timur mengingat panen padi di Jawa Timur belum seluruhnya. Musim panen padi MH 2017/2018 di Jawa Timur telah berlangsung sejak Januari 2018, dan meningkat pada bulan Februari serta Puncaknya pada bulan Maret 2018.
- 24) Menurut Bulog, belum optimalnya panen di Jawa Timur menyebabkan harga gabah masih tinggi di tingkat petani. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, bahwa panen MH 2017/2018 masih berjalan, dan hingga posisi awal Maret proporsi panen baru sekitar 50-60%. Untuk di Sentra produksi seperti di Lamongan dan Sidoarjo baru panen sekitar 50%.
- 25) Sesuai INPRES No. 5 tahun 2015, bahwa HPP gabah sebesar Rp 3.700/Kg. Selanjutnya berdasarkan Rapat Koordinasi Terbatas antara Kementerian Perdagangan, Pertanian, dan pihak terkait lainnya akhirnya pemerintah

memutuskan untuk menaikkan fleksibilitas harga penyerapan gabah dari sebelumnya 10% di atas harga penyerapan pemerintah (HPP) menjadi 20% di atas HPP. Melalui kenaikan itu, diharapkan Bulog bisa membeli GKP maksimal 20% di atas HPP untuk semua wilayah.

4.2. Rekomendasi Kebijakan

- 26) Introduksi teknologi alat dan mesin pertanian terutama *combine harvester* dan *dryer* telah berdampak meningkatnya proses kegiatan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil, serta meningkatkan rendemen dari GKG ke beras dari 62-63 % menjadi 65-67 %. Introduksi *combine harvester* dan *dryer* skala besar diyakini dapat membantu mempercepat waktu proses panen hingga beras tersedia di pusat-pusat pasar beras sehingga berdampak terhadap stabilisasi harga beras.
- 27) Panjangnya rantai pasok gabah dan beras yang melibatkan 6-7 pelaku taniaga dan struktur pasar gabah dan beras pada musim panen raya menyebabkan harga beras yang dibayar konsumen relatif tetap tinggi dan harga yang diterima petani relatif tetap rendah. Namun fenomena pada panen raya MH 2017-2018 petani petani mendapatkan harga yang relatif tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan faktor teknis, ekonomi, kelembagaan dan kebijakan. Pemangkasan rantai pasok gabah dan beras dari petani produsen ke konsumen diyakini dapat meningkatkan harga gabah di tingkat petani dan menurunkan harga di tingkat konsumen.
- 28) Perubahan preferensi konsumsi oleh konsumen golongan menengah – atas telah mendorong penggilingan menengah-besar meningkatkan pangsa produksi beras premium dan mengurangi beras medium, karena dapat menciptakan nilai tambah. Namun demikian standard beras premium yang diproduksi dan beredar di pasar sesungguhnya belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas dan konsumen tidak dirugikan. Fenomena ini menjadi salah satu faktor penjelas kenapa harga gabah dan beras tetap tinggi di saat musim panen raya telah tiba.
- 29) Titik kritis pascapanen padi adalah di tahap pengeringan, terutama pada saat panen raya terjadi pada musim hujan, program pengembangan *Rice Drying*

Center (RDC) di daerah-daerah sentra produksi padi perlu menjadi alternatif solusi kebijakan lanjutan dari program bantuan alsintan (*combine harvester*) yang telah dijalankan.

- 30) Upaya peningkatan efisiensi rantai pasok beras dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) pemangkasan rantai pasok relefan dilakukan pasca penggilingan padi, karena peran penebas dan pedagang pengumpul sulit tergantikan perannya oleh pelaku usaha lain; (b) penyempurnaan program TTI terutama terkait harga pembelian gabah dan penjualan beras dengan selisih harga yang sangat tinggi dengan yang terjadi dipasar, sehingga gapoktan sulit mendapatkan gabah sesuai yang ditargetkan; (c) peningkatan serapan Bulog yang disertai peningkatan outlet Bulog (operasi pasar, Rastra, Rumah Pangan Kita/RPK).
- 31) Penguatan kelembagaan kelompok tani/gapoktan dalam bisnis gabah dan beras. PUPM sebagai suplier TTI di tingkat desa perlu penguatan baik dari aspek permodalan, manajemen usaha terutama administrasi keuangan, serta fasilitas pendukungnya sehingga dapat tumbuh menjadi rantai pasok baru yg lebih pendek. Fasilitas pendukung yang diperlukan adalah combine skala menengah-besar, dryer, dan penggilingan padi menengah-besar.
- 32) Meningkatkan daya serap gabah oleh Bulog dengan membangun kemitraan strategis dengan gapoktan dan swasta yang memiliki fasilitas pendukung. Peran Bulog sebagai suplier RPK di pusat-pusat pasar harus ditingkatkan perannya karena dapat memutus rantai pasok yang panjang dari penggilingan ke konsumen dan mempengaruhi psikologi pasar.
- 33) Permasalahan yang dihadapi pada panen MH, dengan masih terdapat curah hujan adalah kesulitan dalam penjemuran hasil panen. Oleh karena itu, dukungan kedepan terkait program hendaknya tidak hanya berupa input terkait benih, pupuk dan alsintan produksi dan panen, akan tetapi juga sangat dibutuhkan berupa bantuan alat pengering dan lantai jemur yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, P and Bechman. 1966. *The Social Construction of Reality*. New York. Doubble D.
- BKP Kementan. 2017. Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah. [http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/PERMENTAN%20No%203%202017\(1\).pdf](http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/PERMENTAN%20No%203%202017(1).pdf). Di Unduh 20 Mei 2017.
- BPS. 2017. Metoda Perhitungan dan Rincian Keberadaan Cadangan Beras Nasional Tahun 2015.PPT Bahan FGD, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Jakarta.
- BPS. 2016. Hasil Sementara Sesnsus Ekonomi 2016. BLaporan Survey Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- BPS.2013. Laporan Survey Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- BPS.2008. Laporan Hasil Survei Susut Panen dan Pascapaen Gabah Beras Tahun 2005 - 2007. Badan Pusat Statistik, Jakarta.Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Research Approach*. Sage Publication.
- BPS. 1996. Survei susut pascapanen MT. 1994/1995 Kerjasama BPS, Ditjen Tanaman Pangan, Badan Pengendali Bimas, Bulog, Bappenas, IPB, dan Badan Litbang Pertanian. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Chambers, M.J. and Bailey. 1996. .A theory of commodity price fluctuations.The Journal of Political Economy, Vol. 104, No. 5, hal.924-957. Dahl, D. A. dan Hammond, J. W. 1977. Market and Price Analysis. McGraw Hill. New York.
- Deaton, A. and G. Laroque. 1992. On the behavior of commodity prices. Review of Economic Studies, No. 59, hal. 1-23. Fuad F M M. 2009. Analisis Stok Pangan Dalam Sistem Distribusi Penunjang Ketahanan Pangan. AGROINTEK Agustus 2009, Vol. 4 (1):39-48.
- Granovetter, M. dan R. Sedberg 1992. *The Sociology of Economics Life*. Westview Press; Boulder, San Fransisco, Oxford.
- Hayami, Y., T. Kawagoe, Y. Morooka, and M. Siregar. 1987. Agricultural marketing and Processing in Upland Java : A Perspective from a Sunda Village. CGPRT No. 8. The CGPRT Centre. Bogor.
- Jamal, E, E.Ariningsih, K.M. Noekman, Hendiarto, dan A. Askin. 2006. Analisis Kebijakan Penentuan Harga Pembelian Gabah. Paper Seminar Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial dan Kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Kohl, R. L. dan Uhl. 1990. Marketing of Agricultural Products. MacMillan Publishing Company. New York.
- Kono, Y. 2000. Marketing of Agricultural Production in Upland Area of West Java : A Banana Case. Unpublished.

- Limbong, W.H. dan P. Sitorus.1995. Kajian Pemasaran Komoditi Pertanian Andalan. Sosek Pertanian IPB, Bogor.
- LPEM FEUI (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia). 2001. Bunga Rampai Ekonomi Beras. Jakarta:LPEM FEUI.
- Mayrowani, H., Supriyati, Rahmanto, B., dan Erwidodo. 2003. Laporan penelitian Kajian perdagangan Komoditas Pertanian Antar Wilayah dalam Era Otonomi Daerah. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Mears, L., M.H. Agabin, T.L. Anden, R. C. Marquez. 1974. Rice Economy of the Philippines. Quezon City, Philippines: University of the Philippines Press.
- Nicholson, W. (2004), Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, 9th edition. Nonaka, A. 2001. Marketing of Temperate Vegetable in West Java. Unpublished.
- Perdana, T. 2014. *Inclusive Agri Supply Chain Development: A Case Study on Vegetables Industry*. Seminar Nasional "Logistik Industri Agribisnis Indonesia: Tantangan dan Peluang Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015", Jakarta 12 Februari 2014.
- PSEKP. 2017. Kajian Analisis Keberadaan Surplus dan Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Beras Untuk Menjaga Stabilitas Harga di Tingkat Konsumen. Laporan Analaisis Kebijakan, *unpublished*. Pusat Sosek dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Rachman, B dan S.K. Dermorejo. 2001. Dinamika Harga dan Perdagangan Beras dalam Ekonomi Padi dan Beras Indonesia.Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Schmid, A. A. 1987. Property, Power, and Public Choice. An Inquiry Into Law and Economics. Praeger.New York Westport, Connecticut. London.
- Simatupang dan N. Syafaat. 1999. Analisis Anjloknya Harga Komoditas Pertanian Selama Semester I-1999. Paper Kebijakan.Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Suismono. 2002. Standardisasi Mutu Untuk Perdagangan Beras di Indonesia. Majalah Pangan 39(XI): 37-47.
- Suryana, R.N., D. Rachmina, Sumedi dan T. Novianti. 2009. Analisis Efisiensi dan Daya Saing Padi Pandan Wangi Indonesia. Jurnal Pertanian.Mardianto, Y. Supriatna, N.K Agustin. 2005. Dinamika Pola Pemasaran Gabah dan Beras di Indonesia. FAE Vol.23 No.2 Des 2005. Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan Pertanian. Bogor.p116-131.
- Tomek, W. G. 2000. Commodity Prices Revisited. Staff Paper 2000-05, Department of Applied Economics and Management, Cornell University, New York.
- Zhou, H and Benton. 2007. Supply chain practice and information sharing. Journal of Operations Management 25(6):1348–1365.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penggilingan Padi Skala Kecil di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, 2018



Lampiran 2. Penggilingan Padi Skala Menengah di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, 2018



Lampiran 3. Penggilingan Padi Skala Besar di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, 2018



Lampiran 4. Penggilingan Padi Skala Besar di Kabupaten Ngawi Jawa Timur, 2018

